

**KETERSEDIAAN DAN KEBUTUHAN PRASARANA
DAN SARANA DESA SABILA SEBAGAI DESA
PUSAT PERTUMBUHAN KECAMATAN MALLAWA
KABUPATEN MAROS**

SKRIPSI

Oleh :

IRWAN IDRIS

45 92 042 005

UNIVERSITAS

BOSOWA



**JURUSAN TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS "45"
MAKASSAR
2007**

**KETERSEDIAAN DAN KEBUTUHAN PRASARANA
DAN SARANA DESA SABILA SEBAGAI DESA
PUSAT PERTUMBUHAN KECAMATAN MALLAWA
KABUPATEN MAROS**

SKRIPSI

Oleh :

IRWAN IDRIS

45 92 042 005



**JURUSAN TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS "45"
MAKASSAR
2007**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : KETERSEDIAAN DAN KEBUTUHAN PRASARANA
DAN SARANA DESA SABILA SEBAGAI DESA PUSAT
PERTUMBUHAN KECAMATAN MALLAWA
KABUPATEN MAROS.

Nama Mahasiswa : IRWAN IDRIS

Stambuk : 45 92 042 005

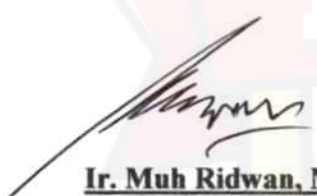
Jurusan : Teknik Perencanaan Wilayah Dan Kota

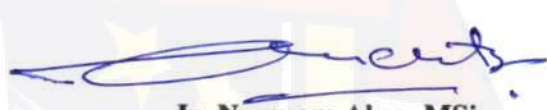
Fakultas : Teknik

Disetujui Komisi Pembimbing


Ir. Muh. Fathien Azmy, MSi
Pembimbing I




Ir. Muh Ridwan, MSi
Pembimbing II


Ir. Nursyam Aksa, MSi
Pembimbing III

Mengetahui

Dekan Fakultas Teknik
Universitas "45" Makassar


Ir. Syamsul Bachri Suaib, MT

Ketua Jurusan
Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota.


Ir. Muh. Ridwan, MSi



HALAMAN PENERIMAAN

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Universitas "45" Makassar, Nomor : A.103 /SK/ FT-U-45/XI/2007 pada tanggal 24 Nopember 2007 tentang **PANITIA DAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR MAHASISWA**, Maka :

Pada hari / Tanggal : Kamis, 29 Nopember 2007
Skripsi Atas Nama : IRWAN IDRIS
Nomor Pokok : 45 92 042 005

Telah diterima dan sahkan oleh Panitia Ujian Skripsi Sarjana Negara Fakultas Teknik Universitas " 45 " Makassar setelah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Ujian Skripsi Sarjana Negara dan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana Negara Jenjang Strata Satu (S – I) , pada Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah Dan Kota, Fakultas Teknik

PENGAWAS UMUM

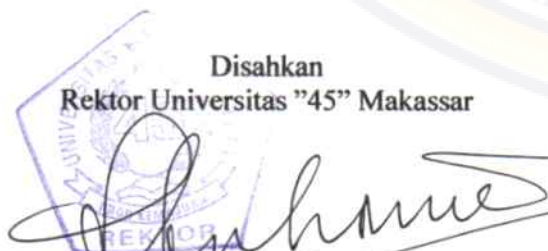
Prof. Dr. H Abu Hamid, MA.
(Rektor Universitas "45" Makassar)

TIM PENGUJI TUGAS AKHIR

Ketua : Dr. Ir. Syahriar Tato, MS
Sekertaris : Ir. Jamaluddin Jahid, M.Si
Anggota : Ir. Muh. Fathien Azmy, M.Si
Ir. Muh. Ridwan, M.Si
Ir. Nursyam AS, M.Si
Ir. Louis Santoso, M.Si
Ir. Rudi Latef, M.Si
Ir. Syafri, Msi



Disahkan
Rektor Universitas "45" Makassar



Prof. Dr. H Abu Hamid, MA.

Diketahui
Ketua Jurusan Perencanaan Wilayah
Dan Kota Universitas "45" Makassar



Ir. Muh. Ridwan, MSi

KATA PENGANTAR

Puji Syukur **penulis** panjatkan Kehadirat Allah SWT, karena atas petunjuk dan rahmat-Nya sehingga penelitian ini dapat diselesaikan.

Penulisan thesis ini merupakan salah satu bagian proses pendidikan yang selama ini penulis ikuti dan kemudian menerapkan dan mengaplikasikan kedalam suatu bentuk penelitian yang hasilnya dapat memberikan masukan atau pembandingan dalam ilmu pengetahuan dan sebagai masukan kepada pemerintah dalam rangka penentuan Desa Pusat Pertumbuhan (DPP) dan Kawasan Terpilih Pusat Pengembangan Desa (KTP2D) di Kabupaten Maros.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya pro dan kontra atas penetapan dan prioritas pengembangan Desa Sabila dalam proyek pengembangan desa di Kabupaten Maros. Maka dari itu, penulis mencoba mengangkat permasalahan tersebut sebagai bahan riset untuk mengkaji kategori dan kriteria DPP KTP2D Sabila dan penelitian ini hanya dijadikan sebagai pembandingan atas penetapan dari pelaksanaan proyek DPP KTP2D di Kabupaten Maros tahun 2004-2005.

Kegiatan penelitian ini dapat diselenggarakan dengan baik atas dukungan dan bantuan berbagai pihak, sehingga penyelesaian penulisan ini dapat diselesaikan sesuai dengan waktunya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis dengan tulus menyampaikan terimah kasih kepada :

1. Bapak Ir. Muh. Fathien Azmy, MSi, Ir. Muh. Ridwan, MSi dan Ir. Nursyam Aksa, MSi., sebagai pembimbing yang telah meluangkan waktunya memberikan bimbingan dan pengarahan.
2. Bapak Ir. Syamsul Bahcri Suaib, MSi. , selaku Dekan beserta staf Fakultas teknik yang berupaya memberikan kemudahan-kemudahan dalam proses penyusunan sampai selesainya penulisan studi ini.

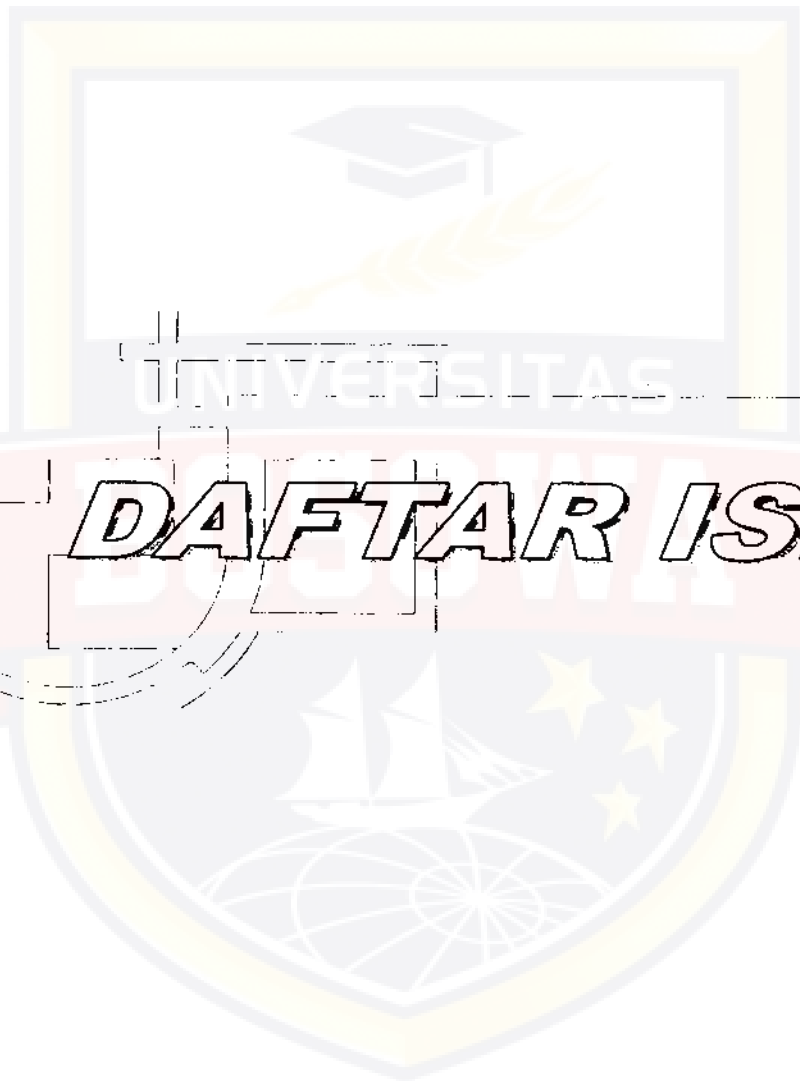


3. Bapak Ir. Muh. Ridwan, MSi. , selaku Ketua Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota beserta stafnya yang telah berupaya semampunya memberikan dukungan informasi dan batuan berupa kemudahan-kemudahan dalam prses penyelesaian studi.
4. Rekan-rekan penulis yang selama ini telah memberikan batuan berupa dorongan, bahan literatur yang penulis butuhkan sehingga proses penulisan ini dapat berjalan dengan baik, yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu.
5. Rasa terima kasih tak terhingga kepada orang tua dan keluarga yang memberikan segala keperluan dalam menyelesaikan studi ini.
6. Seluruh civitas akademik Universitas "45" yang turut memberikan partisipasi dalam penyelesaian penulisan ini.
7. Dinas Pemerintah Kota Kabupaten Maros beserta stafnya yang telah banyak membantu dalam memberikan data dan informasi dalam penyelesaian penulisan ini.
8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang turut memberikan dorongan materi maupun fasilitas sehingga dapat menyelesaikan penulisan ini.

Penulisan menyadari bahwa tugas akhir ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu maka penulis sangat mengharapkan masukan dan kritik yang sifatnya membangun dalam rangka penyempmaan penulisan ini. Demikian yang kami sampaikan, semoga Tuhan YME membalas semua kebaikan dan batuan yang telah diberikan kepada penulis.

Makassar, Nopember 2007

Penulis



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Mamfaat Penelitian.....	5
E. Ruang Lingkup Pembahasan.....	5
F. Kerangka Pikir Penelitian.....	6
G. Sistematika Pembahasan.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Pembangunan dan Perencanaan Pedesaan.....	9
1. Peran dan Fungsi Wilayah Perdesaan.....	9
2. Pembangunan Perdesaan Bersifat Spatial.....	13
3. Peranan Desa Pusat Pertumbuhan dan KTP2.....	14
B. Pembangunan Prasarana dan Sarana.....	15
1. Konsep Prasarana dan Sarana.....	15

2. Kebutuhan Prasarana dan Sarana.....	17
C. Teori-Teori Pertumbuhan/Pembangunan dan Simpul Jasa Distribusi...	21
1. Teori Tempat Sentral.....	21
2. Teori Kutub Pertumbuhan/Pusat Pembangunan.....	22
3. Konsep Hirschman dan Myrdal.....	22
4. Teori Simpul dan Jasa Distribusi.....	22
5. Alternatif Susunan DPP Calon Desa Hinterland Dalam KTP2D.....	23
D. Kerangka Konseptual.....	26
BAB III METODE PENELITIAN.....	28
A. Jenis Penelitian.....	28
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	29
C. Jenis Data.....	29
D. Teknik Pengumpulan Data.....	30
E. Teknik Analisis Data.....	31
1. Penentuan KTP2D.....	32
2. Penilaian Kategori DPP.....	32
3. Analisis Kategori dan Kebutuhan DPP KTP2D.....	36
F. Definisi Operasional.....	42
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	44
A. Kriteria Lokasi DPP dalam KTP2D.....	44
a. Kriteria Umum.....	44
b. Kriteria Khusus.....	44
B. Pertimbangan Pemilihan Lokasi DPP dalam KTP2D.....	44

a. Pertimbangan Umum	44
b. Pertimbangan Khusus Desa Sabila	45
C. Tinjauan Umum DPP KTP2D Kecamatan Mallawa	45
1. Karakteristik Fisik Dasar	45
a. Keadaan Geografis dan Wilayah Administrasi	45
b. Topografi wilayah.....	47
c. Keadaan Iklim dan Hidrologi.....	48
d. Geologi/ Struktur Tanah.....	48
2. Identifikasi Aspek Kependudukan.....	48
a. Jumlah dan Kepadatan Penduduk.....	48
b. Penduduk Menurut Mata Pencarian.....	50
3. Identifikasi Ruang Kawasan.....	52
a. Fasilitas Pendidikan.....	52
b. Fasilitas Kesehatan.....	53
c. Fasilitas Peribadatan.....	55
d. Fasilitas Olah Raga.....	55
e. Perumahan.....	56
f. Sumber Daya Air.....	57
g. Telekomunikasi.....	58
4. Potensi Sektor-Sektor Kegiatan Ekonomi.....	59
a. Sektor Pertanian dan Perkebunan.....	59
b. Sektor Peternakan.....	61
c. Sektor Industri.....	61

d. Sektor Pertambangan.....	62
e. Sektor Usaha dan Jasa.....	63
f. Sektor Perekonomian.....	64
5. Prasarana dan Sarana Transportasi.....	65
a. Jaringan Jalan.....	65
b. Sarana Transportasi.....	66
c. Pengelolaan Sampah.....	67
6. Lembaga Kemasyarakatan.....	67
7. Partisipasi Masyarakat.....	68
D. Tinjauan Khusus Desa Sabila.....	69
1. Identifikasi Fisik Dasar.....	69
2. Pola Penggunaan Lahan.....	70
3. Karakteristik Kependudukan.....	71
4. Identifikasi Aspek Perekonomian.....	77
5. Identifikasi Aspek Perumahan/ Perumahan.....	79
6. Identifikasi Aspek Fasilitas dan Infrastruktur Desa.....	81
7. Sistem Transportasi.....	91
E. Rencana Tata Ruang Wilayah.....	93
F. Fungsi dan Kedudukan Desa Sabila Sebagai DPP dalam RUTR.....	
Ibukota Kecamatan Mallawa.....	94
G. Analisis DPP dan KTP2D Sabila.....	95
1. Pembentukan DPP Dalam KTP2D Sabila.....	95
2. Penilaian Status Desa Sabila Sebagai DPP Dalam KTP2D.....	97

H. Analisis Kriteria dan Kebutuhan DPP Dalam KTP2D.....	102
1. Kondisi dan Potensi DPP Sabila.....	102
2. Penilaian Kategori dan Kebutuhan Prasarana DPP Sabila.....	108
I. Introspek dan Prospek Desa Sabila Sebagai DPP.....	110
1. Kondisi dan Potensi Kawasan DPP Sabila.....	110
2. Penentuan dan Penilaian Status KTP2D.....	111
3. Penilaian Kategori dan Kebutuhan Prasarana DPP KTP2D Sabila..	113
J. Informasi Program DPP dalam KTP2D.....	116
1. Identifikasi dan Masalah.....	117
2. Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan.....	118
3. Pelaksanaan dan Pengembangan DPP dalam KTP2D.....	118
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	119
A. Kesimpulan.....	120
B. Saran.....	121
DAFTAR PUSTAKA.....	122
LAMPIRAN FOTO	



DAFTAR TABEL



DAFTAR TABEL

1. Tabel 3.1	Penilan DPP Berdasarkan Jenis Variabel Potensi Desa.....	33
2. Tabel 3.2	Penilaian DPP Berdasarkan PSD untuk Menunjang..... Perkembangan Produksi Jasa.....	34
3. Tabel 3.3	Penilaian DPP Berdasarkan Kelembagaan Masyarakat.....	34
4. Tabel 3.4	Penilaian DPP Berdasarkan PSD untuk Pelayanan Jasa-..... Jasa.....	35
5. Tabel 3.5	Penilaian DPP Berdasarkan Jumlah Penduduk yang Cukup....	35
6. Tabel 3.6	Penilaian DPP Berdasarkan Aksesibilitas Terhadap Kota..... Dan Desa Sekitarnya.....	36
7. Tabel 3.7	Penilaian DPP Berdasarkan Lokasi Antara Ibukota... ..	36
8. Tabel 3.8	Tabulasi Metode Pembobotan.....	37
9. Tabel 3.9	Matriks Penentuan Bobot Nilai Variabel.....	38
10. Tabel 4.1	Luas Wilayah Kecamatan Mallawa Menurut..... Kelurahan/Desa Tahun 2006.....	46
11. Tabel 4.2	Pembagian Wilayah Menurut Tingkat Perkembangan..... Desa/Kelurahan di Kecamatan Mallawa Tahun 2006.....	47
12. Tabel 4.2	Penduduk Kecamatan Mallawa Menurut Desa/Kelurahan..... Tahun 2006.....	49
13. Tabel 4.3	Kepadatan Penduduk dan Jumlah Rumah Tangga di..... Kecamatan Mallawa Menurut Desa/Kelurahan Tahun 2006...	50
14. Tabel 4.4	Struktur Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian Menurut... Desa/Kelurahan di Kecamatan Mallawa Tahun 2006.....	51
15. Tabel 4.5	Banyaknya Rumah Tannga di Kecamatan Mallawa Menurut... Desa/Kelurahan dan Pentahapan Keluarga Sejahtera..... Tahun 2006.....	52
16. Tabel 4.6	Banyaknya Fasilitas Pendidikan Menurut Desa/Kelurahan..... Kecamatan Mallawa Tahun 2006.....	53



17. Tabel 4.7	Banyaknya Fasilitas Kesehatan Menurut Desa/Kelurahan..... Kecamatan Mallawa Tahun 2006.....	54
18. Tabel 4.8	Banyaknya Fasilitas Olah Raga di Kecamatan Mallawa..... Menurut Desa/Kelurahan Tahun 2006.....	55
19. Tabel 4.9	Banyaknya Perumahan di Kecamatan Mallawa Menurut..... Desa/Kelurahan Tahun 2006.....	56
20. Tabel 4.10	Banyaknya Sumber Daya Air di Kecamatan Mallawa Menurut... Desa/Kelurahan Tahun 2006.....	57
21. Tabel 4.11	Banyaknya Rumah Tangga di Kematan Mallawa Menurut..... Desa/Kelurahan dan Sumber Penerangan yang Digunakan.... Tahun 2006.....	58
22. Tabel 4.12	Luas Areal dan Produksi Pada Pertanian dan..... Perkebunan di Kecamatan Mallawa Menurut..... Desa/Kelurahan Tahun 2006.....	60
23. Tabel 4.13	Populasi Ternak di Kematan Mallawa Menurut..... Desa/Kelurahan Tahun 2006.....	61
24. Tabel 4.14	Jumlah dan Jenis Usaha Industri di Kematan Mallawa Menurut Desa/Kelurahan Tahun 2006.....	62
25. Tabel 4.15	Jumlah dan Jenis Usaha Jasa di Kematan Mallawa Menurut Desa/Kelurahan Tahun 2006.....	63
26. Tabel 4.16	Jumlah dan Jenis Sektor Perekonomian di Kecamatan Mallawa.. Menurut Desa/Kelurahan Tahun 2006.....	64
27. Tabel 4.16	Panjang Jalan di Kecamatan Mallawa Menurut..... Desa/Kelurahan dan Kelasnya Tahun 2006.....	66
28. Tabel 4.17	Jenis Penggunaan Lahan di Desa Sabila Tahun 2006.....	71
29. Tabel 4.18	Perkembangan Jumlah Penduduk di Desa Sabila Periode 5 Tahun Terakhir (2002-2006.....	73
30. Tabel 4.19	Distribusi Penduduk di Desa Sabila Tahun 2006.....	73
31. Tabel 4.20	Struktur Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur..... di Desa Sabila Tahun 2006.....	74



32. Tabel 4.21	Struktur Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan..... di Desa Sabila Tahun 2006.....	76
33. Tabel 4.22	Struktur Penduduk Berdasarkan Agama dan Kepercayaan... di Desa Sabila Tahun 2006.....	77
34. Tabel 4.24	Klasifikasi Perumahan/Permukiman di Desa Sabila..... Tahun 2007.....	80
35. Tabel 4.25	Jenis Sarana Perkantoran dan Bangunan di Desa Sabila..... Tahun 2007.....	83
36. Tabel 4.26	Jenis dan Jumlah Sarana Pendidikan di Desa Sabila..... Tahun 2007.....	84
37. Tabel 4.27	Jenis dan Jumlah Sarana Kesehatan di Desa Sabila..... Tahun 2007.....	85
38. Tabel 4.28	Jenis dan Jumlah Sarana Peribadatan di Desa Sabila..... Tahun 2007.....	86
39. Tabel 4.29	Jenis dan Jumlah Sarana Perdagangan di Desa Sabila..... Tahun 2007.....	87
40. Tabel 4.30	Jenis dan Jumlah Sarana Olah Raga/Rekreasi di Desa..... Sabila Tahun 2007.....	88
41. Tabel 4.31	Klasifikasi Jaringan Jalan di Desa Sabila Tahun 2007.....	92
42. Tabel 4.32	Persentase LUas Wilayah DPP Sabila.....	97
43. Tabel 4.33	Penilaian DPP Berdasarkan Variabel Potentensi Desa.....	98
44. Tabel 4.34	Penilaian DPP Berdasarkan PSD Untuk Menunjang..... Perkembangan Produksi dan Jasa.....	99
45. Tabel 4.35	Penilaian DPP Berdasarkan Kelembagaan Masyarakat.....	99
46. Tabel 4.36	Penilaian DPP Berdasarkan PSD Untuk Pelayanan..... Jasa-Jasa.....	100
47. Tabel 4.37	Penilaian DPP Berdasarkan PSD Jumlah Penduduk..... Yang Cukup.....	100
48. Tabel 4.38	Penilaian DPP Berdasarkan Aksesibilitas Terhadap..... Desa dan Desa Sekitarnya.....	101



49. Tabel 4.39	Penilaian DPP Berdasarkan Lokasi Antara Ibukota Desa....	101
50. Tabel 4.40	Rekapitulasi Penilaian DPP.....	102
51. Tabel 4.41	Penyesuaian dan Perbandingan Kebutuhan Jalan Lokal dan... Desa Pada Kecamatan Mallawa dan Kawasan DPP KTP2D.. Sabila Tahun 2006.....	104
52. Tabel 4.42	Penyesuaian dan Perbandingan Kebutuhan Fasilitas..... Pendidikan Pada Kecamatan Mallawa dan Kawasan DPP..... KTP2D Sabila Tahun 2006.....	105
53. Tabel 4.43	Rekapitulasi Penilaian Secara Kualitatif dan Potensi Wilayah... Kecamatan Mallawa dan Kawasan DPP Sabila.....	108
54. Tabel 4.44	Rekapitulasi Kriteria DPP Sabila Berdasarkan Skoring dan... Variabel Penilaian.....	109



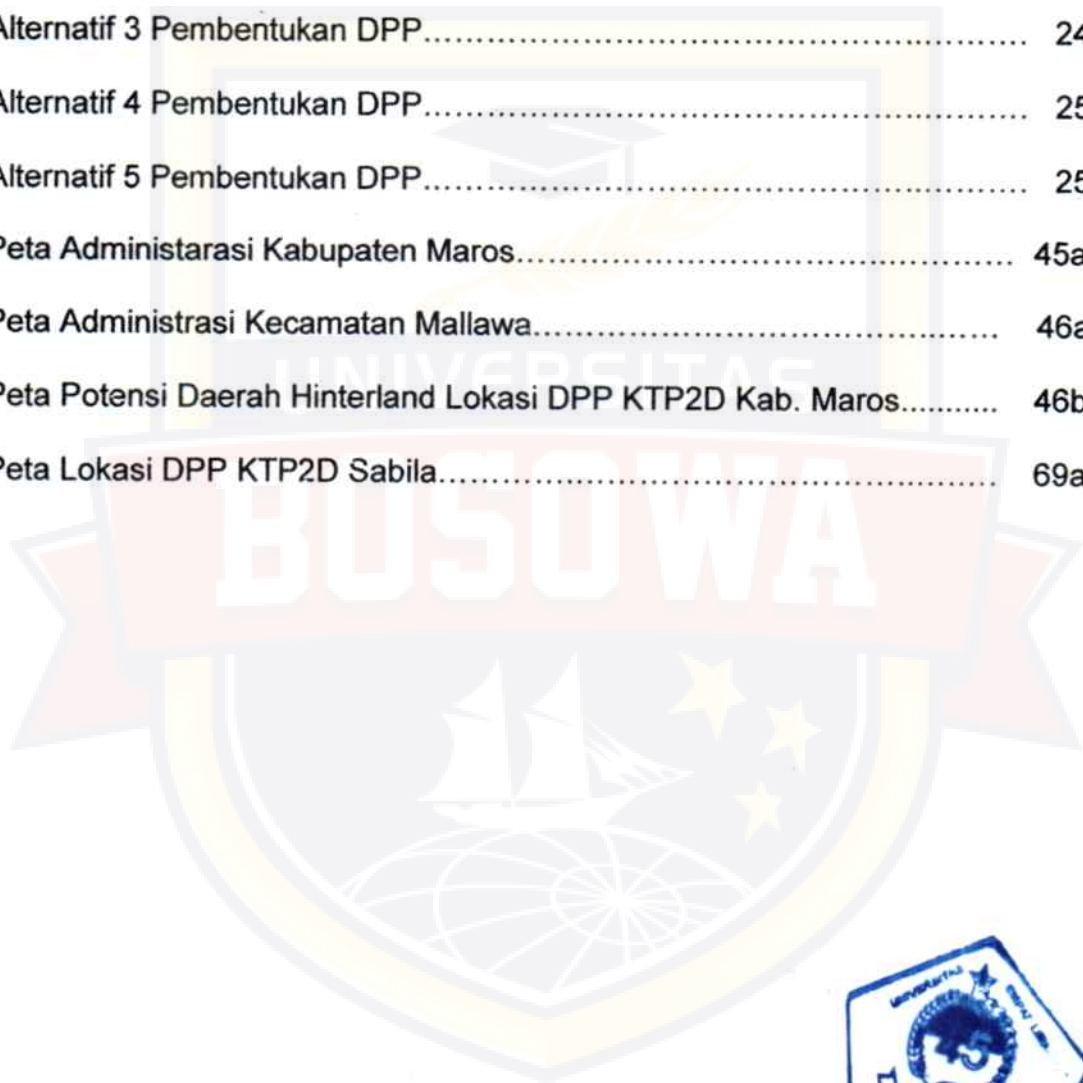
UNIVERSITAS

DAFTAR GAMBAR



DAFTAR GAMBAR

Nama Gambar	Hal
1. Alternatif 1 Pembentukan DPP.....	24
2. Alternatif 2 Pembentukan DPP.....	24
3. Alternatif 3 Pembentukan DPP.....	24
4. Alternatif 4 Pembentukan DPP.....	25
5. Alternatif 5 Pembentukan DPP.....	25
6. Peta Administarasi Kabupaten Maros.....	45a
7. Peta Administrasi Kecamatan Mallawa.....	46a
8. Peta Potensi Daerah Hinterland Lokasi DPP KTP2D Kab. Maros.....	46b
9. Peta Lokasi DPP KTP2D Sabila.....	69a





BAB I
PENDAHULUAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) Tahun 1999 dan Undang-Undang nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah yang mengamanatkan untuk memacu pertumbuhan sektor-sektor kegiatan dan mengarahkan program pembangunan untuk memanfaatkan potensi sumberdaya alam dengan optimal, dengan tujuan tercapainya pemerataan pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya mendorong pelaksanaan otonomi daerah dan sebagai instrument bagi pemerintah kabupaten/Desa dalam membangun wilayahnya baik kawasan perdesaan maupun kawasan pedesaan secara mandiri dengan tetap menjaga keseimbangan pembangunan untuk tetap berkelanjutan (Sustainable development).

Pembangunan dan pengembangan wilayah pedesaan pada dasarnya bertumpuh pada kondisi sosial ekonomi serta budaya masyarakat. Sumberdaya alam sebagai salah satu modal dasar pembangunan harus dijaga, dikelola, dan dimanfaatkan dengan tetap memelihara fungsi kelestarian lingkungan sesuai daya dukung yang dimiliki (Carrying Capacity) untuk memberi mamfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Terkait dengan hal tersebut diatas, pengembangan kawasan pedesaan kaitannya dengan pemamfaatan potensi sumberdaya alam akan dicapai dengan mempertimbangkan aspek sosial, budaya, ekonomi, kelestarian dan kesesuaian sumberdaya alam. Pemamfaatan sumberdaya alam untuk tujuan pembangunan pada dasarnya adalah menilai potensi dan konsistensi serta nilai mamfaat yang diperoleh guna mewujudkan masyarakat adil dan makmur sehingga kesenjangan (disparitas) dalam satu wilayah dapat diminimalkan.

Untuk menunjang pertumbuhan wilayah kecamatan dalam konsistensi wilayah kabupaten secara umum (lingkup makro), rumusan atau konsep dasar yang dikembangkan adalah mengoptimalkan segenap potensi



sumberdaya alam daerah terutama pertimbangan kondisi dan potensi desa-desa yang ada serta mengkaji kinerja pusat distribusi dan pemasaran hasil produksi sebelum di teruskan ke wilayah yang lebih luas.

Berbagai langkah dan kebijakan yang telah ditempuh oleh pemerintah untuk mengembangkan wilayah pedesaan. Sejak PELITA IV pengembangan wilayah pedesaan ditangani melalui program Pembangunan Desa Pusat Pertumbuhan (P2DPP) dengan fokus kegiatan pada pembangunan prasarana bagi desa pusat pertumbuhan. Akhir PELITA V pengembangan wilayah pedesaan ditangani secara kawasan, yakni desa pusat dan hinterlandnya sebagai satu kesatuan kawasan, yang kemudian dikenal dengan Kawasan Terpilih Pusat Pengembangan Desa (KTP2D). KTP2D pada dasarnya adalah salah satu konsepsi pembangunan wilayah pedesaan yang terintegrasi dalam konstelasi pembangunan kabupaten/Desa sesuai semangat Undang-Undang nomor 22 Tahun 1999. Penanganan kawasan perdesaan tidak terlepas dengan potensi wilayah kabupaten secara umum. Penilaian potensi wilayah kabupaten diawali dengan mengkaji aspek-aspek pelaksanaan pembangunan yang telah tercapai serta program-program pembangunan yang akan dilaksanakan dimasa yang akan datang. Dengan demikian suatu produk rencana memiliki keterkaitan dengan produk rencana di atasnya dalam hal ini Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK) yang merupakan dasar acuan untuk merumuskan kawasan perdesaan yang akan dikembangkan terutama pada saat pemilihan lokasi pengembangan desa pusat pertumbuhan. Hal ini sangatlah mendasar karena dalam pembangunan pedesaan sangatlah terkait dengan kemampuan pemerintah untuk menganggarkannya, terlebih jika dikaitkan dengan kondisi negara kita saat ini.

Kawasan strategis perdesaan biasanya diindikasikan dengan keberadaan unit-unit satuan simpul pusat-pusat pengembangan kegiatan primer yang apabila disentuh secara menyeluruh terutama dibidang perumahan dan permukiman akan berdampak signifikan terhadap daerah di sekitarnya terutama yang memiliki akses langsung dalam sistem distribusi dan pola aliran barang.



Dalam kaitan tersebut, pemerintah Kabupaten Maros hasil identifikasi wilayah-wilayah pedesaan/Desa yang ada untuk ditetapkan sebagai pusat pertumbuhan pada kecamatan Mallawa, maka Desa Sabila terpilih sebagai pusat pengembangan distribusi terhadap desa-desa hinterlandnya.

Secara georafis wilayah Kabupaten Maros terletak pada posisi antara $040^{\circ} 10' 30''$ sampai $300^{\circ} 19' 13''$ Lintang Selatan dan $190^{\circ} 26' 30''$ sampai $190^{\circ} 47' 20''$ Bujur Timur, dengan batasan administrasi sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bone
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Camba
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bone
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Pangkep

Wilayah Kabupaten Maros berdasarkan kondisi topografinya, terdiri atas daerah pesisir dan dataran tinggi (pegunungan), dengan bentuk permukaan yang beragam (datar, bergelombang, berbukit hingga pegunungan). Sedangkan potensi sumberdaya alam yang dimiliki berdasarkan pemanfaatan lahan antara lain; lahan persawahan, perkebunan, hutan, tambak dan potensi wisata. Sumberdaya alam tersebut umumnya diusahakan oleh masyarakat untuk produktivitas perekonomian. Jenis kegiatan tersebut yang merupakan produktivitas wilayah sebagai nilai kontribusi terhadap wilayah Kabupaten Maros pada umumnya dan kecamatan Mallawa pada khususnya

Secara administrasi Kecamatan Mallawa merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Maros, yang terletak sekitar 61 Km dari Desa Maros. Kecamatan Mallawa terbagi atas (sebelas) desa/ kelurahan, dengan luas lahan keseluruhan kurang lebih 23.591,88 Ha. Desa Sabila yang ditetapkan sebagai Pusat Pengembangan terhadap desa-desa sekitarnya (Hiterlandnya) tidak terlepas dari potensi dan kedudukannya dalam kontelasi wilayah kecamatan maupun dalam wilayah secara umum untuk dikembangkan. Kesiapan fasilitas sosial ekonomi serta prasarana dan sarana yang merupakan dasar dalam menetapkan orientasi pengembangannya masih terlihat sangat minim, baik segi kualitas maupun kuantitasnya.

Oleh karena itu, Desa Sabila dipandang dari segi prasarana dan sarana wilayah belum memadai serta tidak berfungsi secara optimal. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu diadakan penelitian untuk memahami



dan menemukan prospek penetapan Desa Pusat Pertumbuhan di Kabupaten Maros dengan penilaian status Desa Sabila sebagai Pusat Pertumbuhan berdasarkan kesiapan prasarana dan sarana wilayah. Penelitian ini difokuskan pada perencanaan kebutuhan prasarana dan sarana Desa sebagai pusat pertumbuhan yang merupakan dasar utama bagi pengembangannya.

Berkembangnya suatu Desa lebih banyak dipengaruhi oleh fungsi yang diemban oleh Desa itu sendiri sebagai simpul jasa dan distribusi sehingga harus didukung dengan kegiatan aktifitas perDesaan berupa :

- Pusat kegiatan perkantoran dan pelayanan jasa.
- Pusat kegiatan perdagangan dan transportasi.
- Pusat kegiatan pelayanan sosial ekonomi.
- Laju pertumbuhan penduduk dalam pembangunan permukiman dan perumahan.

Menurut Tjahjati dalam (Budihajo, 1997:xiv) bahwa peranan Desa-Desa dalam pembangunan wilayah nasional harus dibarengi dengan usaha pengembangan, antara lain :embangkan sistem Desa yang dapat mengoptimalkan tingkat pelayanan dan kegiatan ekonomi.

- a) Mengembangkan urban governance yang dapat mewujudkan fungsi dan tingkat pelayanan Desa menurut sistem yang optimal.
- b) Mengembangkan hubungan desa-Desa termasuk *megaurban* yang dapat mendorong dan menyerahkan pembangunan antara desa dan Desa.
- c) Meningkatkan produktivitas daerah perDesaan dalam rangka mempercepat tercapainya fungsi Desa yang diinginkan dalam sistem Desa.

B. Rumusan Masalah

Dipilihnya Desa Sabila Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros sebagai prioritas pusat pengembangan desa tidak terlepas dari adanya beberapa hal yang masih perlu dikaji. Oleh karena itu, permasalahan yang harus dikaji dalam penelitian ini, dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana status Desa Sabila sebagai pusat pengembangan desa dalam kategori pusat pertumbuhan berdasarkan kondisi, potensi dan ketersediaan prasarana dan sarana yang dimiliki ?



2. Bagaimana tingkat kategori dan kebutuhan prasarana dan sarana DPP Desa Sabila berdasarkan kondisi dan potensi kawasan terpilih pusat pengembangan desa di kecamatan Mallawa Kabupaten Maros ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, tujuan diadakan penelitian ini adalah :

1. Menjelaskan Status Desa Sabila dalam kategori sebagai pusat pertumbuhan berdasarkan kondisi, potensi dan ketersediaan prasarana dan sarana yang dimilikinya.
2. Menjelaskan kategori dan kebutuhan prasarana dan sarana DPP Desa Sabila berdasarkan potensi dan kondisi kawasan terpilih pusat pengembangan desa di Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros.

D. Mamfaat Penelitian

Setelah selesainya Penelitian ini diharapkan adanya beberapa mamfaat yang dapat diberikan, antara lain ;Sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Maros dalam hal terpilihnya Desa Sabila sebagai pusat pertumbuhan, dari segi tingkat kesiapan maupun kebutuhan prasarana dan sarana.

1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Maros, sebagai sumber masukan dalam menetapkan sebagai desa/Desa sebagai pusat pertumbuhan dimasa mendatang, serta dalam penentuan strategi pengembangannya.
2. Untuk dapat memberikan bahan referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya untuk strategi pengembangan Desa Sabila.

E. Ruang Lingkup Pembahasan

Agar tidak terjadi kesalah pahaman didalam menafsirkan permasalahan yang telah diuraikan dalam latar belakang, maka penulis hanya membatasi ruang lingkup pembahasan ini hanya difokuskan untuk menilai faktor-faktor yang berdasarkan kriteria penentuan desa pusat pertumbuhan guna menemukenali status desa yang telah ditetapkan untuk segera dilakukan pengembangannya di wilayah Kabupaten Maros. Selain itu pembahasan difokuskan pada koneksitas antara lokasi pusat desa pertumbuhan dengan daerah hinterlandnya yang masuk dalam batas administrasi pemerintahan yang sama, yakni dalam wilayah Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros, dimana Desa Sabila merupakan prioritas dalam pengembangan pusat pertumbuhan.

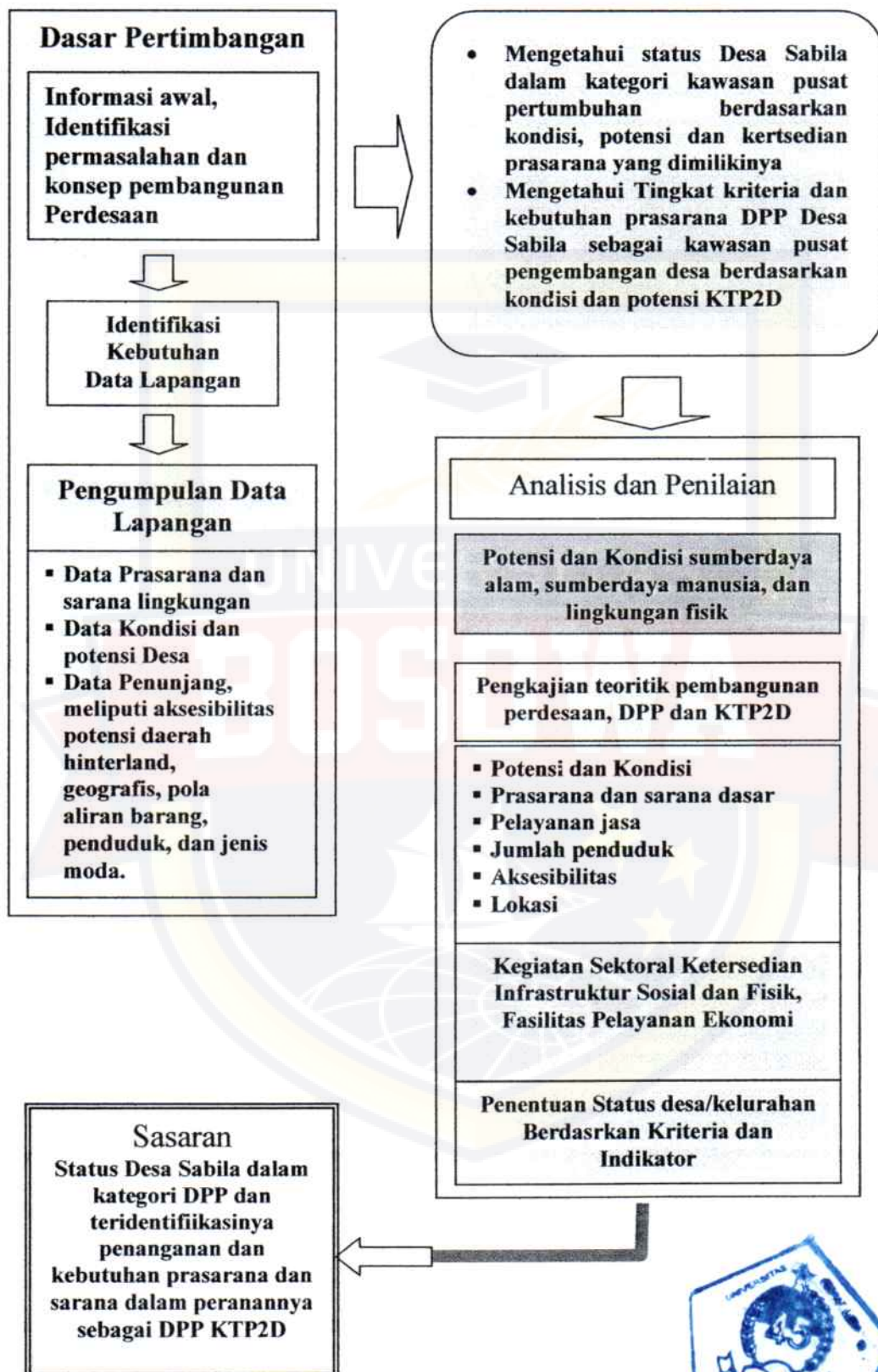


Penilaian kriteria DPP akan dilakukan dengan pendekatan metode pembobotan yang sumber analisisnya dilakukan perpaduan antara data primer (pengamatan langsung) dan penggunaan data sekunder yang berkaitan dengan penilaian kinerja pembedaan atau pemilihan DPP sebagai acuan yang dikeluarkan oleh Departemen Kinpraswil tahun 2002.

F. Kerangka Pikir Penelitian

Kerangka pikir merupakan alur pemikiran dalam penyusunan penulisan yang menggambarkan bagian-bagian yang memiliki hubungan saling terkait dengan yang lainnya sebagai satu kesatuan pembahasan. Adapun kerangka pikir penulisan ini adalah :





G. Sistematika

Dalam penelitian ini akan diambil langkah-langkah penulisan yang dapat diuraikan dalam sistematika pembahasan sebagai berikut :

- Bab I : Memberikan gambaran secara garis besar tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, mamfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.
- Bab II :Mengemukakan tentang pembangunan dan perencanaan pedesaan yang menjelaskan peran dan fungsi wilayah pedesaan, pembangunan perdesaan yang bersifat spasial serta peranan Desa Pusat Pertumbuhan dan Kawasan Terpilih Pusat Pengembangan Desa. Pembangunan Prasarana dan sarana dalam pemahaman tentang teori-teori Pusat Pertumbuhan / Pembangunan dan Simpul Jasa Distribusi.
- Bab III : Menguraikan tentang analisis DPP dan KTP2D Sabila, analisis Kriteria dan Kebutuhan DPP dalam KTP2D, analisis ekonomi wilayah dan analisis kependudukan serta introspek dan prospek Desa Sabila sebagai DPP.
- Bab IV : Menjelaskan tentang gambaran wilayah studi dengan pembahasan yang mencakup kriteria lokasi DPP KTP2D, Pertimbangan Pemilihan Lokasi DPP dalam KTP2D, Tinjauan Umum DPP KTP2D Kecamatan Mallawa yang meliputi Karakteristik fisik dasar, identifikasi aspek kependudukan, ruang kawasan, potensi sektor-sektor kegiatan ekonomi, prasarana dan sarana tranportasi, lembaga masyarakat dan partisipasi masyarakat serta menjelaskan tentang tijauan khusus desa Sabila, fungsi dan kedudukan Desa Sabila sebagai DPP dalam RUTRW kabupaten Maros dan RTURKkecamatan Mallawa. Serta menguraikan Analisis DPP KTP2D Sabila dan kriteria kebutuhan DPP dalam KTP2D.
- Bab V : Menyimpulkan hasil penelitian dan megemukakan saran-saran dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan.





BAB II
TINJAUAN PUSTAKA



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pembangunan dan Perencanaan Perdesaan

1. Peran dan Fungsi Wilayah Perdesaan

Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat, termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum, yang mempunyai organisasi langsung di bawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa ini memiliki beragam kondisi, karakteristik sosial, dan tingkat perkembangannya yang pada gilirannya akan mempengaruhi pembangunannya (UU No. 5 tahun 1979).

Wilayah perdesaan menurut Direktur Jenderal Pembangunan Masyarakat Desa dalam Jayadinata (1999) adalah wilayah yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Perbandingan tanah dengan manusia yang besar
- b. Lapangan kerja agraris
- c. Hubungan penduduk yang akrab
- d. Sifat yang menurut tradisi

Dalam rangka percepatan pembangunan daerah perdesaan, dalam buku *Tipologi dan Strategi Kebijakan Pembangunan Daerah Perdesaan* (2001) dijelaskan bahwa pembangunan perdesaan mempunyai peranan sangat penting dalam konteks pembangunan nasional karena mencakup bagian terbesar wilayah nasional. Pembangunan perdesaan diarahkan ; i. Untuk pembangunan desa yang berlangsung dengan memanfaatkan sumberdaya pembangunan yang dimiliki (SDA dan SDM); ii. Untuk meningkatkan keterkaitan pembangunan antar sektor (perdagangan, pertanian dan industri) antar desa, antar perdesaan dan perDesaan dan; iii. Untuk memperkuat pembangunan nasional secara menyeluruh. Produksi pertanian yang tersebar, pengumpulan dan pemasaran komoditas hasil

pertanian dilakukan ke pasar di pusat-pusat desa, yang selanjutnya dikirim ke pasar di ibukota kecamatan, kabupaten dan Desa-Desa besar lainnya.

Kedudukan wilayah perdesaan dalam konstelasi wilayah secara menyeluruh, khususnya terhadap wilayah perDesaan, daerah-daerah perdesaan mempunyai arti penting, yakni mensuplai bahan makanan yang dibutuhkan tenaga kerja di sektor industri, menyediakan berbagai bahan mentah untuk produksi industri, dan merupakan pasar lokal untuk barang-barang dan jasa-jasa yang dihasilkan industri Desa.

Sedangkan dalam buku yang dikeluarkan oleh Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah (2002), bahwa pendekatan pembangunan perdesaan meliputi beberapa hal, yakni :

- a. Pendekatan bina lingkungan, bina usaha dan bina manusia
- b. Pendekatan sektoral dan pendekatan multi sektoral
- c. Pembangunan pedesaan dilakukan secara terpadu dan erasi serta diarahkan agar pembangunan yang berlangsung di setiap daerah benar-benar sesuai dengan prioritas dan potensi daerah perdesaan yang bersangkutan.
- d. Pendekatan pemerataan pembangunan ke seluruh tanah air, perhatian khusus perlu diberikan kepada desa yang relatif tertinggal, desa terpencil, dan desa di daerah perbatasan
- e. Pendekatan spasial yang mendorong penentuan desa pusat pertumbuhan yang berfungsi sebagai lokomotif pembangunan suatu kawasan untuk menarik dan mendorong perkembangan desa-desa yang lebih kecil (desa hinterland)
- f. Pendekatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang dilakukan untuk menciptakan iklim yang mendorong tumbuhnya prakarsa dan swadaya masyarakat, kemampuan masyarakat untuk memproduksi, mampu menciptakan lapangan kerja serta peningkatan pendapatan dan taraf hidup.
- g. Pendekatan berwawasan lingkungan, yaitu perlu lebih meningkatkan kesadaran dan kemampuan penduduknya untuk memanfaatkan serta memelihara kelestarian lingkungan



- h. Pendekatan botom up dan top down planning
- i. Pendekatan people centered
- j. Pendekatan resource based

Selanjutnya menurut Jayadinata (1999), bahwa pembangunan di wilayah perdesaan bermaksud untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk wilayah perdesaan. Pembangunan pedesaan di wilayah pertanian bertekanan berat pada pembangunan pertanian.

Ibrahim dalam Jayadinata (1999) menjelaskan bahwa dalam pembangunan wilayah perdesaan pada hakekatnya mengikuti asa pembangunan masyarakat desa (community development). Dalam pembangunan masyarakat desa tersebut terdapat dua unsur, yaitu pembinaan prakarsa penduduk untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, dan bantuan dari pemerintah untuk lebih merangsang prakarsa tersebut.

Masyarakat perdesaan itu sendiri menurut Jayadinata (1999) umumnya kurang materialistis dan kurang agresif dalam mencapai tujuannya, kurang lincah (mobile) serta lebih mementingkan hubungan pribadi. Sebagian besar waktu masyarakat perdesaan digunakan dalam keluarga, sehingga masyarakat perdesaan lebih kuat ikatan kekeluarganya dibandingkan masyarakat perDesaan.

Berkaitan hal tersebut, ada 5 (lima) prinsip sosial dalam pembangunan masyarakat pedesaan sebagai dasar pengentasan kemiskinan, yaitu :

- a. Pemilikan alat produksi tanah ;
Perencanaan yang lebih adil adalah pekerja lokal merupakan pemilik alat produksi, dapat juga pekerja lokal atau koperasi sebagai pemilik.
- b. Sifat dari pengembangan ekonomi ;
Kegiatan ekonomi yang direncanakan di perdesaan harus "nonexploitive" dan paling sedikit pada permulaan, harus disubsidi oleh pemerintah dari perpajakan
- c. Kebudayaan wilayah dan jaringan sosial ;



Dapat dilakukan desentralisasi ekonomi dengan memencarkan industri ke pedesaan untuk mempertahankan budaya wilayah dan pedesaan

d. Pembinaan keputusan dalam proses perencanaan

Dapat dilakukan pengendalian untuk pembentukan rencana dan pelaksanaan kebijaksanaan perencanaan oleh pemerintah dengan mengikutsertakan penduduk yang dipengaruhi oleh kebijaksanaan tersebut.

Selanjutnya dikatakan bahwa pembangunan masyarakat pedesaan pada prinsipnya merupakan bagian dari perencanaan pedesaan itu sendiri yang mempunyai dasar usaha untuk memajukan penduduk dalam kehidupan sosial ekonomi. Perencanaan dan pelaksanaan proyek pembangunan dapat dilakukan dalam rencana wilayah terpadu atau dalam rencana kawasan terpadu. Hal ini sangatlah mendasar, dimana penduduk desa mempunyai kebutuhan dan keinginan dalam kehidupannya sebagaimana penduduk yang bermukim pada daerah pedesaan yang lebih maju.

Hal tersebut sangat sesuai dengan tujuan pembangunan wilayah, sebagaimana dalam buku *Tipologi dan Strategi Kebijakan Pembangunan Daerah Pedesaan* (2001), bahwa tujuannya untuk meniadakan ketimpangan antar daerah, antar daerah yang maju dengan daerah kurang maju, antara daerah pedesaan dengan pedesaan, dan selanjutnya menciptakan keseimbangan yang kenyal antar daerah. Ketimpangan yang tinggi akan menciptakan kerawanan ekonomi, sosial dan politik yang menimbulkan dampak negatif.

Dalam pengembangannya berdasarkan tipologi desa, secara garis besarnya dapat dibedakan beberapa tipologi, yaitu :

- a. Tipologi berdasarkan aspek topografinya, yang dibagi menjadi : 1). Desa daerah pegunungan, 2). Desa dataran tinggi, dan 3). Desa dataran rendah, serta 4). Desa pantai (pesisir)
- b. Tipologi desa didasarkan pada sektor unggulan, seperti : 1) Desa agraris, 2). Desa agro bisnis, 3). Desa pariwisata dan 4) . Desa non pertanian

- c. Tipologi berdasarkan keswadayaan, meliputi 1) Desa swadaya, 2) Desa swakarya, dan 3). Desa swasembada.
- d. Tipologi berdasarkan jumlah penduduk, yaitu desa maju, 2) desa kurang maju, 3). Desa berpenduduk padat, dan 4). Desa terisolasi atau Desa perbatasan
- e. Tipologi berdasarkan keterkaitan antara potensipertumbuhan (growth potential) dan keterkaitan prasarana dan sarana pembangunan peresaan.

Dalam materi ini dijelaskan tentang peran dan fungsi wilayah perdesaan dengan ciri-ciri tata kehidupan yang agraris dan bersifat tradisional. Wilayah perdesaan merupakan basis pembangunan nasional yang perlu mendapatkan perhatian sesuai dengan kondisi dan potensi yang dimilikinya. Hal inilah yang kemudian melahirkan beberapa kriteria wilayah perdesaan berdasarkan typologi, sehingga dalam pelaksanaan pembangunan dapat disesuaikan dengan typologi desa tersebut.

2. Pembangunan Perdesaan Bersifat Spasial

Pada loka karya nasional tahun 2001 mengenai pembentukan DPP dan KTP2D, dan agropolitan sebagai konsep pembangunan spasial, dijelaskan secara lengkap bahwa daerah perdesaan merupakan tata ruang yang sangat luas yang di dalamnya terdapat tempat-tempat permukiman yang tersebar dimana sebagian besar penduduknya mempunyai mata pencaharian utama pertanian. Berbagai lokasi kegiatan sektoral dan permukiman ditentukan pada tempat yang tepat agar memberikan hasil dan manfaat yang tersebar, misalnya kegiatan tanaman pangan dipengaruhi oleh faktor topografis, iklim, kapasitas, dan kesesuaian lahan.

Di daerah perdesaan tersebut, penduduknya masih relative kurang dan tersebar tidak merata. Jika pembangunan dilakukan secara tersebar maka hasilnya tidak akan efisien. Agar supaya dapat memberikan kehematan maka berbagai kegiatan akan memilih lokasi pada suatu pusat yang mempunyai daya tarik yang tinggi dan memberikan kehematan aglomerasi atau lokalisional. Pertumbuhan daerah perdesaan secara spasial adalah menganalisis dimana pertumbuhan terjadi dalam suatu lingkungan



spasial yang menggunakan daerah perdesaan sebagai unit perencanaan paling bawah.

Pertumbuhan perdesaan dapat diartikan sebagai suatu peningkatan kemakmuran suatu daerah perdesaan yang mencerminkan sebagai peningkatan suatu keluaran (output) daerah perdesaan. Peningkatan ini meliputi baik kapasitas produksi ataupun volume riil produksi.

Materi pembangunan perdesaan bersifat spasial memperlihatkan kedudukan wilayah perdesaan sebagai satu kesatuan wilayah dan memiliki cakupan yang sangat luas dan memiliki tingkat kegiatan hanya pada satu aspek sesuai dengan kondisi dan potensi yang dimilikinya. Struktur ruang pada wilayah ini umumnya berpecah sehingga dapat menyebabkan ketidak efektifan pelaksanaan pembangunan dalam rangka peningkatan dan pengembangan wilayah perdesaan itu sendiri.

3. Peranan Desa Pusat Pertumbuhan dan Kawasan Terpilih Pusat Pengembangan Desa

Departemen Pekerjaan Umum pembangunan perdesaan menggunakan pendekatan spasial untuk mendukung ketahanan pangan, pengentasan kemiskinan, pembangunan sarana dan prasarana perdesaan, pengelolaan sumberdaya alam, pemberdayaan masyarakat dan pengembangan ekonomi perdesaan. Desa sebagai unit administrasi pemerintah, ekonomi dan sosial yang terkecil telah diberikan perhatian dan peran yang sangat penting untuk dilakukan perkuatan sehingga dapat menjadi desa yang mandiri seperti halnya dalam konsep pengembangan wilayah. Karena itu, pembangunan perdesaan harus memiliki tiga unsur fundamental, yaitu adanya pusat, wilayah pengaruh, dan jaringan transportasi.

Pusat pengembangan diharapkan akan meneteskan dampak pembangunan dan hasil-hasil pembangunan ke daerah sekitarnya, dengan demikian kegiatan pembangunan akan tersebar ke seluruh pelosok daerah. Oleh karena itu strategi pusat pertumbuhan dapat pula diterapkan dalam konteks dan lingkungan pembangunan perdesaan. Desa yang memiliki potensi dan kemampuan pertumbuhan akan diberikan fungsi sebagai pusat



pertumbuhan (DPP), desa-desa yang masuk dalam pengaruhnya disebut desa hinterland (DH).

Jangkauan pelayanan pembangunan dari DPP ke DH dalam suatu wilayah pengaruhnya disebut sebagai kawasan terpilih pusat pengembangan desa, karena jumlah desa yang difungsikan sebagai DPP terbatas atau terpilih maka kawasan pusat pertumbuhan desanya adalah terbatas atau terpilih. Oleh karena itu sebutannya menjadi Kawasan Terpilih Pusat Pertumbuhan Desa (KTP2D).

Sedangkan dalam buku Mengembangkan Konsep Desa Pusat Pertumbuhan (DPP) dan Kawasan Terpilih Pusat Pengembangan Desa (KTP2D) yang dibuat oleh Nippon Koei Co, L.td. tahun 2001, dijelaskan bahwa diantara pusat-pusat daerah perdesaan umumnya relatif kecil terdapat beberapa pusat desa yang mempunyai peranan yang menonjol, memiliki infrastruktur fisik, ekonomi, dan sosial serta berbagai kegiatan produksi, perdagangan, dan transportasi yang relatif tersedia dibandingkan dengan pusat-pusat desa lainnya. Konsep pengembangan DPP adalah sejalan dengan konsep pengembangan pusat pertumbuhan dan konfigurasi (susunan) pusat-pusat berdasarkan hirarki dan orientasi pemasaran secara geografis.

Untuk lebih mempercepat proses pembangunan dalam rangka peningkatan dan pengembangan wilayah perdesaan diperlukan suatu pendekatan pembangunan, dimana pembangunan tersebut dilakukan secara konsentris sehingga dapat memberikan peluang dan akselerasi pembangunan dengan desa-desa hinterlandnya.

B. Pembangunan Prasarana dan Sarana

1. Konsep Prasarana dan Sarana

Dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1992, dijelaskan bahwa :

- a. Prasarana adalah sistem bangunan yang diperlukan terlebih dahulu agar sistem transportasi, teknik penyehatan, pengairan, telekomunikasi dan sebagainya dapat berfungsi. Bangunan-bangunan yang diperlukan sebelum kegiatan pokok masyarakat dan pemerintah dapat berjalan. Bangunan yang diperlukan untuk memberikan pelayanan dan jasanya

bagi kebutuhan dasar penduduk, terdiri atas prasarana transportasi (jalan, jembatan, pelabuhan, bandaran dll), prasarana kesehatan (jaringan pola air bersih, jaringan drainase, jaringan pengumpulan dan pembuangan sampah) dan prasarana energi dan komunikasi (jaringan kawat transmisi dan membagi jaringan kawat telepon)

- b. Prasarana lingkungan adalah fasilitas yang berfungsi untuk menyelenggarakan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial dan budaya, seperti pasar, gedung pertemuan, dan pusat kesehatan masyarakat sebagai bagian dari sarana lingkungan
- c. Sarana lingkungan adalah fasilitas lingkungan yang berfungsi menyelenggarakan dan mengembangkan kehidupan ekonomi, sosial dan budaya.

Menurut Budiharjo E (1987), bahwa pembangunan fasilitas dan pelayanan sosial serta prasarana lingkungan di Indonesia pada umumnya kurang mendapat perhatian. Dalam jangka pendek pengaruhnya tidak terlalu dirasakan tetapi dalam jangka panjang akan menimbulkan dampak negatif secara menyeluruh.

Kebutuhan prasarana yang dirasakan orang untuk sebagian besar menurut Stein JM (1996 ; 320) adalah soal pilihan. Tidak ada standar yang berlaku umum untuk menentukan beberapa besarnya "daya tampung", fasilitas dengan tingkat modal berapa yang tepat untuk sesuatu populasi. Karena tidak adanya standar untuk bisa mengukur kondisi sebagian besar dari prasarana dan terbatasnya data-data yang tersedia, maka yang perlu dilakukan adalah penentuan prioritas. Hal ini disebabkan pada kesempatan yang bersamaan tidak selalu tersedia dana/anggaran pembiayaan pembangunan. Karena itu, perencanaan prasarana harus mempunyai kerangka kerja yang mencakup beberapa tahun dan harus merupakan proses berkesinambungan.

Prasarana atau infrastruktur itu sendiri menurut Jayadinata JT (1999) adalah alat (mungkin tempat) yang paling utama dalam kegiatan sosial dan kegiatan ekonomi. Pembangunan tidak dapat berjalan dengan lancar jika prasarana tidak baik. Pembangunan jangka pendek, kebijakan mengenai



prasarana merupakan kebijakan pembiayaan. Jadi prasarana dapat dianggap sebagai faktor potensial dalam menentukan masa depan dari suatu perkembangan yang diharapkan. Disamping itu, prasarana juga dapat dianggap sebagai modal yang merupakan dasar bagi semua kegiatan sosial-ekonomi lainnya. Ada 3 hal pokok dalam penyediaan prasarana, yaitu :

a. Pembiayaan untuk prasarana :

Prasarana yang diperlukan di wilayah tertentu harus dibuat, dan jika telah selesai dan berfungsi harus terus menerus dipelihara. Yang menanggung pembiayaan pembuatan dan pemeliharaan prasarana dapat perseorangan atau keluarga, kelompok masyarakat, badan hukum, pemerintah.

b. Pembuatan dan pemeliharaan prasarana

Yang bertugas membuat dan memelihara prasarana dapat perorangan, masyarakat setempat, badan hukum, pemerintah.

c. Cara pembuatan prasarana

Cara pembuatan prasarana dapat dilakukan berbagai cara, bergantung kepada keperluannya, kemampuan tenaga serta biaya, dan sebagainya.

2. Kebutuhan Prasarana dan Sarana

Menurut Jayadinata JT (1999) mengklasifikasikan komponen-komponen prasarana dan sarana lingkungan, yaitu :

- a. Fisik, meliputi geografi, geologi, topografi, morfologi, klimatologi, dan jalan
- b. Sosial, meliputi penduduk, pendidikan, peribadatan, kesenian, kesehatan, olah raga, rekreasi, dan pelayanan umum.
- c. Ekonomi, meliputi tenaga kerja, kegiatan usaha, perdagangan, jasa, industri dan pariwisata
- d. Utilitas, meliputi air bersih, listrik, gas, telekomunikasi, drainase, sanitasi dan sampah.

Karena banyaknya lingkup mengenai prasarana dan sarana lingkungan, maka dalam pelaksanaan pembangunan yang lebih terencana dan terarah, Departemen Permukiman dan Pengembangan Wilayah tahun 2000 menetapkan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Permukiman dan Pengembangan Wilayah, meliputi :



A. Prasarana Lingkungan

a. Jaringan jalan

- 1) Jalan utama atau jalan akses, yaitu jalan yang menghubungkan antar wilayah, seperti jalan yang dihubungkan dengan jalan arteri atau sekunder, jalan antar kecamatan.
- 2) Jalan lingkungan, yaitu jalan yang menghubungkan dari suatu lokasi ke lokasi lainnya atau dari kelompok rumah ke fasilitas lingkungan atau menuju tempat sarana bekerja. SPM untuk KTP2D adalah panjang jalan yang disyaratkan 40-60 m/ha dengan lebar perkerasan 2-5 m.
- 3) Jalan setapak, yaitu jalan yang menghubungkan antar rumah di dalam kelompok lingkungan perumahan. Standar peruntukan untuk KTP2D adalah panjang jalan 50-110 m/ha dengan lebar perkerasan 0,8 - 2 m.

b. Saluran Air Hujan merupakan saluran pembuangan air limpasan dan air kotor atau limbah, baik berasal dari permukaan, rumah tangga, dan fasilitas lingkungan lainnya untuk mencegah terjadinya genangan atau banjir. Saluran ini dapat tertutup atau terbuka dan memiliki kemiringan yang sesuai. Standar untuk KTP2D adalah panjang saluran 120 – 2,5 m/ha.

c. Air Bersih adalah air yang layak untuk dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari yang terbebas dari unsur kimia dan fisik. Standar kebutuhan untuk KTP2D adalah 30 - 50 liter/orang/hari dengan sistem perpipaan atau non perpipaan.

d. Prasarana pembuangan sampah penempatan dan pengelolaannya disesuaikan kondisi lingkungan Standar kebutuhan untuk KTP2D adalah

- o Gerobak sampah : 1 unit/2 m³ atau 2 Ha/120 KK
- o Fasilitas penambangan bak sampah 5 m³/2 Ha
- o Jarak dari tempat tinggal minimum 50 - 100 m
- o Pengangkutan sampah diangkat 2 kali seminggu

e. Sanitasi untuk KTP2D adalah 3 s/d 4 unit/kampung (12 KK)

- f. Jaringan listrik dan telepon seharusnya dapat menjangkau seluruh areal permukiman. Untuk listrik disesuaikan dengan tingkat kebutuhan masyarakat dengan minimal daya 450 kw per rumah.

B. Sarana Lingkungan

a. Fasilitas Perumahan

Dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 1992 dijelaskan bahwa rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga. Sedangkan perumahan itu sendiri dijelaskan bahwa suatu kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan.

b. Fasilitas Pendidikan

† Taman Kanak-Kanak (TK)

Untuk sebuah STK dapat diadakan jika memiliki jumlah penduduk pendukung 1.000 jiwa dengan luas lahan peruntukan 1.200 m², radius pencapaian 500 meter dan letaknya ditengah-tengah kelompok keluarga.

† Sekolah Dasar (SD)

Jumlah penduduk pendukung untuk sebuah SD adalah 2.700 jiwa dengan luas lahan peruntukan 1.600 m², radius pencapaian 1.000 meter dan letaknya ditengah-tengah kelompok keluarga.

† Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama

Jumlah penduduk pendukung untuk sebuah SLTP adalah 4.800 jiwa dengan luas lahan peruntukan 2.700 m², radius pencapaian 1.000 meter dan dapat dikelompokkan dengan taman dan lapangan olah raga.

† Sekolah Menengah Umum

Jumlah penduduk pendukung untuk sebuah SLTA adalah 4.800 jiwa dengan luas lahan peruntukan 2.700 m², radius pencapaian 1.000 meter dan dapat dikelompokkan dengan taman dan lapangan olah raga.



c. Fasilitas Kesehatan

† Puskesmas Pembantu

Jumlah penduduk pendukung untuk sebuah puskesmas pembantu adalah 6.000 jiwa dengan luas lahan peruntukan 500 m², radius pencapaian 1.500 meter dan letaknya di tengah lingkungan permukiman.

† Balai Pengobatan

Jumlah penduduk pendukung untuk sebuah balai pengobatan adalah 3.000 jiwa dengan luas lahan peruntukan 300 m², radius pencapaian 1.000 meter dan letaknya di tengah lingkungan permukiman.

† Tempat Praktek Dokter

Jumlah penduduk pendukung untuk sebuah tempat praktek dokter adalah 5.000 jiwa dengan luas lahan peruntukan 600 m², radius pencapaian disesuaikan dengan kelompok aktivitas.

† Apotik

Jumlah penduduk pendukung untuk sebuah apotik adalah 10.000 jiwa dengan luas lahan peruntukan 350 m², radius pencapaian disesuaikan dengan kelompok aktivitas.

d. Fasilitas Perdagangan

† Pasar Umum

Pengadaan suatu pasar ditentukan oleh kedudukan suatu lokasi, seperti pusat desa, pusat kecamatan, dan kabupaten.

† Pertokoan

Jumlah penduduk pendukung untuk sebuah pertokoan adalah 2.500 jiwa dengan luas lahan peruntukan 1.250 m², radius pencapaian 1.000 meter.

† Warung / Kios

Jumlah penduduk pendukung untuk sebuah warung/kios adalah 250 jiwa dengan luas lahan peruntukan 100 m², radius pencapaian berada ditengah lingkungan permukiman.

e. Peribadatan

† Untuk > 40 KK orang Islam diperlukan sebuah Masjid

- † Untuk > 15 KK orang khatolik/Kristen diperlukan sebuah Gereja.
- f. Tempat Bermain/Olahraga
 - † Untuk penduduk sebanyak 250 jiwa (setingkat RT) diperlukan ruang terbuka untuk bermain/taman
 - † Untuk penduduk sebanyak 2.500 jiwa (setingkat RW) diperlukan lapangan olahraga seperti lapangan sepak bola yang lokasinya disatukan dengan fasilitas lingkungan lainnya.
- g. Fasilitas sosial dan fasilitas umum lainnya untuk KTP2D adalah :
 - † Balai Karya : 1 unit
 - † Balai Kerja : 1 unit
 - † Ruang Terbuka : 1 unit

Berdasarkan materi tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa keberadaan suatu prasarana dan sarana lingkungan pada suatu lokasi sangat ditentukan oleh aspek kependudukan, dimana penduduk merupakan barometer dalam pembangunan disegala bidang. Sedangkan prasarana dan sarana itu sendiri berfungsi sebagai penunjang dan pendukung dari suatu kegiatan yang berlangsung pada suatu lokasi.

C. Teori-Teori Pusat Pertumbuhan/Pembangunan dan Simpul Jasa Distribusi

Dalam buku yang ditulis oleh Adisasmita (2001) dijelaskan dan diuraikan beberapa teori-teori menyangkut pusat pertumbuhan dan simpul jasa distribusi, yaitu :

1. Teori Tempat Sentral (Central Place Theory)

Teori tempat sentral diformulasikan oleh Walter Cristaller, dijelaskan bahwa analisis tata ruang yang menekankan pada identifikasi sistem wilayah baik secara fisik ataupun ekonomi yang memiliki pola distribusi kegiatan produksi dan pemasaran serta susunan daerah perDesaan secara hirarkis.

Teori ini sangat relevan bagi perencanaan Desa dan wilayah, karena sistem hirarki merupakan sarana yang efektif untuk

perencanaan wilayah. Tempat sentral besar seringkali merupakan titik pertumbuhan inti di wilayahnya dan menentukan tingkat perkembangan ekonomi keseluruhan wilayah.

2. Teori Kutub Pertumbuhan/Pusat Pembangunan

Teori kutub pertumbuhan (growth pole theory) diintroduksikan oleh Francois Perroux Tahun 1956, menurutnya bahwa pertumbuhan atau pembangunan tidak dilakukan di seluruh tata ruang, tetapi terbatas pada berbagai tempat atau lokasi tertentu. Tata ruang diidentifikasi sebagai kutub-kutub atau pusat-pusat. Setiap kutub mempunyai kekuatan pancaran pengembangan ke luar dan kekautan tarikan ke dalam.

Teori kutub pertumbuhan merupakan konsep sangat menarik bagi perencanaan wilayah. Persoalan utama yang dihadapi dalam penerapan konsep tersebut adalah pemilihan lokasi pendorong ataupun lokasi kunci atau menonjol sebagai penggerak dinamika pertumbuhan.

3. Konsep Hirschman dan Myrdal

Albert Hirschman (1958) menekankan antara pusat dan daerah belakang terdapat ketergantungan dalam suplai barang dan tenaga kerja. Jika komplementaritasnya kuat akan terjadi proses penyebaran pembangunan ke daerah belakang (trackkling down effect) dan sebaliknya jika komplementaritasnya lemah akan terjadi pengaruh polaritas (polarization effect).

4. Teori Simpul Jasa Distribusi

Teori ini dipopulerkan oleh Christaller dkk menekankan pada pentingnya peranan pusat yang selanjutnya diidentifikasi sebagai "simpul jasa distribusi". Jasa distribusi mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia dan pembangunan secara fisik.

Interaksi antara simpul besar dengan simpul-simpul kecil dan daerah belakang lainnya yang berada dalam wilayah pengaruhnya



merupakan unsur yang penting dalam konsepnya. Tingkat interaksinya ditunjukkan dari tingkat kepadatan arus barang.

Ada dua faktor penting yang harus diperhatikan dalam pemahaman peranan simpul yaitu mengenai fungsi simpul dan hirarki simpul dalam sistem spasial. Fungsi primer suatu simpul adalah sebagai pusat pelayanan jasa distribusi bagi wilayah pengembangannya, sedangkan fungsi sekundernya adalah memenuhi kehidupan masyarakat di simpul yang bersangkutan.

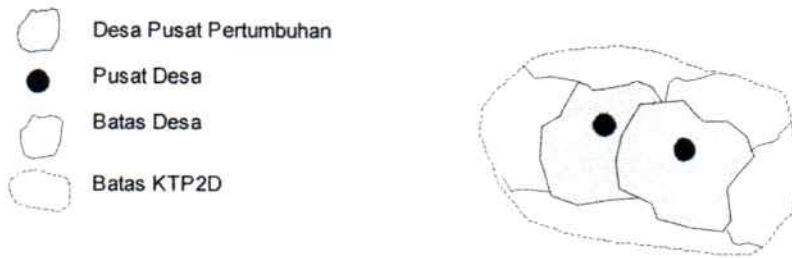
Materi ini memberikan gambaran tentang beberapa teori yang berkaitan dengan pusat pertumbuhan sebagai suatu metode yang dapat memberikan suatu pengaruh terhadap daerah-daerah disekitarnya. Disamping itu, pelaksanaan pembangunan yang akan direncanakan atau dilaksanakan dapat dilakukan secara efektif, dimana skala jangkauan pergerakan dapat lebih mudah dan cepat. Oleh karena itu, proses pertukaran barang dan jasa dapat terlaksana dengan cepat.

5. Alternatif Susunan Desa Pusat Pertumbuhan (DPP) calon Desa Hinterland (DH-DH) Dalam Kawasan Terpilih Pusat Pengembangan Desa (KTP2D)

Dalam penjelasan program KTP2D, seri 1 yang dikeluarkan oleh Departemen Permukiman dan Prsarana Wilayah (2002), bahwa beberapa alternatif susunan DPP dan DH dalam KTP2D yang dapat dilakukan sesuai dengan kondisi wilayah, yaitu :

- a. Keterkaitan DPP dengan DH (misalnya dalam jarak sekitar 5 km) yang membentuk suatu kawasan pelayanan yang selanjutnya disebut sebagai KTP2D. Susunan desa-desa (DPP dan DH) tersebut dalam suatu lingkup KTP2D mencerminkan suatu konfigurasi desa-desa (susunan desa-desa) yang efektif, seperti diperlihatkan dalam gambar berikut :





Gambar 1. Alternatif I Pembentukan DPP

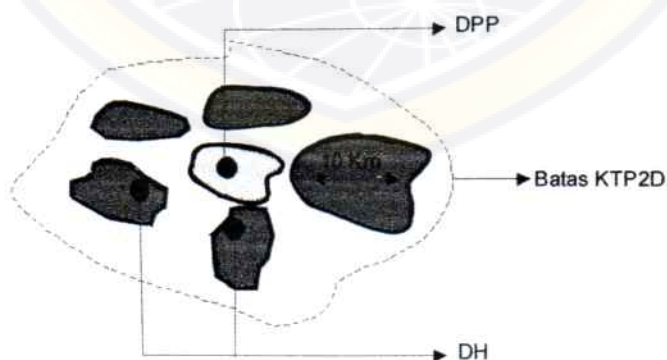
Kondisi seperti ini biasanya terdapat pada kawasan yang desanya tidak terlalu luas.

- b. Terdiri hanya satu desa dengan pusat desa sebagai pusat kegiatan (center of activity). Kondisi ini biasanya terjadi pada desa yang cukup luas dengan radius sekitar 10 km (dari batas desa sampai ke pusat desa)



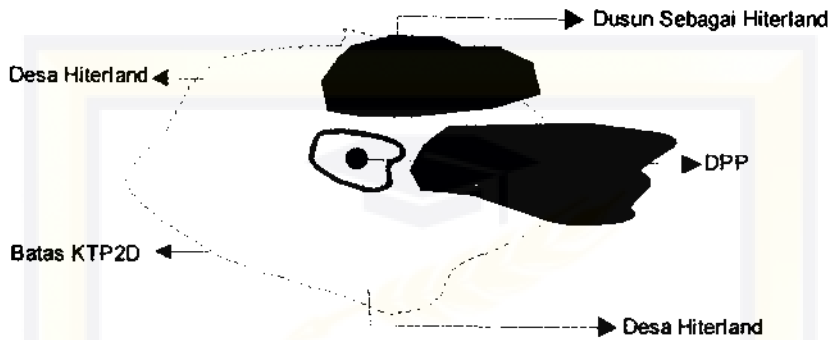
Gambar 2. Alternatif II Pembentukan DPP

- c. Terdiri atas satu DPP dengan beberapa desa hinterland disekitarnya. Kondisi ini biasanya terjadi pada kawasan yang luasan masing-masing desa relatif kecil



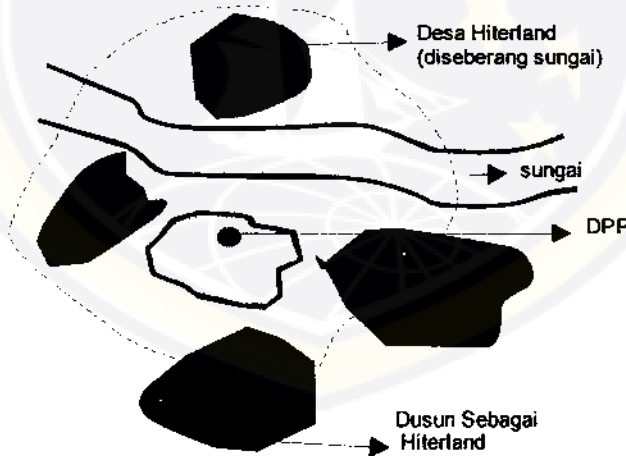
Gambar 3. Alternatif III Pembentukan DPP

- d. Terdiri atas satu DPP dengan hinterland berupa desa bagian dari desa (dusun). Penentuan hinterland berupa dusun didasarkan atas jarak pencapaian/radius keterkaitan serta ketergantungan dusun-dusun tersebut pada DPP bersangkutan di bidang ekonomi dan pelayanan lainnya.



Gambar 4. Alternatif IV Pembentukan DPP

- e. KTP2D yang antara desa hinterland dengan desa pusat dibatasi oleh sungai. Hal tersebut dimungkinkan apabila pencapaian antara desa pusat dengan hinterlandnya relatif mudah; disamping itu keduanya punya ikatan keterkaitan baik di bidang ekonomi maupun pemerintahan.

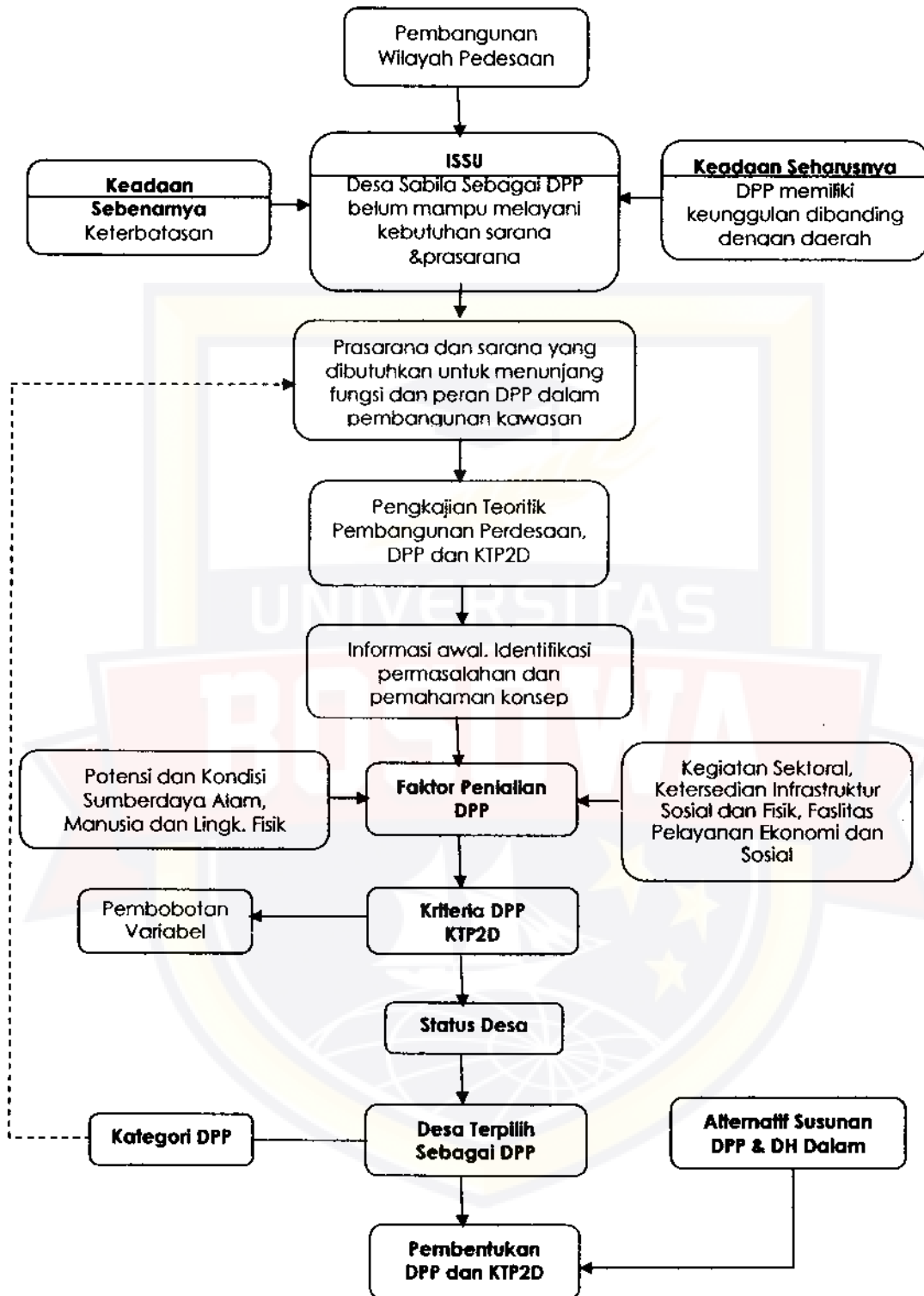


Gambar 5. Alternatif IV Pembentukan DPP

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah merupakan alur pemikiran dalam penyusunan penulisan yang menggambarkan bagian-bagian yang memiliki hubungan yang saling terkait satu sama lainnya sebagai satu kesatuan pembahasan. Adapun kerangka konseptual penulisan ini dapat dilihat sebagai berikut :





UNIVERSITAS
BAB III
METODE PENELITIAN



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan studi adalah suatu prosedur yang mencakup berbagai pikiran, pola kerja dan tata laksana/teknis-teknis serta merupakan kegiatan penyelidikan yang dilakukan menurut metode ilmiah yang sistematis untuk menemukan informasi ilmiah. Adapun cakupan metode penelitian ini adalah :

A. Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian terapan. Metode yang digunakan adalah metode analisis yang bersifat deskriptif menggunakan penilaian kriteria potensi wilayah berdasarkan analisis pembobotan, perhitungan yang dikeluarkan oleh Departemen Kimraswil tentang Kriteria Penentuan DPP.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Pendekatan multisektoral dan komprehensif, yang memperhatikan berbagai aspek dan kondisi ekonomi sosial serta membahas keterkaitan suatu sumberdaya dengan sumberdaya pembangunan lainnya, sehingga diperoleh gambaran yang luas dan realistis.
2. Pendekatan spasial, yaitu mengamati berlangsungnya kegiatan pembangunan pada tata ruangnya yang memiliki kondisi yang berbeda-beda satu sama lainnya. Hal ini akan dilakukan pengamatan secara langsung dilapangan.
3. Pendekatan berbasis pada sumberdaya manusia (people centred development) dan sumberdaya sector primer (resources based development). Sumberdaya manusia (SDM) dan sumberdaya alam (SDA) merupakan sumberdaya pembangunan yang sangat strategis peranannya.

4. Pendekatan pembangunan prasarana dan sarana dasar (PSD), meliputi jalan, irigasi, drainase, perumahan dan permukiman, serta fasilitas pelayanan ekonomi dan sosial sebagai sector strategis yang mampu memacu laju pertumbuhan dan mendorong pembangunan desa-desa yang bersangkutan

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Sabila Kecamatan Mallawa. Dipilihnya lokasi penelitian ini karena merupakan desa yang sudah ditetapkan sebagai pelaksanaan proyek pengembangan KTP2D di Kabupaten Maros, meskipun terdapat desa lainnya yang dianggap lebih siap dan memenuhi syarat pengembangan DPP.

Waktu penelitian dilakukan didasarkan pada tingkat kebutuhan data dan administrasi kegiatan penelitian. Penelitian ini dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan dimulai pada bulan Maret 2007 sampai bulan Mei 2007. Penetapan waktu ini tidak memiliki hubungan dengan adanya kemungkinan permasalahan atau kendala dalam pengambilan data dan penyusunan laporan hasil penelitian. Dalam jangka waktu tersebut dilakukan konsultasi terjadwal dengan pihak komisi pembimbing dan secara berturut-turut dilakukan penyusunan proposal penelitian, pengambilan data, penyusunan data dan pembuatan laporan hasil penelitian, seminar dan ujian.

C. Jenis Data

Jenis data yang dibutuhkan adalah :

1. Data Primer

Data primer yaitu suatu metode pengumpulan data yang dapat diperoleh melalui pengamatan langsung di lokasi penelitian. Hal ini dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi dan ketersediaan prasarana dan sarana lokasi, disamping beberapa faktor yang dapat dijadikan sebagai sumber informasi yang dapat dianalisis. Hal ini dilakukan untuk memaksimalkan tingkat kebenaran data dan informasi. Adapun jenis data primer dan sumbernya yang diperlukan adalah :

- a. Data prasarana dan sarana; data ini diperoleh melalui pengamatan langsung dan informasi dari berbagai pihak pada lokasi penelitian



- b. Data kondisi dan potensi desa; data ini dapat diperoleh melalui pengamatan langsung dan informasi dari berbagai pihak pada lokasi penelitian.
- c. Data penunjang lainnya, seperti data aksesibilitas, potensi daerah hinterland, geografis, pola aliran barang dan penduduk, jumlah dan jenis moda yang digunakan, foto (gambar kondisi), dan sebagainya; data ini dapat diperoleh melalui pengamatan langsung pada lokasi penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu dengan menggunakan studi kepustakaan yang relevan atau berkaitan dengan rumusan permasalahan dan mengambil data-data yang dapat diperoleh dari berbagai sumber, baik melalui cara instansional ataupun melalui cara pengumpulan dokumen-dokumen yang dapat mendukung daripada penelitian ini, seperti :

- a. Data jumlah dan jenis prasarana dan sarana, meliputi jaringan jalan, jaringan pipa air bersih, persampahan, jaringan listrik, telepon irigasi dan drainase. Data ini dapat diperoleh pada Dinas PU Bina Marga dan pengairan Kabupaten, BPS, kantor kecamatan, dan kantor desa.
- b. Data Kependudukan; data ini dapat diperoleh melalui kantor BPS kabupaten dan kantor kecamatan.
- c. Data potensi wilayah; data ini dapat diperoleh di kantor BPS kabupaten, kantor kecamatan dan instansi-instansi terkait lainnya.
- d. Data kebijakan pengembangan wilayah; data ini dapat diperoleh dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten maupun dari sumber lainnya yang bersumber dari pemerintah kabupaten.
- e. Data-data penunjang lainnya, seperti kepemilikan lahan, penggunaan lahan, kelembagaan masyarakat desa, status desa, dan sebagainya, yang kesemuanya dapat diperoleh melalui data instansioner.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan, meliputi kegiatan sebagai berikut :



1. Tahap Persiapan

Pokok-pokok pekerjaan persiapan dalam penyusunan identifikasi kawasan terpilih pusat pengembangan desa (KTP2D) sebagai berikut :

- a. Persiapan dasar meliputi; pengkajian data dan literatur yang terkait dengan rumusan permasalahan studi penelitian mengenai keadaan lokasi kawasan pedesaan yang diidentifikasi.
 - b. Persiapan teknis survey, antara lain; penyiapan peta dasar, daftar data, dan persiapan peralatan lainnya yang diperlukan.
- ## 2. Survey dan Pendataan

Survey lapangan dan pendataan dilakukan untuk mendapatkan gambaran secara langsung tentang kondisi dan potensi masing-masing obyek penelitian, baik berupa data primer maupun sekunder. Adapun hal-hal yang dilakukan dalam survey dan pendataan adalah sebagai berikut :

- a. Pendataan meliputi kegiatan; pengumpulan data dan peta, keadaan kawasan pedesaan secara umum serta potensi yang dimiliki kaitannya dengan pembangunan desa pusat pertumbuhan.
- b. Survey lapangan meliputi; pengecekan keadaan lapangan yang selanjutnya dituangkan ke dalam peta. Untuk lingkup wilayah secara makro, data yang perlu dipetakan adalah letak instalasi vital, pusat-pusat kawasan perumahan dan permukiman, kondisi fasilitas yang ada, infrastruktur serta pengecekan program proyek yang sudah dan sedang berjalan yang dipandang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan kawasan pedesaan.
- c. Survey obyek khusus; yaitu melakukan pengamatan secara langsung obyek yang dimaksud, seperti industri, obyek wisata, tempat aktifitas ekonomi dan sebagainya sesuai dengan potensi yang dimiliki lokasi studi.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dilakukan untuk mengidentifikasi desa-desa yang terpilih sebagai desa pusat pertumbuhan dan menentukan pengaruhnya dengan menggunakan kriteria dan indikator terukur, dan



melakukan analisis teoritik mengenai peranan dan fungsi desa pusat pertumbuhan.

1. Penentuan Kawasan Terpilih Pusat Pengembangan desa (KTP2D)

Dalam analisis penentuan ini didasarkan pada karakteristik desa yang sama dengan pusat desa yang terpilih. Penentuan KTP2D dilakukan dengan menggunakan peta wilayah yang disesuaikan dengan teori mengenai penentuan kawasan terpilih sebagaimana pada gambar 1 sampai 5 pada bab II, dengan beberapa pertimbangan, seperti aspek geografis wilayah, transportasi, sosial budaya, potensi produktifitas daerah, perekonomian dan lain sebagainya.

2. Penilaian Kategori DPP

Kategori penentuan Desa Pusat Pertumbuhan (DPP) didasarkan pada kriteria terukur yang terdiri dari variabel-variabel potensi desa yang dikeluarkan oleh Departemen Kimpraswil tentang penjelasan Program KTP2D seri 1, sebagaimana dalam makalah yang disampaikan pada lokakarya nasional di Jakarta (2001), yaitu :

- a. Potensi sektor unggulan produksi dan jasa sebagai penggerak pertumbuhan.
- b. Tersedianya PSD untuk menunjang perkembangan produksi dan jasa serta pelayanan jasa publik
- c. Mempunyai jumlah penduduk yang cukup untuk memenuhi skala pembangunan ekonomi dan untuk pelayanan sosial ekonomi
- d. Memiliki kelembagaan masyarakat yang kuat
- e. Mempunyai aksesibilitas yang lancar dan kuat terhadap keterkaitan dengan Desa dan desa-desa disekitarnya
- f. Lokasinya tidak jauh dari ibuDesa kabupaten sebagai simpul jasa distribusi wilayah. Teknik pengumpulan data yang dilakukan didasarkan jenis data yang dibutuhkan

Indikator dari masing-masing variabel tersebut diatas secara berturut-turut dapat dilihat pada tabel 1 -- 7, berikut :

Tabel 3.1 Penilaian DPP Berdasarkan Jenis Variabel Potensi Desa

No	Variabel	Nilai Desa Pusat Pertumbuhan
1	Klasifikasi Desa	1
	a. Swadaya	3
	b. Swakarya	5
	c. Swasembada	0
	d. Lainnya	
2	Dominan Rumah Tangga Ekonomi	1
	a. Pertanian	5
	b. InJstri dan Kerajinan	3
	c. Perdagangan dan Jasa	2
	d. Lainnya	
3	Pengelolaan Kegiatan Pertanian	3
	a. Organisasi Petani	5
	b. Badan Usaha/Perusahaan	1
	c. Tidak Origanisasi	
4	Jumlah Pabrik	5
	a. > 5 buah	3
	b. 2 - 4 buah	1
	c. < 2 buah	
5	Struktur Ekonomi Potensial	
	a. Sawah/Perkebunan/Perikanan/ Lahan Kering	1
	b. Industri Kecil	3
	c. Industri Besar dan Sedang	5
	d. Perdagangan dan Jasa	5
	e. Lainnya	2
Jumlah Skor		52

Tab 3.2 Penilaian DPP Berdasarkan PSD Untuk Menunjang Perkembangan Produksi dan Jasa

No	Variabel	Nilai Desa Pusat Pertumbuhan
1	Fasilitas Pasar	
	a. Pasar/Pertokoan/Pasar Khusus	5
	b. Tidak ada	0
2	Perkreditan	
	a. Bank	5
	b. K U D	3
	c. Koperasi Lainnya	3
	d. Tidak ada	0
3	Listrik	
	a. Jumlah RT di layani PLN	3
	b. Jumlah RT di layani Non PLN	2
	c. Lainnya	1
4	Telepon	
	a. Telepon Umum	5
	b. Telepon RT	3
	c. Tidak ada	0
Jumlah Skor		30

Tabel 3.3 Penilaian DPP Berdasarkan Kelembagaan Masyarakat

No	Variabel	Nilai Desa Pusat Pertumbuhan
1	Type LKMD	
	a. Type I	1
	b. Type II	2
	c. Type III	3
2	Lembaga LMD	
	a. Ada	3
	b. Tidak ada	0
Jumlah Skor		9



Tabel 3.4 Penilaian DPP Berdasarkan PSD Untuk Pelayanan Jasa-Jasa

No	Variabel	Nilai Desa Pusat Pertumbuhan
1	Sarana Air Bersih	
	a. PDAM	2
	b. Air Sumur	1
2	Sarana Sanitasi Lingkungan	
	a. Diangkut dengan Truk	2
	b. Lainnya tanpa_lokasi pembuangan	0
3	Fasilitas Pendidikan	
	a. SLTP/Kejuruan Sederajat	1
	b. SLTA/Kejuruan Sederajat	3
4	Fasilitas Kesehatan	
	a. Rumah Sakit / RSB	5
	b. Puskesmas/Pustu	3
5	Kantor Pos	
	a. Ada	2
	b. Tidak Ada	0
6	Fasilitas Rekreasi	
	a. Bioskop/Teater	2
	b. Taman Hiburan	1
	c. Lainnya	0
Jumlah Skor		28

Tabel 3.5 Penilaian DPP Berdasarkan Jumlah Penduduk yang Cukup

No	Variabel	Nilai Desa Pusat Pertumbuhan
1	Kepadatan Penduduk	
	a. > 50 Jiwa per Km ²	15
	b. 25 - 49 Jiwa per Km ²	10
	c. < 25 jiwa per Km ²	5
Jumlah Skor		30



Tabel 3.6. Penilaian DPP Berdasarkan Aksesibilitas Terhadap Desa dan Desa Sekitarnya

No	Variabel	Nilai Desa Pusat Pertumbuhan
1	Kualitas Jalan	
	a. Aspal	5
	b. Diperkeras	3
	c. Tanah	1
2	Sarana Angkutan	
	a. Terminal	5
	b. lainnya	0
3	Moda Angkutan	
	a. Kendaraan Bermotor Roda 4/3	5
	b. Sepeda Motor	3
	c. Delman/Dokar/Gerobak/Pedati	2
	d. Lainnya	1
Jumlah Skor		25

Tabel 3.7 Penilaian DPP Berdasarkan Lokasi Antara IbuDesa

No	Variabel	Nilai Desa Pusat Pertumbuhan
1	Jarak Pusat Desa Dengan Desa Terdekat	
	a. > 25 Km	1
	b. 10 - 25 Km	3
	c. <10Km	5
Jumlah Skor		9

Interpretasi penilaian untuk memilih DPP berdasarkan total skor 7 variabel diatas dengan kategori nilai skor :

- a. Nilai 74 - 100 dipilih sebagai Desa Pusat Pertumbuhan
- b. Nilai 45 -- 73,99 dipilih sebagai Desa Potensial untuk menjadi DPP
- c. Nilai < 45 merupakan desa biasa.

3. Analisis Kategori dan Kebutuhan DPP KTP2D

Guna mendapatkan gambaran secara kualitas dan kuantitas tentang tingkat ukuran kesiapan masing-masing variabel Desa Sabila, maka digunakan metode pembobotan.

Metode ini dilakukan untuk mengetahui kategori kesiapan lokasi penelitian sebagai DPP, khususnya menyangkut kebutuhan prasarana

dan sarana berdasarkan hasil identifikasinya. Hal ini dimaksudkan untuk menginventarisasikan prasarana dan sarana di lokasi penelitian sebagai dasar untuk menunjang fungsi dan perannya sebagai DPP dalam KTP2D. Keberadaan prasarana dan sarana maupun yang masih perlu diadakan, sangat menunjang berbagai kegiatan yang ada. Analisis ini menggunakan persamaan dan tabulasi yang ditunjukkan pada tabel 3.8 berikut (Ofyar, 2002) :

$$S = \sum_{i=1}^n (B_i \times F_i)$$

Dimana :

S = Jumlah skor

B_i = Bobot kelas indikator ke-i (tertinggi = 1, terendah = 0) F_i =
Frekuensi observasi kelas indikator ke-i

n = Jumlah kelas indikator

Indikator kategorinya adalah :

- Tinggi = skor 66,70 % - 100 % dari indikator maksimal
- Sedang = skor 33,34 % - 66,69 % dari indikator maksimal
- Rendah = skor 0,00 % - 33,33 % dari indikator maksimal



Tabel 3.8 Tabulasi Metode Pembobotan

Indikator Penilaian	Kriteria Penilaian			Jumlah Penilaian Indikator
	B	S	K	
1				
2				
Dst				
Jumlah Penilaian Kriteria	$\sum 1$	$\sum 2$	$\sum 3$	$\sum \text{jumlah} = B$
Hasil Kali	$(4) \times \sum 1$	$(3) \times \sum 2$	$(2) \times \sum 3$	$\sum \text{hasil kali} = F$
Hasil Penilaian	b / a			

Ket : B = Baik (nilai = 3)

S = Sedang (nilai = 2)

K = Kurang (nilai = 1)

Untuk mendapatkan tingkat kebutuhan DPP KTP2D, terlebih dahulu dilakukan penilaian kategori yang sekaligus menjadi acuan untuk mengetahui tingkat kebutuhan lokasi penelitian dengan menggunakan analisis pembobotan sebagaimana pada tabel 3.2 s/d 3.8. Adapun pembobotan yang hendak dilakukan terdiri atas 20 variabel yang merupakan penjabaran dari penilaian variabel penentuan DPP. Indikator penilaian pembobotan dapat dilihat pada tabel 9.

Tabel 3.9 Matriks Penentuan Bobot Nilai Variabel

No	Penilaian Variabel	Indikator Penilaian
1	Transportasi	
	a. Angkutan	
	Baik	Dilayani oleh angkutan penumpang, angkutan barang (truk), kendaraan pribadi, dokar, becak dan sepeda motor.
	Sedang	Dilayani oleh 3 jenis moda diatas
	Kurang	Dilayani oleh 1 jenis moda diatas dan alat transportasi, seperti dokar, becak dll
	b. Jalan	
	Baik	Kondisi jalan umumnya baik dan dilalui/dekat dari jalan arteri dan kolektor
2	Penduduk	
	a. Pekerjaan	
	Baik	Jika rata-rata penduduk yang bekerja dari jumlah penduduk dalam DPP adalah > 60 %
	Sedang	Jika rata-rata penduduk yang bekerja dari jumlah penduduk dalam DPP adalah 40-60 %
	Kurang	Jika rata-rata penduduk yang bekerja dari jumlah penduduk dalam DPP adalah < 40 %
	b. Tingkat Kesejahteraan	
	Baik	Jika tingkat kesejahteraan rumah tangga di DPP tergolong Sejahtera II + I + Plus adalah > 50 %
3	Fasilitas Pendidikan	
	Baik	Jika jumlah fasilitas pendidikan yang dibutuhkan sudah sesuai dengan rasio jumlah penduduk pendukung
	Sedang	Jika terdapat fasilitas pendidikan tertentu lebih dari rasio kebutuhan berdasarkan jumlah penduduk pendukung

	Kurang	Jika fasilitas pendidikan yang ada kurang dari perbandingan rasio kebutuhan berdasarkan jumlah penduduk pendukung
4	Fasilitas Kesehatan	
	Baik	Jika dalam DPP terdapat minimal Pustu, 1 orang dokter, dan apotek/toko obat
	Sedang	Jika dalam DPP terdapat minimal Pustu, 1 atau lebih paramedis, dan apotek/toko obat
	Kurang	Jika dalam DPP tidak terdapat Pustu dan hanya terdapat paramedis
5.	Fasilitas Peribadatan	
	Baik	Jika dalam DPP fasilitas peribadatan sudah sesuai atau lebih dari rasio kebutuhan
	Sedang	Jika dalam DPP fasilitas peribadatan tertentu tidak ada, sementara penduduk pendukung sudah memenuhi kebutuhan berdasarkan jumlah penduduk pendukung
	Kurang	Jika dalam DPP kurang fasilitas peribadatan dari rasio jumlah penduduk pendukung
6.	Fasilitas Olah Raga	
	Baik	Jika tiap desa dalam DPP memiliki peruntukan lahan untuk lapangan olah raga/bermain yang lapang
	Sedang	Jika hanya beberapa desa dalam DPP memiliki peruntukan lahan untuk lapangan olah raga/bermain yang lapang
	Kurang	Jika dalam DPP tidak memiliki peruntukan lahan untuk lapangan olah raga/bermain yang lapang.
7.	Perumahan	
	Baik	Jika klasifikasi rumah umumnya permanen dan jumlah rumah sesuai dengan jumlah KK
	Sedang	Jika klasifikasi rumah umumnya semi permanen dan jumlah rumah relatif berselisih sedikit dengan jumlah KK
	Kurang	Jika klasifikasi rumah umumnya darurat dan rasio ke pemilikan rumah dengan KK berselisih jauh
8.	Sumber Air	
	Baik	Jika semua desa dalam DPP sudah dilayani jaringan PDAM dan rata-rata KK menggunakan air sumur pompa
	Sedang	Jika beberapa desa dalam DPP dilayani jaringan PDAM dan rata-rata KK menggunakan air sumur biasa
	Kurang	Jika dalam DPP tidak dilayani jaringan PDAM dan rata-rata KK menggunakan mata air atau air sungai yang relatif jauh dari lokasi pemukiman penduduk
9.	Saluran Air Hujan	
	Baik	Jika ketersediaan saluran dalam DPP sudah memenuhi standar kebutuhan
	Sedang	Jika ketersediaan saluran dalam DPP sudah mencapai > 50% dari kebutuhan berdasarkan SPM



Kurang	Jika ketersediaan saluran dalam DPP sudah mencapai < 50 % dari kebutuhan berdasarkan SPM
--------	--

No	Penilaian Variabel	Indikator Penilaian
10	Persampahan	
	Baik	Jika dalam DPP sudah dilakukan pengelolaan sampah yang baik sesuai dengan standar permukiman
	Sedang	Jika salah satu desa dalam DPP sudah melakukan pengelolaan sampah sesuai dengan standar permukiman
	Kurang	Jika dalam DPP belum dilakukan system pengelolaan sampah yang baik sesuai dengan standar permukiman
11	Telekomunikasi	
	Baik	Jika dalam DPP sudah dilayani jaringan telepon dan sudah ada pelanggannya
	Sedang	Jika beberapa desa dalam DPP sudah dilayani jaringan telepon dan sudah ada pelanggannya
Kurang	Jika dalam DPP belum dilayani jaringan telepon dan sistem telekomunikasi terbatas	
12	Listrik	
	Baik	Jika dalam DPP dominan menggunakan jaringan listrik dari PLN
	Sedang	Jika dalam DPP dominan menggunakan jaringan listrik diluar dari PLN atau yang menggunakan petromaks
Kurang	Jika dalam DPP dominan menggunakan pelita sebagai alat penerangan rumah	
13	Potensi Produktivitas Wilayah	
	Baik	Jika potensi produktifitas mengalami pertumbuhan tiap tahun dan beberapa diantaranya memiliki skala pemasaran minimal antar kabupaten
	Sedang	Jika potensi produktifitas tidak mengalami pertumbuhan tiap tahun dan masih memiliki skala pemasaran dalam kabupaten
Kurang	Jika potensi produktifitas mengalami pertumbuhan tiap tahun dan masih memiliki skala pemasaran maksimal antar kecamatan	
14	Industri	
	Baik	Jika dalam DPP terdapat industri menengah dan besar
	Sedang	Jika dalam DPP terdapat industri kecil dengan skala pemasaran dan operasional minimal antar kabupaten
Kurang I	Jika dalam DPP terdapat industri kecil dengan skala pemasaran dan operasional bersifat loka(maksimal antar kecamatan	
15	Sektor Jasa	

	Baik	Jika dalam DPP terdapat sektor jasa dengan modal besar dan mempekerjakan banyak orang
	Sedang	Jika dalam DPP terdapat sektor jasa dengan modal menengah dan mempekerjakan banyak orang
	Kurang	Jika dalam DPP hanya terdapat sektor jasa dengan modal kecil dan tidak mempekerjakan banyak orang
16	Sektor Ekonomi	
	Baik	Jika dalam DPP terdapat pasar, pertokoan, bank, dan koperasi
	Sedang	Jika dalam DPP terdapat pasar dan koperasi
	Kurang	Jika dalam DPP hanya terdapat KUD dan usaha ekonomi lainnya, seperti warung/kedai/kios
17	Pariwisata (berdasarkan hasil wawancara)	
	Baik	Potensi wisata yang dapat/perlu dikembangkan menjadi kegiatan utama kawasan dan telah diupayakan pelaksanaannya 2 tahun terakhir dan didasari oleh kebijakan pembangunan daerah
	Sedang	Potensi wisata yang dapat/perlu dikembangkan merupakan penunjang pengembangan kawasan pariwisata setempat
	Kurang	Terdapat potensi wisata tidak termasuk dalam paket pengembangan kawasan wisata setempat
18	Rencana Tata Ruang (berdasarkan hasil wawancara)	
	Baik	Terdapat RUTR Tingkat Kecamatan yang merupakan bagian dari kawasan DPP dan arahan rencana sudah terealisasi dalam waktu 3 tahun terakhir
	Sedang	Terdapat RUTR Tingkat Kecamatan yang merupakan bagian dari kawasan DPP dan arahan rencana belum pernah terealisasi
	Kurang	Jika tidak terdapat RUTR Tingkat Kecamatan yang merupakan bagian dari kawasan DPP
19	Lembaga Kemasyarakatan (berdasarkan hasil wawancara)	
	Baik	Jika semua desa dalam DPP terdapat lebih dari 3 lembaga (LKMD, LMD, BPD, kelompok tani, remaja masjid, kelompok karangtaruna, kelompok pemuda) dengan keanggotaan tetap dan aktif dalam kegiatan kelembagaan.
	Sedang	Jika semua desa dalam DPP terdapat kurang dari 3 lembaga (LKMD, LMD, BPD, kelompok tani, remaja masjid, kelompok karangtaruna, kelompok pemuda) dengan keanggotaan tetap dan aktif dalam kegiatan kelembagaan
	Kurang	Jika semua desa dalam DPP kurang dari 3 lembaga (LKMD, LMD, BPD, kelompok tani, remaja masjid, kelompok karangtaruna, kelompok pemuda) yang tidak memiliki keanggotaan tetap serta tidak pernah aktif dalam kegiatan kelembagaan
20	Partisipasi Masyarakat (berdasarkan hasil wawancara)	



Baik	Jika masyarakat berperan serta atau berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembangunan, seperti bergotong-royong pada setiap kegiatan pembangunan desa, aktif pada setiap kegiatan kelembagaan di desa, dan kegiatan perencanaan pembangunan desa lainnya.
Sedang	Jika, hanya sebagian masyarakat berperan serta atau berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembangunan, seperti bergotong-royong pada setiap kegiatan pembangunan desa, aktif pada setiap kegiatan kelembagaan di desa, dan kegiatan perencanaan pembangunan desa lainnya.
Kurang	Jika masyarakat tidak pernah atau sedikit berperan serta atau berpartisipasi aktif pada setiap kegiatan pembangunan desa.

Kriteria tingkat indikator :

- Tinggi = skor 66,70 % - 100 % dari indikator maksimal
- Sedang = skor 33,34 % - 66,69 % dari indikator maksimal
- Rendah = skor 0,00 % - 33,33 % dari indikator maksimal

F. Definisi Operasional

1. Kawasan Terpilih Pusat Pengembangan Desa (KTP2D) adalah suatu tetapan wilayah pengembangan dengan menetapkan salah satu desa sebagai pusat pengembangan yang ditentukan berdasarkan keunggulan atau potensi yang dimilikinya dibandingkan dengan desa-desa lainnya, baik dalam konteks dalam wilayah kecamatan maupun dalam wilayah kabupaten. Dasar penentuan KTP2D dilakukan dengan menggunakan peta sebagai instrumen dalam menetapkan kawasan terpilih, sebagaimana pada gambar 1-5 (bab II).
2. Desa Pusat Pertumbuhan (DPP) adalah suatu desa yang secara teoritis dan tingkat kemampuan serta potensinya untuk dijadikan sebagai pusat pertumbuhan terhadap desa-desa hinterlandnya dan dapat berfungsi sebagai barometer terhadap percepatan pembangunan dan pengembangan kawasan perencanaan dalam kegiatan pelaksanaan pembangunan wilayah perdesaan. Adapun penilaian variabel yang dilakukan adalah potensi desa, perkembangan produksi dan jasa, kelembagaan masyarakat, PSD untuk pelayanan



- jasa jasa, jumlah penduduk, aksesibilitas terhadap Desa dan desa disekitarnya, dan lokasi antara DPP Sabila dengan ibukota kecamatan.
3. Penilaian Kategori adalah suatu metode analisis untuk mengetahui tingkat kesesuaian lokasi penelitian untuk menunjang fungsi dan perannya sebagai DPP KTP2D. Tingkat pencapaian kategori hingga 100 % dianggap sudah memenuhi kapasitasnya sebagai DPP KTP2D dan jika tidak, maka beberapa hal yang masih dianggap perlu untuk dikembangkan sebagai dasar kebutuhan penetapan kawasan dan statusnya dalam konstelasi pembangunan perdesaan dalam wilayah kecamatan dan kabupaten.
 4. Kebutuhan adalah sesuatu hal yang sangat mendasar yang tidak hanya dapat disesuaikan dengan jumlah rasio pendukungnya, akan tetapi perlu disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi yang terjadi pada suatu daerah.
 5. Prasarana dan Sarana adalah infrastruktur yang merupakan dasar terselenggaranya berbagai aktivitas dan merupakan indikator pembangunan dan keberadaannya sangat dibutuhkan dan menunjang suatu pembangunan, khususnya pada daerah pedesaan, diantaranya adalah jalan, listrik, telepon, fasilitas pendidikan, perdagangan, pelayanan sosial, dan perkantoran.
 6. Prasarana Dasar (PSD) adalah suatu kelengkapan yang dimiliki oleh desa yang terpilih menjadi DPP sebagai suatu indikator dalam penetapannya sebagai pusat pertumbuhan dalam tata rencana pengembangan yang hendak dilakukan. PSD yang dimaksud diantaranya adalah jalan, drainase, air bersih dan persampahan.
 7. Potensi sektor unggulan produksi dan jasa adalah suatu sumberdaya yang dimiliki oleh desa yang berfungsi sebagai sebagai penggerak pertumbuhan pusat pertumbuhan dan wilayah hinterlandnya, seperti sebagai desa distribusi perikanan laut, pariwisata, pertanian, perkebunan, dan industri.





BAB IV
ANALIS DAN PEMBAHASAN

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Kriteria Lokasi DPP dalam KTP2D

Kriteria Lokasi DPP dalam KTP2D didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

a. Kriteria Umum

- Tidak rawan bencana (periodik maupun yang dapat diperkirakan)
- Terdiri dari satu kesatuan kawasan perdesaan, dengan desa pusat yang berfungsi sebagai pusat distribusi barang, jasa dan informasi
- Didukung oleh adanya potensi dominan yang dapat dimanfaatkan untuk pertumbuhan dan perkembangan kawasan
- Mempunyai akses yang memadai, baik antar desa dalam kawasan maupun ke pusat-pusat lain yang lebih tinggi ordenya
- Mempunyai kelembagaan dan kepemimpinan (formal maupun informal)
- Masyarakatnya terbuka terhadap pembaharuan dan pembangunan

b. Kriteria Khusus

- Kawasan Agro Bisnis
- Kawasan Agro Industri
- Kawasan Agro Wisata
- Pusat Jasa Lokal

B. Pertimbangan Pemilihan Lokasi DPP dalam KTP2D

a. Pertimbangan Umum

Pertimbangan umum yang digunakan dalam menetapkan lokasi DPP KTP2D desa Sabila sebagai berikut :

- Kondisi tofografi desa Sabila tidak rawan bencana alam.
- Desa Sabila merupakan kesatuan kawasan perdesaan, dengan desa pusat yang berfungsi utama sebagai sentra produksi perkebunan, pertanian dan sebagai pusat distribusi barang dan jasa.

- Desa Sabila didukung oleh adanya potensi perkebunan dan pertanian yang dapat dimanfaatkan untuk pertumbuhan dan perkembangan kawasan.
- Desa Sabila mempunyai akses yang memadai, baik antar desa dalam kawasan maupun ke pusatnya, menuju ke kota Maros.

b. Pertimbangan Khusus Desa Sabila

Pertimbangan khusus yang mendukung keberadaan desa Sabila sebagai desa pusat pertumbuhan sangat ditentukan oleh potensi dan kondisi alamnya yang memungkinkan untuk dikembangkan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Memiliki potensi Industri Tambang Batu Bara dan Kerajinan tangan
- Desa Sabila dalam Rencana Umum Tata Ruang Maros ditetapkan sebagai kawasan pengembangan pertanian terutama untuk pengembangan agropolitan.

C. Tinjauan Umum DPP KT2D Kecamatan Mallawa

1. Karakteristik Fisik Dasar









a. Keadaan Geografis dan Wilayah Administrasi

Desa Sabila merupakan bagian wilayah kecamatan Mallawa dengan Ibukota Kecamatan adalah Kelurahan Batu Putih kabupaten Maros yang secara geografis terletak antara 40° 10' 30" sampai 300° 19' 13" Lintang Selatan dan 190° 26' 30" sampai 190° 47' 20" Bujur Timur, Jarak pusat Desa Sabila dengan ibukota kecamatan berkisar 5 Km dan jarak ibuDesa kabupaten adalah 61 km dengan jarak tempuh ± 1,5 jam yang ditempuh dengan angkutan umum (mikrolet).

Kecamatan Mallawa dengan luas wilayah 23.591,88 Ha yang terdiri dari 11 wilayah kelurahan/desa. Wilayah kelurahan/desa yang memiliki wilayah yang terluas adalah Desa Samaenre yaitu 4.225,34 Ha (17,91 %) dari luas keseluruhan kecamatan Malawa kemudian disusul Desa Gattareng Matinggi dengan luas 3.334,37 Ha (14,13 %). Sedangkan yang terkecil adalah Desa Uludaya dengan luas wilayah

Gambar :
PETA ADMINISTRASI KABUPATEN MAROS

Keterangan :

-  Ibukota Kabupaten
-  Batas Kabupaten/ Kota
-  Batas Kecamatan
-  Batas Desa/ Kelurahan
-  Jalan Aspal
-  Jalan Pengerasan/ Batu
-  Jalan Tanah
-  Sungai

PEMBIMBING

1. Ir. Muh. Fathien Azmy, Msi
2. Ir. Muh Ridwan, Msi
3. Ir. Nursyam Aksa, Msi

MAHASISWA/STB

IRWAN IDRIS
45 92 042 005

JURUSAN TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS "45"
MAKASSAR 2007



KABUPATEN MAROS

942000 942500 943000 943500 944000 944500 945000 945500 946000 946500 947000 947500 948000 948500 949000 949500 950000 950500 951000 951500 952000 952500 953000 953500 954000 954500 955000 955500 956000 956500 957000 957500 958000 958500 959000 959500 960000 960500 961000 961500 962000 962500 963000 963500 964000 964500 965000 965500 966000 966500 967000 967500 968000 968500 969000 969500 970000 970500 971000 971500 972000 972500 973000 973500 974000 974500 975000 975500 976000 976500 977000 977500 978000 978500 979000 979500 980000 980500 981000 981500 982000 982500 983000 983500 984000 984500 985000 985500 986000 986500 987000 987500 988000 988500 989000 989500 990000 990500 991000 991500 992000 992500 993000 993500 994000 994500 995000 995500 996000 996500 997000 997500 998000 998500 999000 999500 1000000

1.129,69 Ha (4,79 %). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel: 4.1 Luas Wilayah Kecamatan Mallawa Menurut Kelurahan/Desa Tahun 2006

NO	LUAS WILAYAH KECAMATAN MALLAWA		
	Desa/ Kelurahan	Luas Wilayah (Ha)	Prosentase (%)
1	Padaelo	2085,94	8.84
2	Mattampapole	1160,94	4.92
3	Tellumpanuae	1351,56	5.73
4	Bentenge	2384,37	10.11
5	Samaenre	4225,34	17.91
6	Batu Putih	2460,60	10.43
7	Wanua Waru	2121,28	8.99
8	Sabila	1526,25	6.47
9	Barugae	1810,94	7.68
10	Uludaya	1129,69	4.79
11	Gattareng Matinggi	3334,37	14.13
JUMLAH		23591,28	100,00




Sumber: Kec. Mallawa Dalam Angka Thn 2006

Adapun tingkat perkembangan desa/kelurahan di Kecamatan Mallawa, sebanyak 6 desa/kelurahan yang bertipologi Desa Swakarya dan 5 desa/kelurahan bertipologi swasembada. Kondisi ini memperlihatkan tingkat perkembangan dan kemajuan daerah perdesaan di kecamatan Mallawa ini relatif baik. Adapun pembagian tipologi desa/kelurahan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Gambar :

PETA ADMINISTRASI KECAMATAN MALLAWA

Keterangan :

-  Ibukota Kecamatan
-  Batas Kabupaten/ Kota
-  Batas Kecamatan
-  Batas Desa/ Kelurahan
-  Jalan
-  Sungai
-  Kawasan DPP KTP2D Sabila

PEMBIMBING

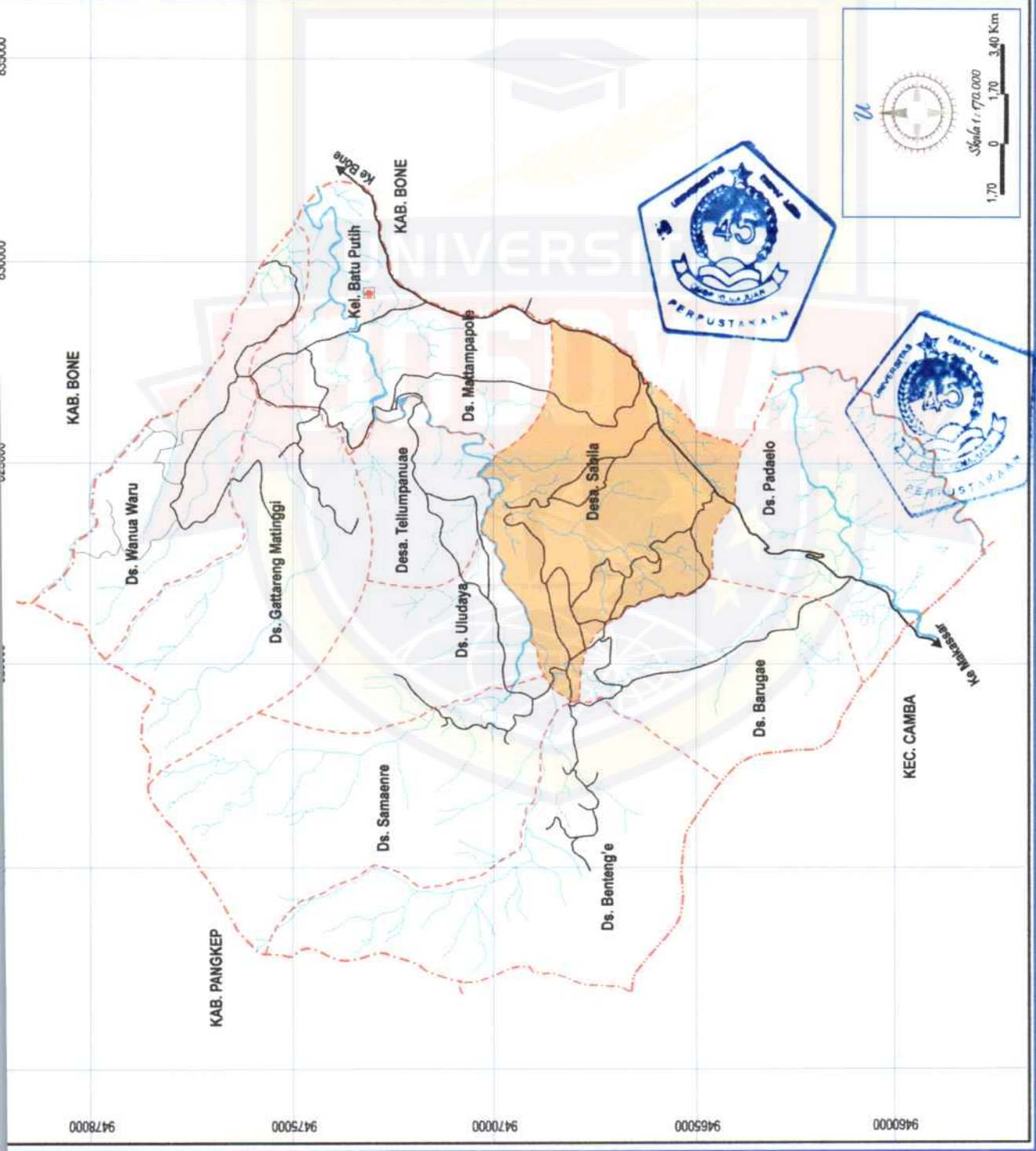
1. Ir. Muh. Fathien Azmy, Msi
2. Ir. Muh Ridwan, Msi
3. Ir. Nursyam Akxa, Msi

MAHASISWA/STB

IRWAN IDRIS
45 92 042 005



JURUSAN TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS "45"
MAKASSAR 2007



9478000




9475000




9470000

9465000

9460000

Gambar :
PETA POTENSI DAERAH HINTERLAND LOKASI DPP KTP2D KABUPATEN MAROS

- Keterangan :
-  **Ibukota Kecamatan**
 -  **Batas Kabupaten/ Kota**
 -  **Batas Kecamatan**
 -  **Batas Desa/ Kelurahan**
 -  **Jalan**
 -  **Sungai**
 -  **Kawasan DPP KTP2D Sabila**

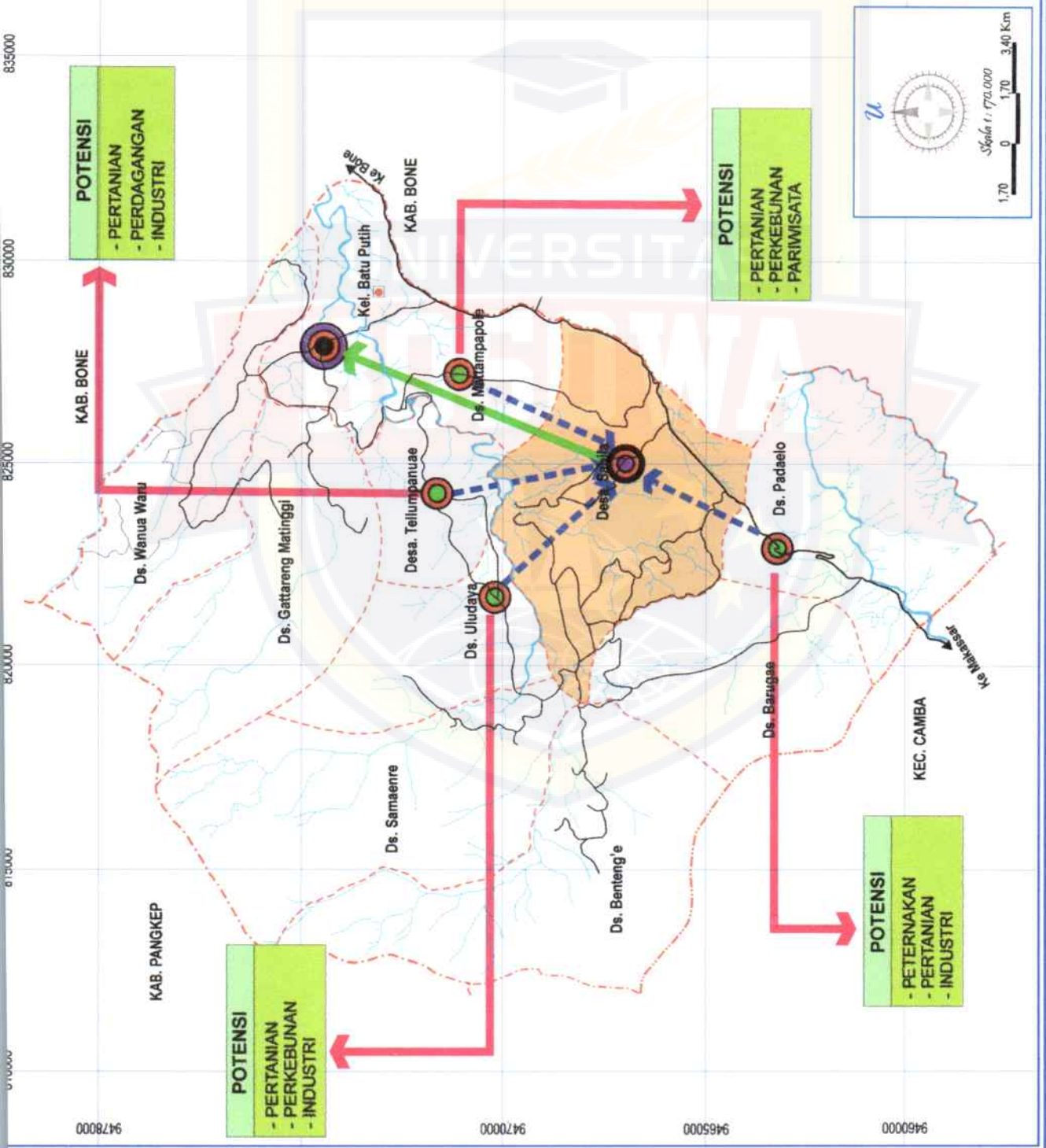
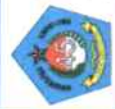
-  **Ibukota Kecamatan**
-  **Desa Pusat Pertumbuhan**
-  **Daerah Hinterland**
-  **Aksesibilitas Ke DPP**
-  **Aksesibilitas Dari DPP Ke Ibukota Kecamatan**

PEMBIMBING

1. Ir. Muh. Fathien Azmy, Msi
2. Ir. Muh Ridwan, Msi
3. Ir. Nursyam Akxa, Msi

MAHASISWA/STB

IRWAN IDRIS
 45 92 042 005



Tabel: 4.2 Pembagian Wilayah Menurut Tingkat Perkembangan Desa/Kelurahan di Kecamatan Mallawa Tahun 2006

NO	Kelurahan/Desa	Swadaya	Swakarya	Swasembada
1	Padaelo	-	✓	-
2	Mattampapole	-	✓	-
3	Tellumpanuae	-	-	-
4	Bentenge	-	-	✓
5	Samaenre	-	✓	-
6	Batu Putih	-	✓	-
7	Wanua Waru	-	-	✓
8	Sabila	-	-	✓
9	Barugae	-	-	✓
10	Uludaya	-	-	✓
11	Gattareng Matinggi	-	✓	-
J u m f a h		-	6	6

Sumber: Kec. Mallawa Dalam Angka Thn 2006

Dari tabel 3.2 terlihat bahwa Desa Sabila masih bertipologi sebagai desa Swasembada begitupula 2 (dua) desa lainnya yang merupakan daerah hinterlandya, yaitu Desa Mattampapole dan Padaelo kedua desa ini memiliki kondisi dan potensi yang sama sehingga memungkinkan untuk dijadikan sebagai satu kawasan pengembangan desa.

b. Topografi Wilayah

Topografi wilayah Kecamatan Mallawa pada umumnya berada pada ketinggian antara 325 – 700 meter diatas permukaan laut. Wilayah Kecamatan Mallawa secara umum lebih didominasi oleh wilayah pegunungan, bergelombang hingga datar. Topografi wilayah yang paling tinggi dari permukaan laut berada di Desa Gattareng Matinggi dan Desa Wanua Waru (700 meter DPL), sedangkan Ibukota Kecamatan Mallawa (Kel. Batu Putih) dan beberapa desa lainnya berada pada ketinggian rata-rata 325 meter diatas permukaan laut.

c. Keadaan Iklim dan Hidrologi

Seperti halnya wilayah lain yang ada di Kabupaten Maros, di Kecamatan Mallawa terdapat 2 musim yaitu musim kemarau dan musim hujan dengan curah hujan rata-rata berkisar 250 mm/ tahun. Keadaan hidrologi wilayah Kecamatan Mallawa secara umum adalah merupakan daerah dengan sumber mata air yang berasal dari pegunungan dan air tanah (sumur) serta air permukaan (sungai). Kondisi hidrologi ini cukup tersedia, yang ditunjang dengan kondisi iklim/ cuaca yang baik.

d. Geologi/ Struktur Tanah

Hal yang sangat mendasar dalam menetapkan pembangunan fasilitas infrastruktur Desa adalah geologi dan struktur tanah. Kondisi ini berpengaruh terhadap berbagai dampak yang ditimbulkan oleh aktifitas pembangunan tersebut. Misalnya kondisi tanah yang labil sehingga mudah longsor, adanya jalur patahan tanah dan bebatuan yang rawan gempa.

Struktur tanah dan batuan pada suatu daerah akan berpengaruh terhadap efek kegiatan pembangunan baik dari segi letak maupun struktur bangunan yang direncanakan. Keadaan struktur tanah dan batuan di Kecamatan Mallawa diklasifikasikan kedalam jenis tanah alluvial coklat kekuningan, intermedier dan andosol. Sedangkan jenis batumannya meliputi jenis batuan organik dan batuan beku/ vulkanik.

2. Identifikasi Aspek Kependudukan

a. Jumlah dan Kepadatan Penduduk

Jumlah penduduk kecamatan Mallawa tahun 2006 sebanyak 11.503 jiwa dengan tingkat pertumbuhan rata-rata 4.16 %. Distribusi penduduk yang tertinggi adalah di Wanua waru, yaitu 1.588 jiwa atau 13,8 % dan terendah adalah di Desa Uludaya 613 jiwa atau 5.32 % sedang jumlah penduduk Desa Sabila sebagai DPP adalah sebanyak 1.043 jiwa atau 9.06 %. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel: 4.2 Penduduk Kecamatan Mallawa Menurut Desa/Kelurahan dan Tahun 2006

No	Kelurahan/Desa	Tahun				Pertumbuhan
		2003 (Jiwa)	2004 (Jiwa)	2005 (Jiwa)	2006 (Jiwa)	Rata-rata (%)
1	Padaelo	871	875	882	890	0.43
2	Mattampapole	861	870	875	883	0.51
3	Tellumpanuae	1.161	1.169	1.172	1.189	0.50
4	Bentenge	881	886	893	902	0.47
5	Samaenre	890	897	906	928	0.84
6	Batu Putih	1.324	1.352	1.385	1.401	1.14
7	Wanua Waru	1.520	1.541	1.572	1.588	0.91
8	Sabila	1.011	1.025	1.032	1.043	3.62
9	Barugae	1.028	1.043	1.068	1.078	1.00
10	Uludaya	517	542	606	613	3.56
11	Gattareng Matinggi	773	898	973	988	5.21
		9.469	11.089	11.364	11.503	4.16

Sumber: Kec. Mallawa Dalam Angka Thn 2006

Dari tabel tersebut diatas terlihat beberapa kelurahan/desa mengalami pertumbuhan rata-rata tiap tahunnya yang paling tinggi adalah desa Ganttareng Matinggi, yaitu 5.21 % atau terjadi penambahan penduduk tahun 2004 - 2005 sebanyak 15 jiwa.

Dengan penambahan tersebut jika dikaitkan dengan tingkat kelahiran pada wilayah kelurahan/desa, termasuk Desa Sabila adalah tidak mungkin terjadi. Pertambahan begitu besar dalam 1 tahun disebabkan adanya perpindahan penduduk menuju kelurahan/desa yang memiliki penambahan penduduknya cukup besar, seperti pada Desa Sabila.

Sedang kepadatan penduduk Kecamatan Mallawa tahun 2006 adalah 49 jiwa/km² dengan tingkat kepadatan tertinggi di Kelurahan Batu putih, yaitu 88 jiwa/ km² dan terendah di Desa Samaenre yaitu 22 jiwa/ km² sedangkan Desa Sabila Sebagai DPP KTP2D di

kecamatan Mallawa memiliki kepadatan sebanyak. 68 Jiwa/ km² untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel: 4.3 Kepadatan Penduduk dan Jumlah Rumah Tangga Kecamatan Mallawa Menurut Desa/Kelurahan dan Tahun 2006

No	Kelurahan/Desa	Luas (Km ²)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Jumlah Rumah Tangga	Kepadatan Rata-rata (Jiwa/km ²)
1	Padaelo	20,8594	890	199	43
2	Mattampapole	11,6094	883	215	76
3	Tellumpanuae	13,5156	1.189	319	88
4	Bentenge	23,8437	902	241	38
5	Samaenre	42,2534	928	221	22
6	Batu Putih	24,6060	1.401	336	57
7	Wanua Waru	21,2128	1.588	374	75
8	Sabila	15,2625	1.043	249	68
9	Barugae	18,1094	1.078	253	60
10	Uludaya	11,2969	613	164	54
11	Gattareng Matinggi	33,3437	988	203	30
		235,9188	11.503	2.774	49

Sumber: Kec. Mallawa Dalam Angka Thn 2006

b. Penduduk Menurut Mata Pencaharian

Penduduk Desa Sabila tahun 2006 berjumlah 1.134 jiwa dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 302 KK, dengan mata pencaharian penduduk yang berbeda-beda. Namun mata pencaharian penduduk yang lebih dominan adalah sektor pertanian yaitu sebanyak 319 jiwa atau 28,13 %, hal ini dikarenakan produktivitas lahan yang ada dan potensi lokasi sebagai pengembangan lokasi pertanian dan perkebunan, disamping pengaruh tingkat pendidikan penduduk pada lokasi penelitian. Selain mata pencaharian dari sektor pertanian dan perkebunan terdapat juga beberapa sektor lain, yaitu perdagangan, angkutan/ transportasi, kerajinan, jasa, Pegawai Negeri Sipil, TNI/ Polri dan sektor lainnya.

Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa sektor pertanian dan perkebunan masih lebih dominan sebagai sumber kehidupan masyarakat di Desa Sabila. Hal ini didukung ketersediaan lahan pertanian dan perkebunan yang cukup potensial dikembangkan. Untuk lebih jelasnya struktur penduduk berdasarkan mata pencaharian di Desa Sabila dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel: 4.4 Struktur Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian Di Desa Sabila, Tahun 2006

NO	STRUKTUR PENDUDUK BERDASARKAN MATA PENCAHARIAN		
	Mata Pencaharian	Penduduk (Jiwa)	Presentase (%)
1	Pertanian	319	28.13
2	Industri Kerajinan	4	0.35
3	Perdagangan	69	6.08
4	Angkutan/ Transportasi	18	1.59
5	Jasa	96	8.47
6	Lainnya (PNS, TNI/ Polri, tdk bekerja)	628	55.38
JUMLAH		1.134	100,00

Sumber: Data Potensi Kelurahan, Tahun 2007

Dari jumlah penduduk yang bekerja pada berbagai jenis pekerjaan bukan berarti bahwa penduduk setempat memiliki tingkat kesejahteraan yang baik. Berdasarkan data mengenai hal tersebut penduduk terlihat bahwa pada umumnya rumah tangga termasuk keluarga Pra Sejahtera yaitu 2,78 %, Sejahtera I 40.93 %, dan Plus berkisar 2.18 %. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel: 4.5 Banyak Rumah Tangga di Kecamatan Mallawa Menurut Desa/kelurahan dan Pentahapan Keluarga Sejahtera Tahun 2006

No	Kelurahan/Desa	Pra sejahtera	Sejahtera I	Sejahtera II	Sejahtera III	Sejahtera Plus
1	Padaelo	3	67	145	27	12
2	Mattampapole	13	60	117	86	0
3	Tellumpanuae	3	144	125	80	16
4	Bentenge	5	214	168	11	0
5	Samaenre	25	45	96	136	0
6	Batu Putih	18	204	131	40	4
7	Wanua Waru	5	214	168	11	0
8	Sabila	3	103	114	76	36
9	Barugae	2	122	116	41	3
10	Uludaya	7	134	48	18	1
11	Gattareng Matinggi	6	145	88	18	0
		93	1.369	1.246	563	73

Sumber: Kec. Mallawa Dalam Angka Thn 2006

3. Identifikasi Ruang Kawasan

a. Fasilitas Pendidikan

Jenis fasilitas pendidikan di wilayah Kecamatan Mallawa hanya terdapat TK, SD, SMP, SMU dan SPP dengan jumlah seluruhan 25 sekolah. Sekolah yang paling dominan adalah SD yaitu sebanyak 17 unit atau 68 %, kemudian disusul TK 5 unit atau 20 %, SMP 2 unit atau 8 %, dan 1 unit SMU atau 4 %. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel: 4.6 Banyaknya Fasilitas Pendidikan Menurut Desa/kelurahan Kecamatan Mallawa Tahun 2006

No	Kelurahan/Desa	TK	SD	SMP	SMU	Jumlah
1	Padaelo	1	1	0	0	2
2	Mattampapole	0	1	0	0	1
3	Tellumpanuae	0	1	1	0	1
4	Bentenge	0	1	0	0	1
5	Samaenre	0	2	0	0	2
6	Batu Putih	1	3	0	0	4
7	Wanua Waru	0	2	0	0	2
8	Sabila	1	2	1	1	4
9	Barugae	1	1	0	0	2
10	Uludaya	0	1	0	0	1
11	Gattareng Matinggi	1	2	0	0	3
		5	17	2	1	25

Sumber: Kec. Mallawa Dalam Angka Thn 2006

Dari Tabel diatas terlihat bahwa jenis fasilitas pendidikan diwilayah Desa Sabila Sebagai DPP hanya terdapat 4 unit Sekolah. Tingkat layanan 1 unit SMP di desa tersebut, disamping memenuhi kebutuhan wilayahnya juga desa yang ada disekitarnya, khususnya dari Desa Tellupanua dan Desa Mattampapole. Sedangkan 1 unit SMU yang terletak sekitar dijalur jalan poros Kab. Maros – Kab. Bone yang memiliki skala tingkat pelayanan antara wilayah kecamatan yang di sekitarnya.



b. Fasilitas Kesehatan

Fasilitas kesehatan pada suatu lingkungan sangat diperlukan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Jenis fasilitas kesehatan diwilayah Kecamatan Mallawa umumnya didominasi oleh fasilitas berupa Polndes tersebar diwilayah desa/kelurahan

sebanyak 8 unit, Puskesmas Pembantu (Pustu). Sedangkan untuk Puskesmas 1 unit yang terletak di pusat Kecamatan Mallawa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel: 4.7 Banyaknya Fasilitas Kesehatan Menurut Desa/kelurahan Kecamatan Mallawa Tahun 2006



No	Kelurahan/Desa	Puskesmas	Pustu	Polindes	Dokter Praktek	Apotik/ Toko Obat
1	Padaelo	-	-	1	-	-
2	Mattampapole	-	-	1	-	-
3	Tellumpanuae	-	1	1	-	-
4	Bentenge	-	1	1	-	-
5	Samaenre	-	-	1	-	-
6	Batu Putih	-	1	1	-	-
7	Wanua Waru	-	1	-	-	-
8	Sabila	1	-	-	-	-
9	Barugae	-	-	1	-	-
10	Uludaya	-	-	1	-	-
11	Gattareng Matinggi	-	1	-	-	-
		1	5	8	-	-

Sumber: Kec. Mallawa Dalam Angka Thn 2006

Dari tabel diatas terlihat bahwa untuk wilayah desa/kelurahan yang tidak terdapat Pustu ataupun Puskesmas disebabkan skala tingkat pelayanan masing-masing fasilitas kesehatan tersebut juga melayani daerah hinterlandnya dari kecamatan sekitarnya. Adapun fasilitas lainnya, yaitu apotek dan toko obat belum tersedia di kecamatan Mallawa sehingga untuk kebutuhan obat-obatan umumnya masyarakat dapat memperoleh dari Dinas kesehatan disamping beberapa kios yang telah menyediakannya. Sedangkan tenaga medis yang terdapat di kecamatan Mallawa telah terdistribusi pada setiap Puskesmas dan Pustu, yang diantaranya seperti tenaga dokter perawat dan bidang. Tenaga Dokter hanya ditempatkan di Puskesmas Sebanyak 2 orang, perawat 7 orang dan bidang 13 orang.

c. Fasilitas Peribadatan

Berdasarkan data yang ada, dimana penduduk kecamatan Mallawa umumnya beragama islam, maka fasilitas peribadatan yang ada hanya terdapat Masjid 37 unit 7 Langgar/Mushollah. Jumlah dan jenis fasilitas yang terdapat di Desa Sabila sebagai DPP hanya terdapat 4 unit Masjid.

d. Fasilitas Olah Raga

Fasilitas olah raga di wilayah kecamatan Mallawa hanya berupa lapangan sepak bola 3 buah yang masing-masing terdapat di desa Sabila, desa Batu Putih dan desa Tellempanuae. Lapangan Volly sebanyak 16 buah yang tersebar disetiap desa/kelurahan, sepak takraw dan tennis meja. Prasarana olah raga tersebut umumnya diusahakan oleh penduduk setempat dan lokasinya pada lahan kosong ada disekitar pusat permukiman. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel: 4.8 Banyaknya Fasilitas Olah Raga di Kecamatan Mallawa Menurut Desa/kelurahan Tahun 2006

No	Kelurahan/Desa	Sepak Bola	Bola Volly	Tennis Meja	Sepak Takraw
1	Padaelo	-	1	1	1
2	Mattampapole	-	1	1	1
3	Tellumpanuae	1	2	2	2
4	Bentenge	-	1	1	1
5	Samaenre	-	1	1	1
6	Batu Putih	-	1	1	1
7	Wanua Waru	-	1	1	1
8	Sabila	1	2	3	3
9	Barugae	-	1	1	1
10	Uludaya	-	2	2	2
11	Gattareng Matinggi	1	2	1	2
		3	15	15	15

Sumber: Kec. Mallawa Dalam Angka Thn 2006



e. Perumahan

Sebagai dasar kebutuhan penduduk dalam membina keluarganya dan merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan pada sektor perumahan adalah pemenuhan kebutuhan rumah tempat tinggal bagi penduduk disuatu daerah. Jumlah bangunan rumah di kecamatan Mallawa sebanyak 7,907 unit dengan jumlah terbanyak di daerah desa/kelurahan Sabila dan desa Gantareng Matinggi masing-masing 1.315 unit atau 16.63% dan 1.017 unit atau 12.86 %. Sedangkan jumlah rumah di Desa Mattampapole sebanyak 6.204 unit atau 78.46 % , kemudian darurat sebanyak 1.284 unit atau 16.24 % dan selebihnya adalah permanen. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel: 4.9 Bentuk dan Jumlah Rumah Tempat Tinggal di Kecamatan Mallawa Menurut Desa/kelurahan Tahun 2006

No	Kelurahan/Desa	Permanen	Semi Permanen	Darurat	Jumlah
1	Padaelo	15	469	155	639
2	Mattampapole	16	374	45	435
3	Tellumpanuae	20	563	91	674
4	Bentenge	10	359	39	408
5	Samaenre	3	407	50	460
6	Batu Putih	8	321	20	349
7	Wanua Waru	15	433	250	498
8	Sabila	105	960	178	1,315
9	Barugae	140	290	138	608
10	Uludaya	30	705	150	873
11	Gattareng Matinggi	42	825	118	1.017
		404	5.706	1.166	7.276

Sumber: Kec. Mallawa Dalam Angka Thn 2006

Berdasarkan dari uraian tabel tersebut diatas dapat dilihat bahwa antara jumlah rumah tangga dengan jumlah rumah tempat tinggal terdapat selisih yang artinya bahwa masih terdapat 460 KK yang memiliki rumah tempat tinggal. Sesuai dengan budaya masyarakat setempat, sebanyak 460 rumah tempat tinggal dihuni oleh 2 KK atau bahkan lebih ini dialami oleh 11 desa/kelurahan.

f. Sumber Daya Air

Air adalah kebutuhan dasar dalam kehidupan makhluk hidup. Sumber air yang digunakan oleh penduduk untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari diperoleh beberapa cara seperti sumber air dari sumur pompa, sumur perigi dan mata air. Sumber air dominan yang digunakan oleh penduduk setempat adalah berasal dari sumur perigi, yaitu sebanyak 7.183 KK. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel: 4.10 Banyaknya Rumah Tangga di Kecamatan Mallawa Menurut Desa/kelurahan dan Sumber Air Minum yang digunakan Tahun 2006

No	Kelurahan/Desa	PDAM	Sumur Pompa	Sumur Perigi	Mata Air	Jumlah
1	Padaelo	-	-	756	-	756
2	Mattampapole	-	60	448	-	508
3	Tellumpanuae	-	25	717	-	742
4	Bentenge	16	-	402	-	418
5	Samaenre	14	25	446	-	485
6	Batu Putih	14	15	344	-	359
7	Wanua Waru	-	165	1.043	-	549
8	Sabila	-	75	665	-	1132
9	Barugae	-	5	948	-	670
10	Uiudaya	-	-	1.030	-	948
11	Gattareng Matinggi	-	120	400	-	1150
		44	490	7.183	-	7.717

Sumber: Kec. Mallawa Dalam Angka Thn 2006

Jika dilihat dari tabel diatas dan jumlah rumah tangga (KK), maka kebutuhan air minum sudah memenuhi. Sedangkan kebutuhan untuk kegiatan pertanian hanya mengandalkan air hujan, sehingga sawah umumnya merupakan sawah tadah hujan. Adapun sungai yang melintasi desa Sabila merupakan sungai musiman yaitu pada waktu musim kemarau biasanya air sungai mengering sedangkan pada waktu musim hujan digunakan untuk pertanian sawah dan umumnya masyarakat memanfaatkan sebagai sumber air untuk lahan pertanian dan perkebunan.

g. Telekomunikasi dan Penerangan Listrik

Guna memenuhi kebutuhan akan informasi, secara umum diwilayah ini kantor desa/kelurahan dijadikan sebagai perantara karena kantor pos hanya terdapat di ibukota kecamatan. Adapun jaringan jaringan telekomunikasi sudah terlayani sebagian desa/kelurahan hal ini dikarenakan adanya satelit pemancar yang dapat di ibukota kecamatan Mallawa sehingga penggunaan jasa telekomunikasi sudah terjangkau oleh lapisan masyarakat. Sedang sumber penerangan listrik sudah terjangkau hingga keseluruh daerah desa/kelurahan di kecamatan Mallawa, disamping ada juga yang merupakan petromaks dan pelita sebagai sumber penerangan. Ketiga sumber penerangan tersebut, yang paling dominan digunakan adalah listrik dari PLN, yaitu sebanyak 4.424 KK atau 52.87 %, petromas sebanyak 729 KK atau 8.71 % dan pelita sebanyak 3.214 atau 38.41 %. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel: 4.11 Banyaknya Rumah Tangga di Kecamatan Mallawa Menurut Desa/kelurahan dan Sumber Penerangan yang Digunakan Tahun 2006

No	Kelurahan/Desa	PLN	Petromas	Pelita	Jumlah
1	Padaelo	354	72	330	756
2	Mattampapole	218	27	263	508
3	Tellumpanuae	378	10	354	742
4	Bentenge	289	19	110	418
5	Samaenre	242	43	200	485
6	Batu Putih	212	25	122	359
7	Wanua Waru	270	40	239	549
8	Sabila	987	100	45	1132
9	Barugae	366	70	234	670
10	Uludaya	414	148	386	948
11	Gattareng Matinggi	411	100	639	1150
		4.141	657	2.922	7.717

Sumber: Kec. Mallawa Dalam Angka Thn 2006

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa jumlah rumah tangga yang belum mendapat aliran listrik langsung dari PLN adalah 47.13 %.

Dari hasil pengamatan justru terlihat bahwa pada umumnya rumah tangga sudah menggunakan listrik, dimana rumah tangga yang sudah mendapat aliran listrik dari PLN mengalirkan aliran dari kerumah-rumah yang ada disekitarnya yang belum mendapatkan aliran listrik dengan sistem pemabayaran per mata lampu tiap bulan kepada sumber aliran listrik. Tidak terjaringnya aliran listrik tiap rumah bukan disebabkan oleh terbatasnya kapasitas listrik, melainkan kemampuan masyarakat untuk mendapatkan jaringan listrik dari PLN.



4. Potensi Sektor-Sektor Kegiatan Ekonomi

a. Sektor Pertanian dan Perkebunan

Tanaman pertanian yang diusahakan oleh penduduk sebagai potensi daerah sangat ditentukan oleh kondisi alam yang dimilikinya. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, dimana pada wilayah kecamatan Mallawa merupakan tanaman yang berbasis pada hujan, maka jenis tanaman dan produksi terbatas. Untuk pertanian sawah yang diusahakan dengan luas 1.993 Ha dengan produksi 1.032,75 ton. Disamping jenis tanaman tersebut, masyarakat setempat telah mengusahakan pada jenis tanaman palawija seperti jagung, kacang tanah, kacang merah, kacang panjang, kacang kedelai, kacang hijau, ubi kayu, ubi jalar. Jenis tanaman sayuran bawang merah, kankung cabe, tomat dan kacang-kacangan.

Sektor perkebunan yang berkembang di Kecamatan Mallawa adalah yaitu jenis tanaman kelapa serta tanaman jangka panjang, seperti kakao, kemiri, dll. Areal pengembangan sektor ini cukup luas sehingga untuk pengembangannya masih dapat dilakukan, baik perluasan areal maupun jenis populasi tanaman yang diusahakan. Namun tata cara pengelolaan perkebunan sebaiknya tidak dilakukan secara berpindah-pindah, hal ini dapat merusak ekosistem dan kelestarian hutan. Adapun masing-masing jenis tanaman yang diusahakan dan produksinya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel: 4.12 Luas Areal dan Produksi Pada Pertanian dan Perkebunan di Kecamatan Mallawa Menurut Desa/kelurahan Tahun 2006

No	Jenis Tanaman	Luas Tanaman (Ha)	Produksi (Ton)
A.	Pada Sawah		
1	Padaelo	56	29.12
2	Mattampapole	143	73.87
3	Tellumpanuae	385	199.68
4	Bentenge	351	182.00
5	Samaenre	319	165.88
6	Batu Putih	167	86.32
7	Wanua Waru	326	117.00
8	Sabila	34	17.16
9	Barugae	137	71.24
10	Uludaya	123	63.44
11	Gattareng Matinggi	52	27.04
	Jumlah	1.993	1.032,75
B	Jagung	286	76.95
C	Kacang Tanah	196	35.10
D	Kacang Kedelai	30	43.5
E	Kacang Merah	6	0.48
F	Kacang Panjang	5	0.25
G	Kajang Hijau	5	0.42
H	Ubi Jalar	5	9.00
I	Ubi Kayu	18	36.00
J	Bawang Merah	6	75.00
K	Kacang-kacangan	62	37.20
L	Kangkung	4	18.4
M	Cabe	16	11.1
N	Tomat	58	41.8
O	Kelapa	165	87.4
P	Kakao	451	47.86
Q	Kemiri	342	83.75
	Jumlah	1.655	604.21
	Jumlah Total	3.648	1.359,69

Sumber: Kec. Mallawa Dalam Angka Thn 2006

Berdasarkan uraian tabel diatas terlihat bahwa produktifitas tanaman pangan hanya mampu menghasilkan 2.68 ton/ha. Kondisi ini disebabkan karena areal persawahan masih terbatasnya jaringan irigasi. Pada saat selesai, para petani biasa menanam beberapa jenis tanaman

holtikultura, umbi-umbian, kacang-kacangan dan sayur-sayuran guna memenuhi kebutuhan hidup masyarakat, juga dipasarkan diberbagai tempat baik di pasar Kecamatan maupun daerah-daerah hinterlandnya.

b. Sektor Peternakan

Kegiatan pengembangan jenis ternak di Kecamatan Mallawa merupakan pengembangan yang masih dikelola secara tradisional. Hal tersebut dimungkinkan kurangnya popuasi ternak dimana jenis usaha yang dikelola oleh masyarakat adalah Sapi, Kambing dan Ayam Buras. Adapun jenis dan populasi ternak dikecamatan Mallawa tahun 2006 dapat dilahat pada tabek berikut

Tabel: 4.13 Populasi Ternak di Kecamatan Mallawa Menurut Desa/kelurahan Tahun 2006

No	Kelurahan /Desa	Sapi	Kerbau	Kuda	Kambing	Domba	Ayam Buras	Itik
1	Padaelo	-	10	-	250	-	675	-
2	Mattampapole	13	25	-	126	-	735	13
3	Tellumpanuae	10	15	-	182	-	846	10
4	Bentenge	10	29	12	87	-	1.420	10
5	Samaenre	17	35	4	97	-	1.917	17
6	Batu Putih	20	10	-	123	10	520	20
7	Wanua Waru	5	28	5	105	-	1.055	5
8	Sabila	47	95	-	47	-	1.253	47
9	Barugae	4	21	4	68	-	647	4
10	Uludaya	2	50	8	15	-	894	2
11	Gattareng Matinggi	25	20	-	25	25	1.342	25
	Jumlah	155	338	31	1.125	35	9.238	153

Sumber: Kec. Mallawa Dalam Angka Thn 2006

Berdasarkan Tabel tersebut diatas bahwa jenis ternak besar yang dominan dikembangkan oleh penduduk adalah Kerbau jenis ternak ini umumnya digunakan untuk membantu keperluan pekerjaan penduduk setempat, seperti membanjak sawah. Sedangkan populasi ternak kecil yang dominan dikelola oleh masarakat adalah Ayam Buras.

c. Sektor Industri

Pengembnagan dan jenis industri di kecamatan Mallawa masih dalam ketegori industri kecil dan rumah tangga, seperti industri penggilingan padi dan pembuat gula merah serta industri kerajinan

tangan. Industri ini diusahakan dengan suplai bahan baku lokal, seperti padi dan bahan kerajinan bambu dan kerajinan lainnya. Pada dasarnya jenis industri ini dapat lebih dikembangkan dimasa yang akan datang dengan ketersediaan bahan baku yang memadai dan pengelolaan yang lebih baik. Adapun jumlah dan jenis industri di Kecamatan Mallawa dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel: 4.14 Jumlah dan Jenis Usaha Industri di Kecamatan Mallawa Menurut Desa/kelurahan Tahun 2006



No	Kelurahan /Desa	Peng Padi	Gula Merah	Batu Bata	Kerajinan	Jumlah
1	Padaelo	1	-	-	-	1
2	Mattampapole	3	25	-	5	33
3	Tellumpanuae	2	14	-	10	26
4	Bentenge	4	10	12	-	26
5	Samaenre	6	24	23	-	53
6	Batu Putih	3	27	-	15	45
7	Wanua Waru	2	15	-	-	17
8	Sabila	7	12	-	8	27
9	Barugae	2	34	-	-	36
10	Uludaya	3	28	5	17	53
11	Gattareng Matinggi	3	21	-	-	24
Jumlah		36	210	40	55	341

Sumber: Kec. Mallawa Dalam Angka Thn 2006

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa jenis usaha lebih dominan yang dikelola bagi masyarakat adalah Industri pembuatan Gula Merah disusul industri kerajinan tangan. Hal ini disebabkan sumber bahan bakunya cukup banyak dan hanya merupakan usaha sampingan masyarakat untuk menambah pendapatan keluarganya.

d. Sektor Pertambangan

Jenis Kegiatan Tambang di kecamatan Mallawa berupa tambang Golongan C seperti Tambang Pasir dan kerikil serta tambang golongan B seperti Tambang Batu Bara. Jumlah pengusaha tambang sebanyak 23 yang dilakukan di dua daerah lokasi tambang, yaitu 15 usaha di Desa Sabila dan 8 usaha di Desa Tellumpanuae. Skala jangkauan jenis tambang tersebut bersifat lokal dan regional, dengan hasil

pemasaran hasil tambang baik di wilayah Kecamatan Mallawa dan wilayah kecamatan di sekitarnya serta sampai tingkat kabupaten dan Desa.

e. Sektor Usaha Jasa

Kegiatan pada sektor jasa yang ada di kecamatan Mallawa memiliki tingkat pelayanan lokal dengan 6 jenis kegiatan. Jenis kegiatan ini dilakukan oleh penduduk setempat dengan pemakaian tenaga kerja yang masih bersifat kekeluargaan. Adapun jumlah dan sektor jasa yang ada di Kecamatan Mallawa tahun 2006, dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel: 4.15 Jumlah dan Jenis Usaha Jasa di Kecamatan Mallawa Menurut Desa/kelurahan Tahun 2006

No	Kelurahan /Desa	Tk. Cukur	Salon	Montir	Servis Elektro	Tk. Jahit	Pres Ban	Jml
1	Padaelo	5	-	-	-	1	-	6
2	Mattampapole	-	-	-	-	1	2	3
3	Tellumpanuae	-	1	-	3	-	-	4
4	Bentenge	2	-	1	-	2	-	5
5	Samaenre	2	-	-	-	-	-	2
6	Batu Putih	-	1	2	1	1	-	6
7	Wanua Waru	-	-	1	-	-	1	2
8	Sabila	2	2	3	2	3	2	14
9	Barugae	1	1	-	-	-	-	2
10	Uludaya	2	-	3	1	-	1	7
11	Gattareng Matinggi	-	-	1	-	1	1	3
Jumlah		14	5	10	8	9	7	53

Sumber: Kec. Mallawa Dalam Angka Thn 2006

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa jenis usaha sektor jasa yang lebih dominan yang dikelola bagi masyarakat adalah Jasa Tukang Cukur disusul jasa montir dan paling sedikit adalah Salon Kecantikan. Pada sektor jenis usaha jasa pada kecamatan Mallawa tergolong masih terbatas. Hal ini disebabkan kurangnya tenaga terampil yang mandiri dan terbatasnya modal usaha untuk pengembangan sektor usaha jasa tersebut. Dengan demikian diharapkan kepada pemerintah setempat agar supaya menyusun program kerja dalam peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) perlu ada suatu program kerja seperti membangun sarana Pendidikan khusus Pelatihan-pelatihan dan

kursus-kursus keterampilan serta pembetulan Koperasi dan Bank Swasta sebagai mitra kerja sama untuk pengembangan usaha.

f. Sektor Perekonomian

Perekonomian suatu wilayah/ Desa dapat membantu meningkatkan taraf hidup dan kehidupan masyarakatnya. Perekonomian merupakan urat nadi perkembangan wilayah/ Desa, dimana aktifitas ekonomi masyarakat berdampak pada peningkatan arus pergerakan antar Desa/ daerah, suplai dan pasokan barang dan jasa, arus perputaran uang dan barang akan terus meningkat. Identifikasi terhadap sektor perekonomian yang ada di Kecamatan Mallawa terdapat beberapa fasilitas perekonomian, baik sebagai tempat jual beli maupun tempat simpan pinjam. Fasilitas perekonomian umumnya berlokasi di desa Matampapole dan desa Tellumpanuae, dimana kedua daerah ini berada pada bagian tengah wilayah kecamatan Mallawa, sehingga aksesnya mudah dijangkau oleh penduduk dari segala arah. Adapun jenis jumlah dan fasilitas perekonomian tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel: 4.16 Jumlah dan Jenis Sektor Perekonomian di Kecamatan Mallawa Menurut Desa/kelurahan Tahun 2006

No	Kelurahan /Desa	Pasar Umum	Toko	Kios	Rmh Mkn	Wrng	Bank	KUD	Jml
1	Padaelo	-	1	12	-	-	-	-	13
2	Mattampapole	1	5	15	1	5	-	1	27
3	Tellumpanuae	1	3	7	1	7	-	1	20
4	Bentenge	-	-	9	-	-	-	-	9
5	Samaenre	-	-	5	-	-	-	-	5
6	Batu Putih	-	1	2	-	-	1	1	5
7	Wanua Waru	-	-	4	-	-	-	-	4
8	Sabila	-	10	18	2	4	-	-	24
9	Barugae	-	1	6	-	-	-	-	7
10	Uludaya	-	1	3	-	-	-	-	4
11	Gattareng Matinggi	-	-	14	-	-	-	-	14
Jumlah		2	22	95	8	16	1	3	147

Sumber: Kec. Mallawa Dalam Angka Thn 2006

Dari tabel tersebut diatas terlihat bahwa penyebaran fasilitas perekonomian berdasarkan tingkatnya sudah memenuhi kebutuhan

penduduk setempat. Kios atau Kedai telah terdistribusi di setiap lingkungan permukiman dan pasar umum beroperasi sesuai hari besar pasar, yakni 3 kali seminggu. Waktu hari pasar tersebut mempercepat proses perdagangan hasil pertanian dan perkebunan penduduk setempat.

5. Prasarana dan Sarana Transfortasi.

a. Jaringan Jalan

Sistem transportasi yang baik didukung oleh prasarana yang memadai. Salah satu prasarana transportasi yang sangat vital adalah jaringan jalan. Ketersediaan jaringan jalan memudahkan hubungan antar berbagai lokasi dalam Desa dan antar Desa dengan Desa/ daerah lainnya. Distribusi barang dan aktifitas pergerakan manusia dapat dengan mudah dilakukan apabila jaringan jalan tersedia diseluruh lokasi Desa. Terdapat beberapa klasifikasi jaringan jalan yang dapat diidentifikasi diantaranya jalan aspal, jalan pengerasan dan jalan tanah. Disisi lain klasifikasi tersebut dapat pula dibedakan antara jaringan jalan arteri, jalan kolektor dan jalan lokal/ lingkungan.

Dengan demikian panjang jalan total diwilayah kecamatan Mallawa adalah 67,22 km yang terdiri dari atas 11,80 km jalan arteri 12,15 km jalan kolektor, 29,53 km jalan lokal dan 13,74 km jalan desa. Gambaran mengenai jaringan jalan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel: 4.16 Panjang Jalan di Kecamatan Mallawa Menurut Desa/kelurahan dan Kelasnya Tahun 2006

No	Kelurahan /Desa	Arteri (Km)	Kolektor (Km)	Lokal (Km)	Jln Desa (Km)	Jumlah
1	Padaelo	2.31	-	1.42	3.16	6.89
2	Mattampapole	1.53	-	1.07	0.93	3.53
3	Tellumpanuae	0.86	-	4.19	-	5.05
4	Bentenge	-	2.64	4.53	0.76	7.93
5	Samaenre	-	1.73	1.20	0.76	3.69
6	Batu Putih	2.06	1.35	0.39	4.01	7.81
7	Wanua Waru	-	1.56	1.14	0.92	3.62
8	Sabila	2.61	1.56	5.89	0.66	10.72
9	Barugae	2.43	0.68	1.60	-	4.71
10	Uludaya	-	2.63	0.87	2.54	6.04
11	Gattareng Matinggi	-	-	7.23	-	7.23
	Jumlah	11.80	12.15	29.53	13.74	67.22

Sumber: RUTR Kec. Mallawa Thn 2004

Dari tabel tersebut diatas terlihat bahwa Desa Sabila dan daerah hinterlandnya dilayani jalan lokal dan jalan desa atau jalan lingkungan. Berdasarkan hasil pengamatan bahwa kondisi jalan pengerasan dan sebagian jalan desa masih jalan tanah, sedangkan untuk jalan kolektor masih pengerasan dan sebagian beraspal, akan tetapi pada ruas jalan Arteri atau sebagai satu jalan utama, dalam hal ini termasuk Desa Sabila, desa Padaelo dan desa Mattampole dalam kondisi aspal. Disamping itu jalan arteri di fungsikan sebagai jalan utama yang menghubungkan antara kecamatan dan kabupaten.

b. Sarana Transportasi

Transportasi memegang peranan penting dalam pengembangan wilayah/ Desa. Pembangunan sistem transportasi yang handal membutuhkan dana/ investasi yang cukup besar. Ketersediaan sarana dan prasarana transportasi dapat membantu aksesibilitas yang tinggi terhadap masyarakat, sehingga arus mobilisasi baik orang maupun barang dapat dilakukan setiap saat. Peranan transportasi dapat membantu membuka akses antara daerah yang berkembang dengan daerah yang terisolasi/ terbelakang.



Sistem transportasi yang baik ditandai dengan tersedianya sarana dan prasarana transportasi seperti moda angkutan (kendaraan), jaringan jalan serta prasarana lain seperti terminal lokal angkutan, serta prasarana lainnya. Sehingga bila dicermati bahwa jumlah sarana transportasi di kecamatan Mallawa hingga tahun 2006 sebanyak 1.375 unit dari 6 jenis kendaraan, yaitu sepeda 447 atau 32.51 %

c. Pengelolaan Sampah.

Pengelolaan sampah yang dilakukan oleh masyarakat di kecamatan Mallawa adalah dengan cara menanam sampah dan sebagian melakukan pembakaran sampah. Pelayanan pengangkutan sampah belum terjangkau dan masih terfokus pada pelayanan pengangkutan pada daerah pusat Desa kabupaten Maros. Tidak adanya jangkauan pelayanan pengangkutan sampah disebabkan oleh masih terbatasnya sarana pengangkutan yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Sedangkan lokasi pembuangan sampah di kecamatan Mallawa tidak ada karena masyarakat hanya melakukan penimbunan dan pembakaran sampah pada lahan yang dimilikinya, dimana sumber sampah tersebut dihasilkan.

Untuk mengetahui indikator permasalahan yang ditimbulkan sistem sanitasi lingkungan pada kecamatan Mallawa dapat dilakukan dengan melihat jenis penyakit yang pernah diderita oleh masyarakat. Berdasarkan data yang diperoleh, jenis penyakit yang sering dialami oleh masyarakat setempat adalah demam berdarah dan belum pernah ada yang terserang penyakit kolera, dimana sumber penyakit ini dari sistem sanitasi yang kurang baik.

6. Lembaga kemasyarakatan

Dalam rangka pembangunan wilayah perdesaan, penguatan lembaga masyarakat sangat penting dan potensial keberadaannya. Jenis lembaga kemasyarakatan di kecamatan Mallawa yang berperan dalam memotivasi masyarakat adalah sebanyak 7 organisasi. Berdasarkan dari

hasil wawancara yang telah dilakukan dengan pihak kecamatan dan kelurahan serta masyarakat setempat, maka secara umum dapat digambarkan sebagai berikut :

- a. badan perwakilan desa (BPD), jumlah anggota pengurus tiap BPD adalah 10 orang/desa/kelurahan, dengan frekuensi pertemuan yang telah dilakukan adalah sebanyak 40 kali selama tahun 2004.
- b. Lembaga pembangunan desa(LMD/LPD), rata-rata anggota pengurus adalah 13 orang dan telah aktif dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan desa.
- c. Lembaga ketahanan masyarakat desa (LKMD), hanya terdapat pada setiap wilayah kelurahan, kecuali pada desa Samaenre yang berbatasan langsung dengan ibuDesa kecamatan. Status LKMD tersebut adalah type II.
- d. PKK, anggotanya adalah kaum perempuan dan telah aktif beberapa kali dalam kegiatan pelatihan rumah tangga.
- e. Organisasi petani, yang terdiri atas P2A, Wanita tani, dan kelompok petani . Masing-masing organisasi tersebut telah aktif melakukan program kegiatan dengan jumlah anggota 10-25 orang per kelompok.
- f. Organisasi keagamaan, terdiri atas remaja Masjid dan TPA. Jumlah masing-masing organisasi tersebut sesuai dengan jumlah masjid pada setiap desa/kerluurahan.
- g. Organisasi pemuda, masing-masing desa/kelurahan terdapat 1 kelompok dengan jumlah anggota 50 orang.
- h. Kelompok gotong royong, umumnya tiap desa/kelurahan terdapat 3-5 kelompok dan sebanyak 50 orang perkelompok.

7. Partisipasi Masyarakat

Dalam rangka mempercepat proses pembangunan, khususnya pada daerah pedesaan maka pendekatan pembangunan yang efektif untuk dilakukan adalah pembangunan yang melibatkan masyarakat secara langsung atau tidak pada setiap kegiatan pembangunan.

Berdasarkan hasil wawancara dari pihak pimpinan kecamatan dan beberapa kepala desa dan tokoh masyarakat bahwa secara umum masyarakat kecamatan Mallawa masih kurang memiliki kesadaran untuk melibatkan dirinya dalam setiap kegiatan pembangunan desa, hal terjadi, dimana sebagian besar masyarakat menganggap bahwa yang berkaitan dengan pembangunan adalah bersifat proyek dan yang bertanggung jawab atas pelaksanaannya adalah pemerintah.

Secara sepintas jika diamati kondisi masyarakat di kecamatan Mallawa, khususnya pada lokasi penelitian masih sulit menerapkan konsep pembangunan yang partisipatif. Salah satu penyebabnya adalah tingkat pendidikan yang relatif rendah dan adanya tuntutan hidup yang semakin tinggi, sehingga sebagian besar waktunya dipergunakan untuk bekerja dengan memenuhi kebutuhan keluarga.

D. Tinjauan Khusus Desa Sabila

1. Identifikasi Fisik Dasar Wilayah Studi

Tujuan dari identifikasi ini adalah untuk mengetahui karakteristik fisik yang akan diteliti dan menemukannya berbagai potensi dan kendala fisik dasar yang ada di wilayah studi. Berbagai aspek fisik dasar yang diidentifikasi antara lain kondisi topografi kawasan, keadaan hidrologi, geologi dan struktur tanah, kondisi iklim.










a. Kondisi Topografi

Topografi wilayah Studi (Desa Sabila), merupakan salah satu aspek fisik dasar yang menjadi bahan pertimbangan dan kajian penulisan ini. Desa yang berada pada daerah dataran tinggi biasanya lebih mengarah pada perencanaan Desa agropolitan, dimana secara umum lahan yang ada adalah pertanian dan perkebunan. Desa sabila berada pada ketinggian 315 meter diatas permukaan laut, bentuk permukaan tanah yang bervariasi, mulai dari datar, bergelombang/ berbukit hingga pegunungan.

Gambar :

PETA LOKASI DPP KTP2D SABILA

Keterangan :

-  DPP Sabila
-  Batas Kabupaten/ Kota
-  Batas Desa
-  Batas Dusun
-  Jalan Aspal
-  Sungai
-  Dusun Topoing
-  Dusun Lappabinare
-  Dusun Ladange

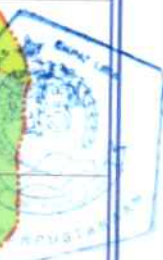
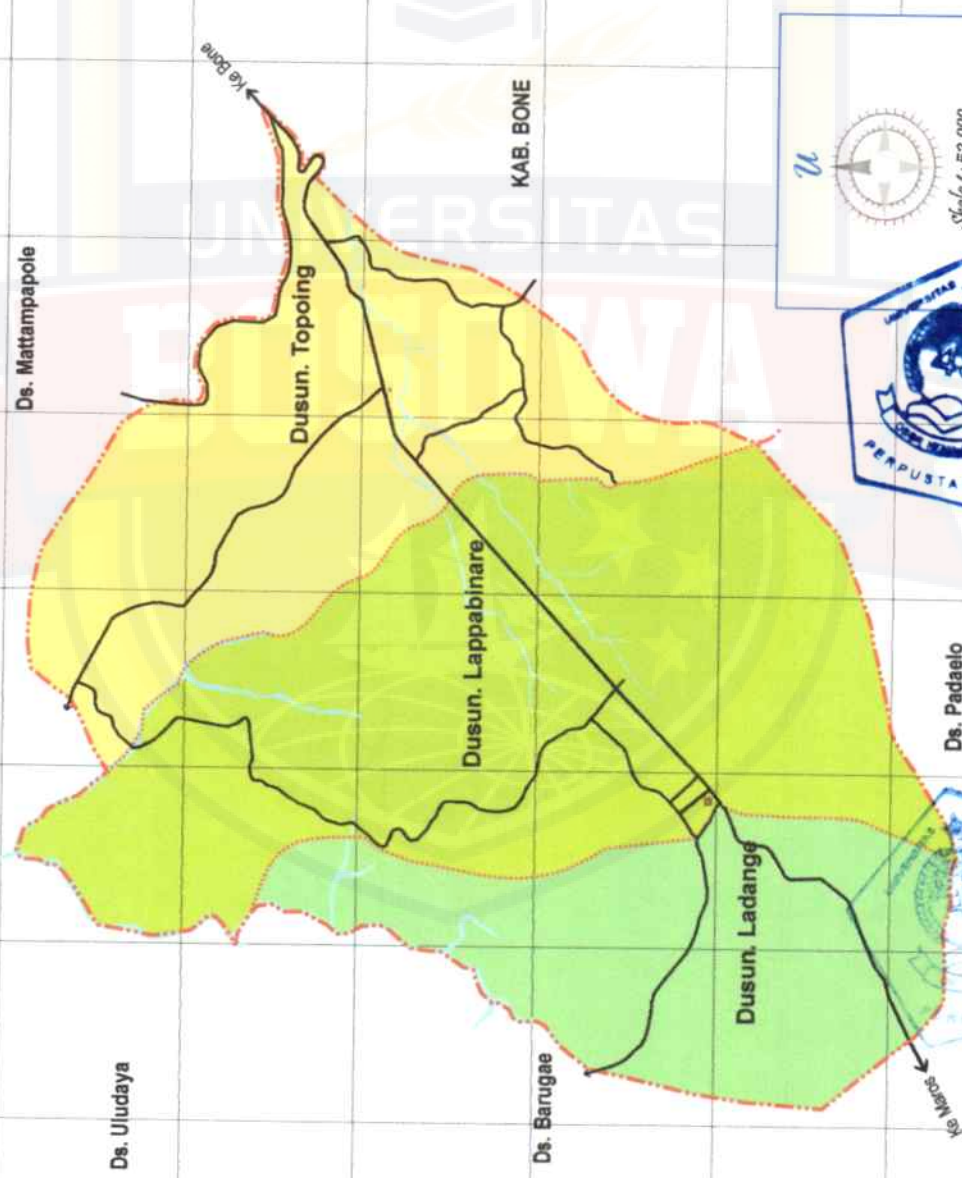
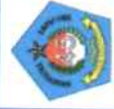
PEMBIMBING

1. Ir. Muh. Fathien Azmy, Msi
2. Ir. Muh Ridwan, Msi
3. Ir. Nursyam Aksa, Msi

MAHASISWA/STB

IRWAN IDRIS
45 92 042 005

JURUSAN TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS "5"
MAKASSAR 2007



b. Hidrologi

“Air adalah sumber kehidupan” Istilah tersebut bukan hanya merupakan semboyan belaka, tetapi pada kenyataannya bahwa semua makhluk hidup membutuhkan air. Pemanfaatan sumberdaya air secara bijak dapat menjaga kelangsungan hidup seluruh makhluk hidup. Kebutuhan air bagi masyarakat perdesaan sangat diperlukan untuk berbagai keperluan, khususnya untuk dikonsumsi. Perolehan air bersih untuk kebutuhan penduduk pada Kawasan Perencanaan bersumber dari mata air pegunungan yang dialirkan ke rumah-rumah penduduk serta menggunakan air tanah (sumur).

c. Geologi/ Struktur Tanah

Kondisi Geologi dan struktur tanah di Desa Sabila secara umum merupakan cerminan kondisi geologi/ struktur tanah di wilayah Kecamatan Mallawa. Dimana kondisi geologi/ struktur tanah yang ada berupa jenis tanah alluvial coklat kekuningan, intermedier dan andosol, dengan jenis batuan-batuan organik, dan batuan beku/ vulkanik.

d. Iklim/ Klimatologi

Kondisi iklim/ klimatologi Desa Sabila secara umum dipengaruhi oleh iklim sub tropis dengan 2 (dua) musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan dengan curah hujan rata-rata berkisar 250 mm/ tahun. Kondisi iklim ini sangat mendukung dengan potensi pengembangan kawasan Desa dengan konsep Desa agropolitan, yaitu pengembangan Desa yang berbasis pada kegiatan pertanian dan perkebunan.

2. Pola Penggunaan Lahan

Identifikasi pola penggunaan lahan di Desa Sabila menunjukkan bahwa dominasi lahan pertanian dan perkebunan masih tinggi, hal ini dapat dilihat dari luasnya hamparan lahan persawahan dan kebun di Desa Sabila. Beberapa jenis penggunaan lahan yang ada di Desa Sabila, antara lain lahan persawahan, kebun, kebun campuran, hutan, lahan



terbangun (permukiman, perkantoran, pendidikan, kesehatan, peribatan, dll), tegalan, dan berbagai jenis penggunaan lahan lainnya.

Untuk lebih jelasnya jenis penggunaan lahan di Desa Sabila dapat dilihat pada tabel berikut.:

**Tabel: 4.17 Jenis Penggunaan Lahan di Desa Sabila
Tahun 2006**

NO	POLA PENGGUNAAN LAHAN DI DESA SABILA		
	Jenis Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Presentase (%)
1	Permukiman & Bangunan	58,70	3,85
2	Lainnya	32,15	2,11
3	Persawahan	330,00	21,62
4	Ladang/ Tegalan	378,20	24,78
5	Perkebunan	571,00	37,41
6	Hutan	1,20	0,08
7	Perikanan		
8	Lain-Lain	155,00	10,16
	-Tandus	-	-
	-Kritis		
JUMLAH		1526,25	100,00

Sumber: Data Potensi Kelurahan, Tahun 2007

3. Karakteristik Kependudukan

Dalam proses pembangunan berkelanjutan pada dasarnya bertumpuh pada tiga faktor yaitu kondisi sumberdaya alam, kependudukan dan kualitas lingkungan. Penduduk merupakan obyek sekaligus subyek dalam kegiatan pembangunan, sehingga dapat dikatakan sebagai variabel utama dari setiap segi kehidupan. Pembangunan perdesaan berkaitan erat dengan pencapaian berbagai sasaran pokok pembangunan khususnya yang berkaitan dengan kependudukan, seperti pemerataan dan pertumbuhan ekonomi, peningkatan lapangan kerja, pendapatan masyarakat serta pemberantasan kemiskinan. Partisipasi masyarakat merupakan bagian tak terpisahkan dalam penataan ruang perdesaan. Sebagai subyek dan obyek pembangunan, setiap orang merupakan bagian dari masyarakat yang

mempunyai hak atas hasil-hasil yang dicapai dalam kegiatan pembangunan perDesaan. Beberapa uraian mengenai kependudukan antara lain perkembangan jumlah penduduk, pola distribusi penduduk, jumlah penduduk berdasarkan usia dan jenis kelamin, dan berbagai uraian mengenai kependudukan lainnya.

a. Laju Perkembangan/ Pertumbuhan Penduduk

Peningkatan jumlah penduduk yang pesat dapat menyebabkan terganggunya sistem keseimbangan alam (perubahan ekosistem) terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan. Jumlah penduduk yang relatif besar akan membawa perubahan terhadap daya tampung dan daya dukung lahan. Peningkatan jumlah penduduk juga menimbulkan permasalahan seperti penyediaan lapangan kerja, pelayanan kesehatan, pendidikan dan lain-lain.

Berdasarkan data hasil survey, rata-rata tingkat pertumbuhan jumlah penduduk di Desa Sabila dalam periode tahun 2002 – 2006 adalah 38 jiwa/ tahun. Tingkat pertumbuhan tersebut mengalami fluktuasi. Hal ini disebabkan karena adanya tingkat kelahiran, kematian dan migrasi penduduk. Berdasarkan data, terlihat bahwa perkembangan jumlah penduduk tertinggi terjadi pada periode tahun 2005/ 2006 yaitu mencapai 102 jiwa, sedangkan periode tahun 2004/ 2005 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu 1.036 (tahun 2004) turun menjadi 1.032 (tahun 2005). Untuk lebih jelasnya perkembangan jumlah penduduk di Desa Sabila dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel: 4.18 Perkembangan Jumlah Penduduk di Desa Sabila Periode 5 Tahun Terakhir (2002 – 2006)

NO	PERKEMBANGAN PENDUDUK DESA SABILA		
	Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Perkembangan
1	2002	942	0
2	2003	1.026	84
3	2004	1.036	10
4	2005	1.032	-4
5	2006	1.134	102
RATA-RATA/ TAHUN			38

Sumber: Kec. Mallawa Dalam Angka, Tahun 2006

b. Distribusi & Kepadatan Penduduk

Selain pertumbuhan jumlah penduduk, distribusi penduduk juga dapat menimbulkan permasalahan lain seperti penyediaan lapangan kerja, pelayanan kesehatan, pendidikan dan lain-lain. Distribusi jumlah penduduk pada tahun 2006 sebanyak 1.134 Jiwa yang tersebar di 3 (tiga) lingkungan. Konsentrasi penduduk terbesar terdapat di Lingkungan Topoing yaitu sebanyak 431 jiwa atau 38,01%, sedangkan konsentrasi penduduk terkecil terdapat di Lingkungan Lappa Binare yaitu sebanyak 291 Jiwa atau 5,66% terhadap total jumlah penduduk di Kelurahan Sabila. Untuk lebih jelasnya distribusi penduduk di Desa Sabila dapat dilihat pada tabel dan gambar peta berikut.

Tabel: 4.19 Distribusi Penduduk di Desa Sabila Tahun 2006

NO	DISTRIBUSI PENDUDUK DESA SABILA		
	Dusun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Peresentase (%)
1	Ladange	412	36,33
2	Lappa Binare	291	25,66
3	Topoing	431	38,01
JUMLAH		1.134	100,00

Sumber: Kec. Mallawa Dalam Angka, Tahun 2006



Beberapa faktor yang mempengaruhi pola distribusi penduduk tersebut diatas antara lain, penduduk biasanya bermukim dekat dengan tempat aktifitasnya, akses yang mudah dicapai, dan berbagai faktor lainnya.

c. Struktur Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

Identifikasi penduduk berdasarkan kelompok umur dimaksudkan untuk mengetahui proporsi penduduk antara usia produktif dengan usia non produktif. Identifikasi ini diharapkan mampu mengetahui tingkat kemampuan sumberdaya manusia yang ada di Kawasan Perencanaan. Untuk lebih jelasnya struktur penduduk berdasarkan kelompok umur dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel: 4.20 Struktur Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur di Desa Sabila, Tahun 2006

NO	STRUKTUR PENDUDUK BERDASARKAN KELOMPOK UMUR			
	Kelompok Umur	Jumlah Penduduk (Jiwa)		Jumlah (Jiwa)
		Laki-Laki	Perempuan	
1	0 – 4	51	57	108
2	5 – 9	54	46	100
3	10 – 14	42	47	89
4	15 – 19	56	49	105
5	20 – 24	35	46	81
6	25 – 29	44	53	97
7	30 – 34	38	49	87
8	35 – 39	43	51	94
9	40 – 44	39	42	81
10	45 – 49	47	49	96
11	50 – 54	35	24	59
12	55 – 59	24	29	53
13	60 – 64	17	16	33
14	65 – Keatas	20	31	51
JUMLAH		545	589	1.134

Sumber: Hasil Survey Instansional, Tahun 2007

Berdasarkan tabel tersebut diatas, menunjukkan bahwa kelompok penduduk usia Balita (0 – 4) tahun adalah usia yang

paling tinggi yaitu 108 jiwa, kemudian kelompok usia 15 – 19 tahun yaitu 105 jiwa dan usia 5 – 9 tahun yaitu 100 jiwa. Sedangkan kelompok usia yang paling rendah jumlahnya yaitu kelompok usia antara 60 – 64 tahun yaitu 33 jiwa, dan usia lanjut (65 – keatas) yaitu 51 jiwa. Dari data tersebut menunjukkan bahwa kelompok usia anak-anak (usia sekolah) lebih dominan di Desa Sabila, sehingga untuk perencanaan pengembangan Desa ke depan, aspek penyediaan sarana dan prasarana pendidikan lebih difokuskan, agar ketersediaan sumberdaya manusia lebih produktif dan memiliki daya saing yang tinggi.

d. Struktur Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pendidikan mempunyai peranan penting bagi suatu bangsa, sebab merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan sumberdaya manusianya. Sumberdaya manusia (SDM) yang berkualitas sangat penting artinya dalam pembangunan. Indikator pendidikan dapat mengukur sejauh mana perkembangan wawasan, aspirasi dan keterampilan penduduk dalam meningkatkan kemampuannya mengelola sumberdaya alam serta mengembangkan hubungan sosialnya.

Penduduk Desa Sabila pada tahun 2006 berjumlah 1.134 jiwa. Jumlah penduduk yang pernah sekolah sebanyak 935 jiwa, namun dari jumlah tersebut terdapat penduduk yang tidak tamat. Ini menunjukkan bahwa Sumberdaya Manusia (SDM) di Desa Sabila terakumulasi dalam kategori masih relatif rendah, dimana jumlah penduduk yang belum sekolah maupun yang putus sekolah cukup besar.

Untuk lebih jelasnya struktur penduduk berdasarkan tingkat pendidikan di Desa Sabila dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel: 4.21 Struktur Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Desa Sabila, Tahun 2006

NO	STRUKTUR PENDUDUK BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN		
	Tingkat Pendidikan	Penduduk (Jiwa)	Presentase (%)
1	Tidak/ Belum Sekolah	199	17,55
2	Tidak Tamat Sekolah Dasar	299	26,37
3	Sekolah Dasar	354	31,22
4	Sekolah Menengah pertama	114	10,05
5	Sekolah Menengah Umum	132	11,64
6	Perguruan Tinggi	36	3,17
JUMLAH		1.134	100,00

Sumber: Data Potensi Kelurahan, Tahun 2007

Berdasarkan data tersebut diatas terlihat bahwa presentase penduduk dengan kategori pendidikan rendah masih lebih dominan di Desa Sabila, dimana penduduk yang bersekolah (tamat SD) sebanyak 354 jiwa atau 31% dari total jumlah penduduk yaitu 1.134 jiwa. Sedangkan penduduk dengan kategori berpendidikan tinggi (Perguruan Tinggi) hanya 36 jiwa atau 3,17 % dari total jumlah penduduk.

e. Struktur Penduduk Berdasarkan Agama & Kepercayaan

Struktur penduduk menurut agama tahun 2006 di Desa Sabila yang berjumlah 1.134 jiwa, secara umum adalah pemeluk agama Islam atau 100 %. Hal ini ditandai dengan aktifitas keagamaan yang berlangsung berupa kegiatan keagamaan yang bernuansa Islam antara lain pengajian dan perayaan hari-hari besar Islam, ditunjang pula dengan fasilitas keagamaan yang ada di Desa Sabila berupa Masjid/ Mushallah. Untuk lebih jelasnya struktur penduduk berdasarkan agama dan kepercayaan di Desa Sabila Dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel: 4.22 Struktur Penduduk Berdasarkan Agama & Kepercayaan
Di Desa Sabila, Tahun 2006**

NO	STRUKTUR PENDUDUK BERDASARKAN AGAMA & KEPERCAYAAN		
	Agama/ Kepercayaan	Penduduk (Jiwa)	Presentase (%)
1	Islam	1.134	100
2	Kristen	-	-
3	Hindu	-	-
4	Budha	-	-
5	Kepercayaan	-	-
JUMLAH		1.134	100,00

Sumber: Data Potensi Kelurahan, Tahun 2007

f. Budaya/ Adat Istiadat

Aspek budaya/ adat istiadat masyarakat merupakan salah satu kajian utama terhadap pengembangan suatu Desa, dimana sosial budaya masyarakat dapat menentukan ciri/ model pengembangan Desa tersebut. Pengembangan suatu Desa diharapkan mampu mengakomodir perilaku atau pola hidup masyarakat pada Wilayah Studi (Desa Sabila) sehingga budaya masyarakat lokal tetap bertahan, seiring dengan perkembangan Desa tersebut.

Desa yang berkembang dengan pesat biasanya mudah dipengaruhi oleh budaya-budaya luar, akibat perkembangan arus teknologi dan informasi yang terus berkembang dan menjangkau hampir seluruh wilayah/ Desa yang ada di Indonesia, termasuk di Kecamatan Mallawa. Budaya/ adat istiadat yang masih tetap dipertahankan hingga saat ini di Desa Sabila antara lain perilaku gotong-royong masyarakat, perayaan hari-hari besar keagamaan, pesta perkawinan, dan beberapa budaya-budaya lokal lainnya yang masih ada sampai sekarang.

4. Identifikasi Aspek Perekonomian

Perekonomian suatu wilayah/ Desa dapat membantu meningkatkan taraf hidup dan kehidupan masyarakatnya. Perekonomian merupakan urat nadi perkembangan wilayah/ Desa, dimana aktifitas ekonomi masyarakat

berdampak pada peningkatan arus pergerakan antar Desa/ daerah, suplai dan pasokan barang dan jasa, arus perputaran uang dan barang akan terus meningkat.

Identifikasi terhadap sektor ekonomi yang ada di Desa Sabila menunjukkan bahwa terdapat beberapa sektor-sektor yang berkembang dan diusahakan oleh masyarakat, antara lain sektor pertanian tanaman pangan, sektor perkebunan, sektor perdagangan, dan sektor industri kecil.

a. Sektor pertanian Tanaman Pangan

Sektor pertanian tanaman pangan yang diusahakan oleh masyarakat Desa Sabila yaitu tanaman padi sawah. Sektor ini merupakan kegiatan utama masyarakat di Desa Sabila. Perluasan areal pengembangan sektor pertanian tanaman pangan memiliki keterbatasan, dimana areal persawahannya merupakan sawah tadah hujan, serta tidak memiliki sistem irigasi teknis.

b. Sektor Perkebunan

Sektor perkebunan yang berkembang di Desa Sabila adalah kebun dengan tanaman jangka panjang, seperti kakao, kemiri, dll. Areal pengembangan sektor ini cukup luas sehingga untuk pengembangannya masih dapat dilakukan, baik perluasan areal maupun jenis populasi tanaman yang diusahakan. Namun tata cara pengelolaan perkebunan sebaiknya tidak dilakukan secara berpindah-pindah, hal ini dapat merusak ekosistem dan kelestarian hutan, khususnya kawasan hutan lindung yang ada di wilayah Desa Sabila dan daerah sekitarnya.

c. Sektor Perdagangan

Sektor perdagangan yang berkembang di Desa Sabila, adalah perdagangan hasil-hasil usaha masyarakat di Desa Sabila itu sendiri, seperti produk hasil pertanian, perkebunan, dll. Namun yang menjadi kendala dalam pemasaran hasil produksi yang ada di Desa Sabila yaitu tidak tersedianya sarana perdagangan (pasar umum) di

Desa Sabila, sehingga untuk melakukan transaksi jual beli, masyarakat membawa barang dagangannya ke desa lain.

d. Sektor Industri Kecil

Sektor industri kecil yang terdapat di Desa Sabila, berupa industri penggilingan padi dan industri kerajinan. Industri ini diusahakan dengan suplai bahan baku lokal, seperti padi dan bahan kerajinan bambu dan kerajinan lainnya. Pada dasarnya jenis industri ini dapat lebih dikembangkan dimasa yang akan datang dengan ketersediaan bahan baku yang memadai dan pengelolaan yang lebih baik.

5. Identifikasi Aspek Perumahan/ Permukiman

Perumahan/ permukiman adalah salah satu kebutuhan utama (primer) bagi manusia untuk melangsungkan hidup dan kehidupannya, baik dimasa sekarang maupun dimasa yang akan datang. Salah satu tolak ukur kemajuan pembangunan suatu Desa dapat ditinjau dari segi ketersediaan perumahan/ permukiman yang memadai dan layak huni bagi masyarakat Desa. Beberapa aspek mengenai perumahan/ permukiman yang diidentifikasi pada Wilayah Studi, diantaranya tipe kapling rumah, kondisi bangunan rumah, status kepemilikan, dan berbagai aspek perumahan/ permukiman lainnya.

a. Kepadatan Bangunan Perumahan/ Permukiman

Perumahan/ permukiman adalah merupakan salah satu kebutuhan primer penduduk, sebagai tempat untuk melangsungkan hidup dan kehidupan. Pemenuhan kebutuhan perumahan/ permukiman harus memperhatikan standar rumah yang sehat dan layak huni, dimaksudkan agar pola pengembangan perumahan/ permukiman tidak berdampak pada kondisi yang kumuh di kawasan perdesaan.

Terdapat 2 (dua) klasifikasi permukiman/ perumahan yang dapat diidentifikasi di Kota Sabila yaitu klasifikasi permanen, non permanen. Hal ini dimaksudkan karena pada umumnya model rumah di Kota Sabila adalah rumah panggung, sehingga untuk membedakan mana yang permanen, semi permanen dan temporer sulit ditentukan.

**Tabel: 4.24 Klasifikasi Perumahan/ Permukiman di Desa Sabila
Tahun 2007**

NO	KLASIFIKASI PERUMAHAN/ PERMUKIMAN DI DESA SABILA	
	Klasifikasi Perumahan/ Permukiman	Jumlah (Unit)
1	Rumah Permanen	75
2	Rumah Non Permanen	192
3	Lainnya	-
JUMLAH		267

Sumber: Inventarisasi Perumahan & Permukiman Kab Maros, Tahun 2006

b. Tipe Kapling

Berdasarkan hasil identifikasi mengenai tipe kapling perumahan/ permukiman di Desa Sabila, terlihat bahwa tidak ada batasan/ ukuran yang baku dan jelas mengenai tipe-tipe kapling bangunan. Hal ini dapat terjadi karena kapling rumah umumnya menyatu dengan pekarangan dan kebun milik masyarakat. Dalam kajian ini hanya dapat diidentifikasi mengenai perbedaan antara kapling rumah panggung dengan kapling rumah batu, dimana model kapling rumah batu lebih teratur dan ukuran luasannya lebih kecil, sedangkan kapling rumah panggung modelnya tidak beraturan dan tipe kaplingnya pun lebih luas. Namun dalam kajian ini tidak dapat diketahui secara jelas dari ukuran masing-masing kapling tiap bangunan rumah.

c. Kondisi Bangunan Rumah

Kondisi bangunan rumah mencerminkan tingkat kehidupan penghuninya, baik ditinjau dari segi sosial ekonominya maupun dari aspek kesehatan lingkungannya. Semakin baik kondisi bangunan rumahnya, maka dapat dikatakan bahwa semakin tinggi pula taraf hidup penghuninya. Beberapa hal yang menjadi dasar dalam menentukan kondisi suatu unit bangunan rumah, diantaranya kondisi fisik bangunan, model dan besaran bangunan serta tingkat kesehatan lingkungan

sekitarnya. Hasil identifikasi menunjukkan bahwa bangunan rumah secara umum yang ada di Desa Sabila adalah bangunan rumah berbentuk rumah panggung, dan sebagian lagi adalah rumah permanen dengan model rumah batu.



d. Pola Kawasan Perumahan/ permukiman

Pola kawasan perumahan/ permukiman mencerminkan arah perkembangan Desa. Pola permukiman yang berbentuk linear menunjukkan bahwa arah perkembangan Desanya akan berbentuk linear pula, sedangkan pola permukiman yang terpusat pada suatu kawasan, maka bentuk Desanya juga akan terpusat.

Berdasarkan hasil identifikasi mengenai pola kawasan perumahan/ permukiman di Desa Sabila, dapat diketahui bahwa pola yang terbentuk umumnya adalah pola linear, yaitu pola yang mengikuti ruas jalan-jalan utama. Pola penyebaran perumahan/ permukiman ini menyebabkan tidak adanya konsentrasi/ kepadatan perumahan/ permukiman yang padat pada kawasan tertentu. Dari segi tingkat aksesibilitas antar kawasan, pola penyebaran perumahan/ permukiman ini menyebabkan jarak antar lokasi yang berjauhan, sehingga untuk pengembangan sarana dan prasarana perDesaan memerlukan biaya yang tinggi dan lokasi penempatan sarana dan prasarana yang sulit ditentukan.

Untuk lebih jelasnya pola distribusi tata ruang obyek perdesaan Desa Sabila dapat dilihat pada gambar berikut.

6. Identifikasi Aspek Fasilitas dan Infrastruktur Desa

Desa yang berkembang ditandai dengan tersedianya berbagai jenis fasilitas dan infrastruktur. Semakin lengkap fasilitas dan infrastruktur suatu Desa, maka tingkat pelayanan masyarakat juga akan meningkat. Identifikasi terhadap ketersediaan fasilitas dan infrastruktur Desa tersebut dimaksudkan untuk mengetahui tingkat pelayanan yang telah ada dan

estimasi kebutuhan dimasa yang akan datang, baik kuantitas maupun kualitasnya serta jangkauan pelayanannya.

a. Fasilitas Perdesaan

Terdapat beberapa fasilitas perDesaan yang dapat diidentifikasi di Desa Sabila, baik fasilitas pemerintahan, fasilitas umum maupun fasilitas lainnya yang diusahakan oleh masyarakat, seperti permukiman/ perumahan penduduk, warung/ kios, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya.

❖ Perkantoran & Bangunan Umum

Tingkat pelayanan masyarakat terhadap keberadaan fasilitas perkantoran dan bangunan umum/ pelayanan umum sangat tergantung dari ketersediaan dari sarana tersebut. Semakin banyak fasilitas perkantoran/ bangunan umum lainnya, maka semakin tinggi pula tingkat pelayanan yang diberikan kepada masyarakat di kawasan perdesaan tersebut. Keberadaan sarana

Di Desa Sabila terdapat beberapa jenis perkantoran dan bangunan umum baik sarana perkantoran pemerintahan maupun sarana pelayanan umum lainnya, seperti: Kantor Desa, Kantor Polisi (Polsek), kantor PPK, Bank Rakyat Indonesia (BRI), dan lain-lain.

Hal tersebut tidak hanya melayani masyarakat dalam Desa itu sendiri, melainkan juga melayani masyarakat di luar Desa/ daerah sekitarnya.



Tabel: 4.25 Jenis & Jumlah Sarana Perkantoran & Bangunan Umum di Desa Sabila, Tahun 2007

NO	JENIS & JUMLAH SARANA PERKANTORAN & BANGUNAN UMUM	
	Jenis Sarana Perkantoran & Bangunan Umum	Jumlah (Unit)
1	Kantor Desa	1
2	Kantor Polisi (Polsek)	1
3	Kantor PPK	1
4	Kantor BRI	1
5	Balai Nikah	1
6	Balai Pertemuan	1
7	Penginapan	1
JUMLAH		7

Sumber: Data Hasil Survey Lapangan, Tahun 2007



Berdasarkan hasil identifikasi sarana perkantoran dan bangunan umum lainnya di Desa Sabila, jumlah tersebut masih belum memenuhi kebutuhan yang memadai untuk kategori. Namun untuk pengembangan kedepan diharapkan adanya peningkatan baik jumlah maupun kualitasnya.

❖ Pendidikan

Pendidikan adalah merupakan salah satu tujuan utama pembangunan, dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang memiliki kemampuan transformasi diri dan daya saing yang tinggi dalam rangka menggerakkan roda pembangunan di yang dilaksanakan baik dimasa sekarang maupun yang akan datang.

Banyaknya sarana pendidikan di Desa Sabila, berdasarkan tingkatannya yaitu terdapat 1 unit Sekolah Menengah Umum (SMU), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan beberapa unit Sekolah Dasar (SD) dan Taman Kanak-Kanak (TK).

Pada Tahun 2007 di Desa Sabila, tingkat partisipasi masyarakat dalam dunia pendidikan perlu ditingkatkan, dimana data jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan masih tergolong rendah. Sebagaimana yang dicanangkan pemerintah dalam program pendidikan wajib belajar 9 (sembilan) tahun yang berorientasi pada pembentukan sumberdaya manusia (SDM) yang handal dan profesional, maka harus diimbangi dengan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai serta diikuti dengan peningkatan kualitas pengajarnya. Untuk lebih jelasnya jenis dan jumlah sarana pendidikan di Desa Sabila dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut.

Tabel: 4.26 Jenis & Jumlah Sarana Pendidikan di Desa Sabila Tahun 2007

NO	JENIS & JUMLAH SARANA PENDIDIKAN DI DESA SABILA	
	Jenis Sarana Pendidikan	Jumlah (Unit)
1	Taman Kanak-Kanak (TK)	1
2	Sekolah Dasar (SD)	2
3	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	1
4	Sekolah Menengah Umum (SMU)	1
5	Perguruan Tinggi (PT)	-
JUMLAH		5

Sumber: Data Hasil Survey Lapangan, Tahun 2007

Berdasarkan data tersebut diatas terlihat bahwa sarana pendidikan tingkat Taman Kanak-Kanak masih kurang, yaitu hanya terdapat 1 unit. Oleh karena itu diharapkan pengembangannya dimasa yang akan datang lebih ditingkatkan khususnya dari segi jumlah sarana pendidikan tingkat Taman Kanak-Kanak (TK).



❖ Kesehatan

Jumlah fasilitas kesehatan di Desa Sabila tahun 2007 berjumlah 4 unit berupa Puskesmas 1 unit dan posyandu 3 unit. Lokasi Puskesmas berada pada pusat Desa Sabila, sedangkan Posyandu lokasi berada pada masing-masing lingkungan. Selain sarana penunjang belum memadai, maka perlu pula ditunjang oleh tenaga medis yang terlatih dan profesional serta ahli dibidangnya, disamping tingkat ketersediaan obat yang cukup memadai. Untuk lebih jelas dapat jenis dan jumlah sarana kesehatan di Desa Sabila dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel: 4.27 Jenis & Jumlah Sarana Kesehatan Di Desa Sabila Tahun 2007

NO	JENIS & JUMLAH SARANA KESEHATAN DI DESA SABILA	
	Jenis Sarana Kesehatan	Jumlah (Unit)
1	Dokter Praktek	-
2	Posyandu	3
3	Polindes	-
4	Puskesmas Pembantu	-
5	Puskesmas	1
6	Rumah Bersalin	-
7	Rumah Sakit	-
JUMLAH		4

Sumber: Data Hasil Survey Lapangan, Tahun 2007

❖ Peribadatan

Sarana peribadatan terkait dengan kebutuhan tempat melakukan aktivitas spiritual keagamaan. Keberadaan sarana peribadatan menyangkut kebutuhan hajat hidup masyarakat banyak terhadap kepentingan melaksanakan ibadah bagi pemeluk agama masing-masing. Penyediaan tempat ibadah menjadi hal mutlak bagi pengembangan suatu Desa. Asumsi yang biasanya digunakan untuk menempatkan sarana ibadah adalah jumlah penduduk pendukung dalam suatu kawasan yang akan direncanakan. Apabila mayoritas penduduk kawasan tersebut, maka sarana ibadah yang harus

disediakan adalah Mesjid/ Mushollah. Untuk lebih jelasnya jenis dan jumlah sarana peribadatan di Desa Sabila dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel: 4.28 Jenis & Jumlah Sarana Peribadatan Di Desa Sabila Tahun 2007

NO	JENIS & JUMLAH SARANA PERIBADATAN DI DESA SABILA	
	Jenis Sarana Peribadatan	Jumlah (Unit)
1	Mesjid	4
2	Mushollah	-
3	Gereja	-
4	Pura	-
5	Vihara	-
6	Lainnya	-
JUMLAH		4

Sumber: Data Hasil Survey Lapangan, Tahun 2007

❖ Perdagangan & Koperasi

Kemajuan pembangunan suatu Desa tidak terlepas dari kegiatan perekonomian yang terus berkembang seiring dengan tuntutan masyarakat dan jaman. Kondisi ini tidak terlepas dari tersedianya sarana dan prasarana perekonomian serta tingkat ketersediaan hasil-hasil produksi yang dipasarkan di Desa tersebut. Tersedianya sarana perdagangan dapat memacu perputaran roda perekonomian masyarakat dengan cepat, terjadinya putaran barang dan uang sehingga dapat mengembangkan sektor-sektor ekonomi lainnya.

Di Kota Sabila, terdapat beberapa sarana perdagangan berupa warung/ kios dan terdapat pula satu unit koperasi. Namun ketersediaan pasar umum di kota ini belum ada, sehingga aktifitas jual beli produksi hasil usaha masyarakat kota harus dipasarkan pada desa lain dimana lokasi pasar berada. Untuk lebih jelasnya jenis dan jumlah saran perdagangan & Koperasi di Desa Sabila dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel: 4.29 Jenis & Jumlah Sarana Perdagangan Di Desa Sabila Tahun 2007

NO	JENIS & JUMLAH SARANA PERDAGANGAN DI DESA SABILA	
	Jenis Sarana Perdagangan	Jumlah (Unit)
1	Pasar Umum	-
2	Pertokoan	-
3	Warung/ Kios	17
4	Koperasi (KUD)	1
JUMLAH		18

Sumber: Data Hasil Survey Lapangan, Tahun 2007

❖ Olah Raga/ Rekreasi

Sarana olah raga sering juga dikategorikan sebagai lahan terbuka/ jalur hijau Desa. Fungsi dari sarana olah raga/ open space adalah selain sebagai tempat berolah raga, juga berfungsi sebagai paru-paru Desa, melindungi polusi udara dan kebisingan suara yang ditimbulkan oleh berbagai sumber suara, seperti kendaraan, industri (pabrik), dll. Beberapa tempat yang dapat dikategorikan sebagai paru-paru Desa antara lain taman Desa, jalur hijau, tempat bermain terbuka, lapangan olah raga dan lain sebagainya.

Berdasarkan hasil identifikasi sarana olah raga/ open space yang ada di Desa Sabila, terdapat beberapa jenis, antara lain: terdapat lapangan sepak bola, lapangan volley dan sepak takraw masing-masing 1 unit serta taman tempat bermain. Untuk lebih jelasnya jenis dan jumlah sarana olah raga/ open space di Desa Sabila dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel: 4.30 Jenis & Jumlah Sarana Olah Raga/ Rekreasi Di Desa Sabila Tahun 2007

NO	JENIS & JUMLAH SARANA OLAH RAGA/ OPEN SPACE DI DESA SABILA	
	Jenis Sarana Olah Raga	Jumlah (Unit)
1	Lapangan Sepak Bola	1
2	Pangan Bola Volley	1
3	Lapangan Sepak Takraw	1
4	Taman Bermain	1
JUMLAH		4

Sumber: Data Hasil Survey Lapangan, Tahun 2007



b. Infrastruktur Perdesaan

Berdasarkan hasil identifikasi terhadap prasarana/ sistem utilitas yang ada di Desa Sabila, menunjukkan bahwa terdapat beberapa sistem utilitas yang ada, antara lain air bersih, jaringan listrik, jaringan telepon, jaringan drainase.

❖ Air Bersih

"Tanpa air kehidupan akan berakhir". Kalimat tersebut benarnya adanya, dimana air adalah merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Terdapat beberapa sumber air bersih yang biasa digunakan oleh masyarakat baik yang disediakan oleh pemerintah maupun yang diperoleh langsung pada alam. Air bersih yang diusahakan oleh pemerintah (PDAM) adalah air yang diambil melalui proses penjernihan, sedangkan air yang diambil langsung pada sumber mata air tidak melalui proses penjernihan, namun dapat memenuhi standar air bersih yang dipersyaratkan. Adapun syarat air untuk dikonsumsi yaitu air yang memenuhi syarat kesehatan dalam arti air tersebut tidak berbau atau tidak tercemar, tidak terasa dan tidak berwarna.

Berdasarkan data survey lapangan menunjukkan bahwa penduduk menggunakan air bersumber dari air tanah (sumur), mata air pegunungan dan air permukaan (sungai) untuk keperluan mandi, minum, dan mencuci.

❖ Listrik

Pada masa sekarang, energi listrik merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat. Hampir di semua sektor kegiatan, baik rumah tangga, maupun industri membutuhkan energi listrik. Penyediaan energi listrik baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun industri pada umumnya memanfaatkan sumber energi yang disediakan oleh pemerintah melalui Perusahaan Listrik Negara (PLN).

Kebutuhan pelayanan energi listrik bagi penduduk sangat tergantung pada kondisi yang berlaku pada wilayah setempat, terutama yang menyangkut ketersediaan dan kapasitas serta jangkauan jaringan sumber tenaga listrik yang tersedia dan kemampuan ekonomi masyarakat. Tenaga listrik merupakan salah satu sumberdaya energi yang sangat penting bagi kehidupan sehari-hari baik kebutuhan rumah tangga maupun proses produksi.

Jumlah pelanggan di Desa Sabila yang memanfaatkan energi listrik dari PLN sebanyak 232 unit satuan sambungan. Kapasitas terpasang berkisar antara 450 – 900 watt hingga 1300 watt keatas.

❖ Telepon

Sistem komunikasi yang berkembang pesat saat ini adalah telepon, baik telepon jaringan kabel maupun telepon yang menggunakan sistem satelit (jaringan seluler). Keberadaan telepon sangat dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat dalam hal efisiensi waktu dan jarak, sehingga hampir tidak ada lagi batasan antara Desa yang satu dengan Desa lainnya dalam hal komunikasi.

Kondisi eksisting jaringan telepon atau sistem komunikasi yang ada di Wilayah Studi saat ini adalah jaringan telepon lokal, dan jaringan telepon dengan menggunakan sistem telekomunikasi otomatis yang memanfaatkan Sistem Komunikasi Satelit Domestik (SKSD) Palapa. Adapun yang diusahakan oleh penduduk pada Wilayah Studi adalah Wartel dan telepon seluler (Handphone) yang telah diminati sebagian masyarakat Desa Sabila, sehingga diupayakan eksistensinya dapat terus berkembang.

Hal ini memungkinkan semakin berkembang perluasan sistem jaringan keseluruhan Desa Sabila yang didukung lokasi kota yang strategis, dilihat dari kedudukan Desa Sabila yang dilalui jalur lintas yang menghubungkan dengan kota, wilayah dalam lingkup Kabupaten Maros.

❖ Drainase

Saluran pembuangan air limbah rumah tangga maupun air hujan (drainase) di suatu kawasan sangat tergantung pada struktur permukaan lahan dan keadaan lingkungan. Fungsi utama dari sistem jaringan drainase adalah untuk mencegah terjadinya banjir pada musim hujan dan mengalirkan buangan air limbah rumah tangga sehingga tidak terjadi genangan air yang dapat menyebabkan bau tidak sedap pada kawasan perDesaan. Pengelolaan sistem drainase terbagi atas 2 (dua) bagian, yaitu:

- Drainase buatan, terdapat pada kawasan yang telah terbangun dengan lingkungan yang teratur.
- Drainase alami, terdapat pada daerah-daerah yang belum berkembang dan hanya memanfaatkan ruang-ruang terbuka sebagai tempat pengaliran.

Berdasarkan fungsi yang ada di Wilayah Studi digolongkan kedalam jaringan drainase primer (Sungai), drainase sekunder (umumnya berada pada jalan Utama) dan drainase tersier (berorientasi pada lingkungan perumahan/



permukiman). Disamping itu juga perlu adanya sistem arah aliran untuk pendistribusian yang mengikuti pola hirarki jalan dan topografi. Kondisi eksisting jaringan drainase di Wilayah Studi belum dimanfaatkan dengan baik, hal ini didasarkan pada kondisi yang ada masih bersifat alamiah (tanah).

❖ Persampahan

Sampah merupakan salah satu aspek yang mempengaruhi keindahan suatu Desa ditinjau dari estetika lingkungan jika dibiarkan berserakan tanpa ada tindak lanjut penanganannya. Adapun sampah yang dihasilkan penduduk di Wilayah Studi dikelola dengan berbagai cara, antara lain terdapat bak-bak sampah pada lokasi tertentu seperti fasilitas perkantoran dan fasilitas pendidikan, namun prasarana sampah ini terbatas dan sistem pengelolaannya pun tidak teratur, seperti tidak adanya sarana angkutan sampah. Sedangkan untuk sampah yang dihasilkan oleh kelompok permukiman (masyarakat), pada umumnya sampah dibuang langsung ke belakang rumah dan sebagian lagi dibakar, bahkan ada yang ditimbun dan tidak jarang penduduk membuatnya sebagai kompos untuk keperluan tanaman perkebunan. Cara penanganan sampah seperti ini, hingga saat ini masih dianggap efektif, mengingat pekarangan/ halaman permukiman penduduk cukup luas dan jenis sampah yang dihasilkan pun tergolong sampah organik yang dapat didaur ulang/ mudah diurai.

7. Sistem Transportasi

Transportasi memegang peranan penting dalam pengembangan wilayah/ Desa. Pembangunan sistem transportasi yang handal membutuhkan dana/ investasi yang cukup besar. Ketersediaan sarana dan prasarana transportasi dapat membantu aksesibilitas yang tinggi terhadap masyarakat, sehingga arus mobilisasi baik orang maupun barang dapat dilakukan setiap saat.

Peranan transportasi dapat membantu membuka akses antara daerah yang berkembang dengan daerah yang terisolasi/ terbelakang. Sistem transportasi yang baik ditandai dengan tersedianya sarana dan prasarana transportasi seperti moda angkutan (kendaraan), jaringan jalan serta prasarana lain seperti terminal angkutan, bandara dan pelabuhan, serta prasarana lainnya.

a. Jaringan Jalan

Sistem transportasi yang baik didukung oleh prasarana yang memadai. Salah satu prasarana transportasi yang sangat vital adalah jaringan jalan. Ketersediaan jaringan jalan memudahkan hubungan antar berbagai lokasi dalam Desa dan antar Desa dengan Desa/ daerah lainnya. Distribusi barang dan aktifitas pergerakan manusia dapat dengan mudah dilakukan apabila jaringan jalan tersedia diseluruh kawasan Desa.

Terdapat beberapa klasifikasi jalan yang dapat diidentifikasi diantaranya jalan aspal, jalan pengerasan dan jalan tanah. Disisi lain klasifikasi tersebut dapat pula dibedakan antara jaringan jalan arteri, jalan kolektor dan jalan lokal/ lingkungan.

Tabel: 4.31 Klasifikasi Jaringan Jalan Di Desa Sabila, Tahun 2007

NO	KLASIFIKASI JARINGAN JALAN DI DESA SABILA		
	Klasifikasi Jalan	Panjang (Km)	Kondisi
1	Jalan Negara/ Propinsi	5,20	Baik
2	Jalan Kabupaten	4	Rusak Ringan
3	Jalan Desa	19	Rusak Berat
JUMLAH		28,20	-

Sumber: Data Hasil Survey Lapangan, Tahun 2007

b. Sarana Angkutan

Salah satu indikator pelayanan sistem transportasi yang baik adalah ketersediaan sarana/ moda angkutan. Sarana angkutan yang dimaksud adalah kendaraan bermotor dan tidak bermotor. Berdasarkan hasil identifikasi dilapangan menunjukkan bahwa



ketersediaan sarana angkutan di Desa Sabila tersedia setiap saat. Identifikasi kepemilikan kendaraan didasarkan pada jumlah rumah tangga yang memiliki kendaraan di Desa Sabila, yaitu untuk kendaraan roda 2 (sepeda motor) sebanyak 47 KK, sedangkan kendaraan roda empat (mobil) sebanyak 15 KK.

E. Rencana Umum Tata Ruang Wilayah

1. Tinjauan RUTRW Kabupaten Maros

Kabupaten Maros merupakan suatu wilayah yang mempunyai potensi sumberdaya alam yang cukup memadai utamanya sektor pertanian, namun karena penyebaran penduduk yang tidak merata disamping keadaan dan sarana dan prasarana perhubungan darat di beberapa daerah yang belum memadai untuk menunjang kelancaran transportasi yang dapat menjangkau keseluruhan pelosok daerah ini, maka akan menimbulkan masalah dalam upaya meningkatkan dan memasarkan produksi pertaniannya. Dengan kondisi yang demikian itu, maka pusat wilayah-wilayah pengembangan wilayahnya secara terpadu antara Makassar, Maros, Sungguminasa (Gowa) dan Takalar menjadi areal pengembangan tersebut, meliputi Kecamatan Bantimurung, Mandai, Maros Baru dan Tranlili dengan luas areal 925,78 Km

Sebagai strategi dasar dalam pembangunan perekonomian daerah adalah dengan program pengwilayahan komoditi. Oleh sebab itu untuk dapat melihat laju pertumbuhan ekonomi dan sosial dari setiap wilayah, dan untuk pemerataan pertumbuhann dapat menetapkan sasaran pengembangan untuk pemerataan pertumbuhan sub wilayah pembangunan, maka penataan wilayah kedalam tata ruang seperti pusat-pusat kegiatan ekonomi (Pertanian, Industri, Pertambangan, Perdagangan, Jasa dan lain-lain) serta saluran-saluran transportasi dan komunikasi akan menentukan efisiensi dan efektivitas keseluruhan kegiatan masyarakat.

Pembahasan mengenai Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maros hanya difokuskan pada arah perencanaan yang berkaitan langsung dengan kecamatan Mallawa sebagai satu kesatuan



wilayah yang saling berintraksi. Adapun kebijaksanaan pengembangan wilayah pembangunan kabupaten Maros ditetapkan sebagai berikut :

a. Sub Wilayah Pembangunan Bagian Barat

Meliputi Kecamatan Maros Baru, Kecamatan Bantimurung, Kecamatan Bontoa, Kecamatan Simbang, Kecamatan Lau, Kecamatan Turikale dan Kecamatan Marusu, dengan pusat pengembangan berada di Desa Kecamatan Turikale. Pada sub wilayah pembangunan ini akan dikembangkan lapangan usaha yang meliputi : Padi, palawija, hortikultura, perikanan/tambak, peternakan (Unggas), industri kecil/industri rumah tangga), perdagangan, pengangkutan jasa-jasa dan perbankan.

b. Sub Wilayah Pembangunan Bagian Selatan

Meliputi Kecamatan Mandai, Kecamatan Tompobulu, dan Kecamatan Moncongloe, dengan pusat pengembangan berada di Desa Kecamatan Mandai (Desa Bontoa) lapangan usaha yang akan dikembangkan pada sub wilayah pembangunan ini meliputi : Padi, palawija, hortikultura, perkebunan, kehutanan, peternakan (unggas), industri (industri kecil/industri rumah tangga), perdagangan dan perangkutan.

c. Sub Wilayah Pembangunan Bagian Selatan

Meliputi Kecamatan Camba, Kecamatan Mallawa, Kecamatan Cenrana, dengan pusat pengembangan berada di Desa Kecamatan Camba (Desa Cemaniga). Adapun lapangan usaha yang akan dikembangkan pada sub wilayah pembangunan ini meliputi : pada palawija, perkebunan, peternakan, kehutanan, industri, perdagangan dan angkutan.

F. Fungsi dan Kedudukan Desa Sabila Sebagai DPP dalam RUTR Ibukota Kecamatan Mallawa

Fungsi dan Kedudukan Desa Sabila Sebagai DPP suatu wilayah pedesaan dimasa yang akan datang dapat tercermin pada hasil perencanaan pembangunan yang terencana yang disusun bersama-sama

antara pemerintah, masyarakat dan stakeholders lainnya. Perencanaan tersebut mencakup perencanaan pembangunan fisik serta perencanaan pembangunan keruangan (spasial). Diharapkan perencanaan pembangunan yang ada dapat memberikan dampak yang positif bagi kegiatan yang ada dalam wilayah Pedesaan tersebut. Selain itu, faktor-faktor pendukung berhasil tidaknya perencanaan pembangunan yang telah dilakukan tersebut perlu dioptimalkan pendaayagunaan dan pengelolaannya. Faktor-Faktor tersebut antara lain sumber daya manusia dan sumber daya alam, aspek fisik kewilayahan, partisipasi masyarakat dan lain-lain.

Berdasarkan Rencana Umum Tata Ruang Ibukota Kecamatan Mallawa Tahun 2005 – 2015, pemerintah Kabupaten Maros telah membagi dan menentukan beberapa strategi wilayah pengembangan desa pada sektor untuk meningkatkan potensi Wilayah Pedesaan beserta fungsinya masing-masing dalam lingkup Kecamatan Mallawa. Hal ini dilakukan dalam rangka peningkatan intensitas pembangunan wilayah perkotaan serta untuk mengantisipasi perkembangan wilayah pedesaan ke depan. Di samping untuk pemberdayaan dan hasil guna penyediaan fasilitas dan utilitas pedesaan dan untuk mengarahkan perkembangan fisik wilayah pedesaan terhadap lahan-lahan yang kurang potensial. Dimana ditetapkan Desa Sabila sebagai Desa Pusat Pertumbuhan terhadap Ibukota Kecamatan Mallawa yang merupak koneksitas antara daerah hinterlandnya dengan fungsi utama sebagai pusat pengembangan pertanian dan perkeunan, pertambangan, industri kecil dan industri padat karya.

G. Analisis DPP dan KTP2D Sabila

1. Pembentukan DPP Dalam KTP2D Sabila

Sebagaimana proyek identifikasi KTP2D tahun 2004, terdapat 2 (dua) desa yang teridentifikasi di Kabupaten Maros, yakni Desa Sabila Kecamatan Mallawa dan Desa Baji Pa'mai Kecamatan Maros Baru untuk diprogramkan sebagai wilayah DPP. Pada tahun 2004, pelaksanaan dan penetapan program proyek pembangunan peningkatan prasarana dan



sarana lingkungan, terpilih Desa Sabila Kecamatan Mallawa sebagai desa prioritas DPP dalam KTP2D Kabupaten Maros.

Dalam penilaian DPP Sabila dapat dilakukan dalam 2 kategori penilaian, yaitu :

- a. Penilaian terhadap Desa Sabila sebagai DPP yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui nilai kategori Desa Sabila sebagai DPP di Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros.
- b. Penilaian DPP Sabila dalam konstelasi Kawasan Terpilih Pusat Pengembangan Desa (KTP2D). hal ini dilakukan karena Desa Sabila tentu tidak terlepas dari desa – desa hiterlandnya, sehingga dalam pengembangannya tidak hanya difokuskan pada Desa Sabila sebagai DPP, akan tetapi secara keseluruhan dalam kawasan terpilih.
- c. Berdasarkan kedua kategori penilaian tersebut, perlu dilakukan penetapan atau penentuan kawasan sesuai dengan karakteristik dan keterkaitannya dengan daerah hiterlandnya. Pemilihan alternatif susunan DPP dalam KTP2D disesuaikan dengan penjelsan Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah seri 1, dimana terdpat 5 (lima) alternative susunan DPP.

Berdasarkan kondisi dan karakteristik daerah Desa Sabila dengan daerah hiterlandnya dan penyesuaian alternatif susunan DPP, maka alternatif pembentukan yang terpilih adalah alternatif III. Hal ini mengindikasikan bahwa DPP Sabila hanya memiliki 4 (empat) daerah hinterland (DH), yaitu Desa Padaelo, Desa Tellumpanuae dan Desa Uludaya dan Desa Mattampapole. Penentuan DPP dan DH tersebut didasari dengan pertimbangan sebagai berikut ;

- a. Secara geografis wilayah, Desa Sabila berbatasan langsung ketiga desa tersebut.
- b. Luasan desa tidak melebihi 10% dari luas total wilayah kecamatan, artinya luas daerah relatif sempit.
- c. Tipologi desa sama, yaitu desa swakarya

d. Potensi sektor unggulan produksi dan jasa sebagai penggerak pertumbuhan sama, seperti pertanian lahan kering, pengembangan jenis peternakan, dan kegiatan perikanan.

Atas dasar pertimbangan tersebut, maka luas wilayah DPP Sabila adalah 15.2625 km² atau hanya 16.57 % dari luas total Kecamatan Mallawa dengan jumlah penduduk 1.043 jiwa. Untuk lebih jelasnya mengenai hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.32 Persentase Luas Wilayah DPP Sabila

No	Kelurahan/Desa	Luas (Km ²)	Persentase (%)	Penduduk (Jiwa)
1	Padaelo	20,8594	22.70	890
2	Sabila	15,2625	16.59	1.043
3	Tellumpanuae	13,5156	14.70	1.189
4	Samaenre	42,2534	45.98	928
Jumlah		91.8909	100.00	4.050

Sumber : Hasil Analisis



2. Penilaian Status Desa Sabila Sebagai DPP Dalam KTP2D

Dalam pengembangan kawasan strategis pedesaan dibutuhkan adanya suatu pusat, yaitu desa yang berfungsi sebagai pusat pertumbuhan. Dengan mengintegrasikan penanganan desa pusat pertumbuhan dengan desa – desa hiterlandnya yang termasuk dalam kawasan pengaruhnya ke dalam system pembangunan kabupaten sebagai basis pembangunan wilayah, maka desa pusat pertumbuhan diharapkan dapat berperan sebagai pendorong dan penggerak utama terbentuknya sau kesatuan system pusat – pusat perdesaan dan perdesaan.

Berdasarkan hal tersebut dan penetapan DPP Sabila sebagai kawasan terpilih DPP di Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros yang disesuaikan dengan variabel penilaian sesuai dengan standar penilaian

yang dikeluarkan oleh Departmen Pemukiman dan prasarana wilayah (Kimraswil), akan diperhatikan pada tabel berikut:

Tabel 4.33
Penilaian DPP Berdasarkan Variabel Potensi Desa

No	Variabel	Nilai DPP Sabila	Nilai DPP Dalam KTP2D	Ket
1	Klasifikasi Desa a. Swadaya b. Swakarya c. Swasembada d. Lainnya	5	5	Tabel 4.2 Hal. 47
2	Dominan Rumah Tangga Ekonomi a. Pertanian b. Industri dan kerajinan c. Perdagangan dan Jasa d. Lainnya	2	3	Tabel 4.4 Hal 51
3	Pengelolaan Kegiatan Pertanian a. Organisasi Petani b. Badan Usaha/Perusahaan c. Tidak Organisasi	3	3	Hal. 67-68
4	Jumlah Pabrik a. > 5 buah b. < 2 buah c. 2 – 4 buah	5	5	Tabel 4.14 Hal 62
5	Struktur Ekonomi Potensial a. Sawah/Perkebunan/perikanan/lahan kering b. Industri kecil c. Industri besar dan sedang d. Perdagangan dan jasa e. Lainnya	1	1	Tabel 4.12 Hal 71
Jumlah Skor		16	18	

Tabel 4.34.
Penilaian DPP Berdasarkan PSD Untuk Menunjang
Perkembangan Produksi dan Jasa

No	Variabel	Nilai DPP Sabila	Nilai DPP Dalam KTP2D	Ket
1	Fasilitas Pasar a. Pasar/Toko/Pasar Khusus b. Tidak Ada	0	5	Tabel 4.16 Hal 64
2	Perkreditan a. Bank b. KUD c. Koperasi Lainnya d. Tidak ada	0	5	Tabel 4.16 Hal 64
3	Listrik a. Jumlah RT dilayani PLN b. Jumlah RT Layani Non PLN c. Lainnya	3	3	Tabel 4.11 Hal 58
4	Telepon a. Telepon Umum b. Telepon RT c. Tidak ada	5	5	Hal. 58
Jumlah Skor		8	18	

Tabel 4.35
Penilaian DPP Berdasarkan Kelembagaan Masyarakat

No	Variabel	Nilai DPP Sabila	Nilai DPP Dalam KTP2D	Ket
1	Type LKMD a. Type I b. Type II c. Tipe III	2	2	Hal. 67 Point "C"
2	Lembaga a. Ada b. Tidak ada	3	3	Hal. 67 Point "B"
Jumlah Skor		5	5	

Tabel 4.36
Penilaian DPP Berdasarkan PSD untuk Pelayanan Jasa - jasa

No	Variabel	Nilai DPP Sabila	Nilai DPP Dalam KTP2D	Ket
1	Sarana Air Bersih a. PDAM b. Air Sumur c. Lainnya (sungai, air hujan)	1	2	Tabel 4.10 Hal 57
2	Sarana Sanitasi Lingkungan a. Diangkut dengan truk b. Lainnya (tanpa lokasi pembuangan)	0	0	Hal 67
3	Fasilitas Pendidikan a. SLTP/Kejuruan Sederajat b. SLTA/Kejuruan Sederajat c. Akademi/Universitas	3	3	Tabel 4.6 Hal 53
4	Fasilitas Kesehatan a. Rumah Sakit/RSB b. Puskesmas/Pustu c. Poliklinik	3	3	Tabel 4.7 Hal 54
5	Kantor Pos a. Ada b. Tidak ada	0	2	Hal 58
6	Fasilitas Rekreasi a. Bioskop/Teater b. Taman Hiburan c. Lainnya	1	1	Tabel 4.8 Hal 55
Jumlah Skor		8	11	

Tabel 4.37.
Penilaian DPP Berdasarkan Jumlah Penduduk yang Cukup

No	Variabel	Nilai DPP Sabila	Nilai DPP Dalam KTP2D	Ket
1	Kepadatan Penduduk a. > 50 Jiwa per Km ² b. 25 – 49 Jiwa per Km ² c. < 25 Jiwa per Km ²	10	15	Tabel 4.3 Hal 50
Jumlah Skor		10	15	

Tabel 4.38.
Penilaian DPP Berdasarkan Aksesibilitas Terhadap Desa dan Desa Sekitarnya

No	Variabel	Nilai DPP Sabila	Nilai DPP Dalam KTP2D	Ket
1	Kualitas Jalan a. Aspal b. Diperkeras c. Tanah	5	5	Hal 65
2	Sarana Angkutan a. Terminal b. Trayek angkutan penumpang c. Lainnya	0	5	Hal 66
3	Moda Angkutan a. Kendaraan Bermotor Roda 4/3 b. Sepeda Motor c. Delman/Dokar/Gerobak/Pedati d. Lainnya (perahu)	5	5	Hal 66
Jumlah Skor		10	15	

Tabel 4.39.
Penilaian DPP Berdasarkan Lokasi Antara Pusat Desa

No	Variabel	Nilai DPP Sabila	Nilai DPP Dalam KTP2D	Ket
1	Jarak Pusat Desa Dengan Ibukota Kabupaten a. > 25 Km b. 10 – 25 Km c. < 10 Km	1	1	Hal 45
2	Jarak Pusat Desa Dengan Ibukota Kecamatan d. > 25 Km ² e. 10 – 25 Km ² c. <10 Km	5	5	Hal 45
Jumlah Skor		6	6	

Dari tabel 4.33 – 4.39 terlihat bahwa beberapa aspek penilaian tidak dimiliki oleh Desa Sabila yang merupakan dasar penentuan sebagai DPP dibandingkan dengan desa – desa sekitarnya. Jika penilaian DPP dilakukan dalam skala kawasan (KTP2D), maka aspek penilaiannya meningkat dalam hal ini memungkinkan untuk dilakukan skor penilaian tersebut, maka dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.40.
Rekapitulasi Penilaian DPP

No	Variabel	Nilai DPP Sabila	Nilai DPP Dalam KTP2D
1	Potensi Desa	16	18
2	PSD Untuk Menunjang Perkembangan Produksi dan Jasa	8	18
3	Kelembagaan Masyarakat	5	5
4	PSD Untuk Pelayanan Jasa - jasa	8	11
5	Jumlah Penduduk	10	15
6	Aksesibilitas Terhadap Desa dan Desa Sekitarnya	10	15
7	Lokasi Antara Pusat Desa	6	6
Jumlah Total Skor		63	88

Sumber : Hasil Analisis

Dari hasil penilaian variabel DPP Sabila dan DPP KTP2D diperoleh nilai masing – masing 63 dan 88. jika disesuaikan dengan kriteria penilaian DPP yang dikeluarkan oleh Departemen Kimpraswil tahun 2002 (lihat hal. 45 bab III), maka Desa Sabila dikategorikan sebagai Desa Potensial untuk menjadi DPP. Jika penilaian dilakukan terhadap DPP dalam KTP2D, maka kategorinya adalah layak untuk dikembangkan sebagai Desa Pusat Pertumbuhan (DPP).

H. Analisis Kriteria dan Kebutuhan DPP Dalam KTP2D

1. Kondisi dan Potensi DPP Sabila

Karena tidak terpenuhinya Desa Sabila sebagai DPP sebagaimana pada rekapitulasi hasil penilaian kategori (tabel 4.40), maka untuk penilaian kriteria yang digunakan adalah hasil penilaian DPP dalam KTP2D. hal ini dilakukan karena Desa Sabila sebagai DPP yang terpilih berdasarkan proyek pengembangan tahun 2004 – 2005, sehingga tidak memungkinkan untuk memilih desa lain sebagai DPP. Batasan kawasan DPP Sabila diidentifikasi 4 Desa, yaitu Desa Sabila sendiri, Desa Uludaya, Desa Padaelo, dan Desa Tellumpanuae. Luas kawasan DPP KTP2D Sabila

adalah 15.2625 km² dengan memiliki kondisi dan potensial daerah adalah relatif sama.

Sesuai dengan tabulasi data sekunder dan data primer yang telah dihimpun selama penelitian, maka dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. KTP2D, dalam penetapan desa sebagai pusat pengembangan DPP Sabila dan sudah termasuk dalam program pembangunan Kabupaten Maros maupun Propinsi Sulawesi Selatan tahun 2004-2005, ditetapkan Desa Sabila adalah pusat pengembangan.
- b. DPP KTP2D, sesuai dengan hasil penilaian variabel diperoleh hasil penilaian kategori yang sudah sesuai dengan pembentukan DPP (lihat tabel 40).
- c. Transportasi, yang secara umum diwilayah Kecamatan Mallawa sudah dilayani oleh angkutan penumpang dengan frekuensi pelayanan 3 (tiga) kali sehari, begitupula jenis angkutan truk yang mengangkut potensi wilayah, seperti keperluan untuk bahan pembangunan dan hasil bumi. Sedangkan jaringan jalan telah dihubungkan dengan jaringan jalan kolektor dengan kondisi jalan baik (aspal) dan yang menuju ke Desa Sabila dan desa sekitarnya relatif jelek (lihat hal. 64-65). Sesuai dengan SPM, maka panjang jalan yang dibutuhkan untuk jalan lingkungan (jalan lokal) dan setapak (jalan desa) adalah :

Tabel 4.41.
Penyesuaian dan Perbandingan Kebutuhan Jalan Lokal dan Desa Pada Kecamatan Mallawa dan Kawasan DPP KTP2D Sabila Tahun 2006.

No	Jenis Jalan	Panjang Eksisting	Luas Wilayah (Ha)	Rasio SPM (M/Ha)	Penyesuaian SPM	Kebutuhan (m)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Tinjauan Terhadap Kecamatan Mallawa						
	Lokal	29530	23591,28	60	345480	315950	Penambahan
	Desa	13740	23591,28	60	345480	331740	Penambahan
2	Tinjauan Terhadap Kawasan DPP KTP2D Sabila						
	Lokal	7880	1526,25	60	114360	106480	Penambahan
	Desa	760	1526,25	60	114360	113600	Penambahan

Sumber : Hasil Analisis

- d. Penduduk, jumlah penduduk yang sudah bekerja dalam wilayah Kecamatan berkisar 37 % dari jumlah total penduduk dan pada kawasan DPP berkisar 43% dari jumlah penduduk total DPP. Sedangkan kategori kesejahteraan penduduk Kecamatan Umumnya tergolong prasejahtera begitupula di kawasan DPP Sabila (lihat tabel diatas).
- e. Fasilitas Pendidikan, jenis fasilitas pendidikan di Kecamatan Mallawa terdiri dari TK hingga SLTA. Sedangkan pada kawasan DPP Sabila hanya sampai tingkat SLTP. Untuk mengetahui orientasi ketersediaan dan kebutuhan fasilitas pendidikan di Kecamatan Mallawa dan Kawasan DPP KTP2D Sabila pada saat ini (tahun 2006) sesuai dengan standar perencanaan minimum tahun 2000 dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 4.42.
Penyesuaian dan Perbandingan Kebutuhan Fasilitas Pendidikan Pada Kecamatan Mallawa dan Kawasan DPP KTP2D Sabila Tahun 2006.

No	Jenis Jalan	Jumlah Eksisting	Penduduk Pendukung	Rasio SPM	Penyesuaian SPM	Kebutuhan (m)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Tinjauan Terhadap Kecamatan Mallawa						
	TK	5	11.503	1,000	6	11	Penambahan
	SD	17	11.503	1,600	10	7	Kelebihan
	SLTP	2	11.503	4,600	0	2	Sesuai
	SLTA	1	11.503	4,800	1	2	Kekurangan
2	Tinjauan Terhadap Kawasan DPP KTP2D Sabila						
	TK	1	1.043	1,000	0	1	Sesuai
	SD	2	1.043	1,600	1	0	Pengadaan
	SLTP	1	1.043	4.600	1	0	Pengadaan
	SLTA	1	1.043	4.800	1	0	Pengadaan

Sumber : Hasil Analisis

- f. Saluran Air Hujan, data mengenai prasarana ini tidak ada dan sebagai pendekatan untuk mengetahui kondisinya apabila dianggap bahwa saluran selalu mengikuti jalan, maka ketersediaan prasarana ini masih kurang (lihat diatas)
- g. Persampahan, sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa pengelolaan sampah di Kecamatan Mallawa, termasuk pada lokal penelitian masih menggunakan cara menanam dan membakar sampah. Maka dari itu, ketersediaan dalam pengelolaan sampah masih kurang.
- h. Kesehatan, jenis fasilitas kesehatan di Kecamatan Mallawa adalah puskesmas yang berlokasi di pusat Desa, pustu di beberapa desa / kelurahan, dan pos yandu . untuk itu apotek atau toko obat belum ada dan jumlah dokter 2 orang serta 12 orang paramedis. Dan 2 unit Posyandu yang dilayani 2 orang perawat dan 2 orang orang bidan.

- i. Peribadatan, jenis fasilitas peribadatan adalah masjid dan mushollah di wilayah Kecamatan dan kawasan DPP sudah sesuai kebutuhannya.
- j. Olah Raga, fasilitas ini hanya berupa lapangan terbuka yang sesuai peruntukannya, disamping beberapa lapangan olah raga lainnya yang umumnya terdapat dilingkungan pemukiman yang pengusahannya dilakukan oleh penduduk setempat.
- k. Perumahan, klasifikasi rumah dalam wilayah Kecamatan dan DPP umumnya semi permanen. Sedangkan jumlah kepemilikan rumah berdasarkan jumlah kepala keluarga (KK) untuk wilayah Kecamatan berkisar 6 % dan kawasan DPP berkisar 12%.
- l. Sumber Air, umumnya masyarakat menggunakan air sumur biasa, meskipun beberapa daerah desa/kelurahan sudah terlayani dengan jaringan PDAM, termasuk dalam kawasan DPP. Sebagian besar sumur dipengaruhi oleh air laut sehingga rasanya terkadang berkapur.
- m. Telekomunikasi, keperluan telekomunikasi dalam wilayah kecamatan maupun DPP sudah terlayani oleh jaringan telepon. Sarana yang digunakan adalah telepon non jaringan (setelit) yang tersebar di beberapa desa yang berfungsi sebagai telepon umum, disamping keperluan pemerintah setempat.
- n. Listrik, dalam wilayah kecamatan dan DPP umumnya masyarakat menggunakan sumber listrik dari PLN dan masih banyak rumah tangga yang belum tersambungkan oleh jaringan listrik.
- o. Potensi produktivitas wilayah, potensi wilayah tersebut relatif mengalami peningkatan tiap tahun dengan skala pemasaran masih bersifat lokal.
- p. Industri, jenis industri dalam wilayah kecamatan dan DPP adalah tergolong industri kecil dan rumah tangga dengan pemakaian tenaga kerja yang bersifat kekeluargaan dan pengelolaan manajemen masih tradisional.
- q. Sektor Jasa, Dalam wilayah kecamatan dan DPP sektor jasa adalah type modal kecil dan belum memperkerjakan tenaga kerja lebih dari 1 orang.
- r. Sektor Ekonomi, dalam wilayah kecamatan sudah terdapat pasar umum, bank, koperasi dan KUD. Sedangkan dalam kawasan DPP hanya berupa

- KUD dan kegiatan ekonomi lainnya seperti kios/warung yang tersebar disetiap lingkungan permukiman.
- s. Pariwisata, wilayah kecamatan dan kawasan DPP termasuk dalam konsep pengembangan pariwisata kabupaten Maros dan dalam pelaksanaan pengembangan belum terlihat adanya pembangunan untuk menunjang potensi pariwisata yang ada.
 - t. Rencana Tata Ruang, dalam menata perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Kecamatan Mallawa, maka dibuatkan RUTRW dan telah direvisi pada tahun 2002. dalam implementasi program rencana dalam waktu 3 tahun terakhir belum nampak secara nyata berdasarkan hasil wawancara dengan pihak pemerintah tingkat kecamatan.
 - u. Lembaga kemasyarakatan, dalam wilayah kecamatan maupun DPP sudah memiliki lembaga – lembaga masyarakat, fungsi dan peran lembaga sudah baik.
 - v. Partisipasi Masyarakat, dalam pelaksanaan pembangunan desa, peran serta atau partisipasi masyarakat di wilayah kecamatan maupun DPP sudah baik.
 - w. Berdasarkan gambaran mengenai kondisi dan potensi tersebut diatas dan dasar penilaian kategori pada bab III, sudah dapat direkapitulasi penilaian secara kualitatif sebagaimana pada tabel (4.43). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 4.43.
Rekapitulasi Penilaian Secara Kualitatif Kondisi dan Potensi Wilayah
Kecamatan Mallawa dan Kawasan DPP Sabila.

No	Penilaian Variabel	Kategori Penilaian Indikator	
		Kecamatan Mallawa	Kawasan DPP Sabila
1	Transportasi		
	a. Angkutan	Baik	Baik
	b. Jalan	Sedang	Kurang
2	Penduduk		
	a. Pekerjaan	Kurang	Sedang
	b. Tingkat Kesejahteraan	Kurang	Kurang
3	Fasilitas Pendidikan	Kurang	Kurang
4	Fasilitas Kesehatan	Baik	Sedang
5	Fasilitas Peribadatan	Baik	Baik
6	Fasilitas Olah Raga	Sedang	Sedang
7	Perumahan	Sedang	Sedang
8	Sumber Air	Sedang	Sedang
9	Saluran Air Hujan	Kurang	Kurang
10	Persampahan	Kurang	Kurang
11	Telekomunikasi	Kurang	Kurang
12	Listrik	Baik	Baik
13	Potensi Produktifitas Wilayah	Baik	Sedang
14	Industri	Sedang	Kurang
15	Sektor Jasa	Kurang	Kurang
16	Sektor Ekonomi	Baik	Kurang
17	Pariwisata (berdasarkan hasil wawancara)	Sedang	Sedang
18	Rencana Tata Ruang (berdasarkan hasil wawancara)	Sedang	Sedang
19	Lembaga Kemasyarakatan (berdasarkan hasil wawancara)	Baik	Baik
20	Partisipasi Masyarakat (berdasarkan hasil wawancara)	Baik	Baik

2. Penilaian Kategori dan Kebutuhan Prasarana DPP Sabila

Dalam penilaian kategori dan kebutuhan prasarana DPP Sabila digunakan pendekatan bobot skoring sesuai dengan persamaan (1) dan tabel 3.9 (hal. 38). Hal ini dimaksudkan untuk mengukur kategori dan mengetahui kebutuhan prasarana DPP Sabila untuk dijadikan sebagai

dasar untuk menetapkan strategi pembangunan (meskipun tidak dianalisis mengenai strategi pembangunan) untuk lebih memacu fungsi dan peranan DPP Sabila dalam konstelasi wilayah Kecamatan dan Kabupaten. Dalam penilaian ini juga dilakukan meliputi penilaian per variabel untuk menetapkan jenis bentuk penanganan pembangunan dimasa mendatang. Adapun penilaian pembobotan berdasarkan scoring penilaian dapat dilihat pada tabel 44.

Tabel 44.
Rekapitulasi Kriteria DPP Sabila berdasarkan Skoring dan Variabel Penilaian.

No	Penilaian Variabel	Bobot (%)	Bobot Skoring Penilaian Kriteria			Jml Bobot (%)	Bentuk Penanganan Variabel
1	Sarana Transportasi (Angkutan)	6	3			100	Penanganan I
2	Prasarana Transportasi (jalan)	6			1	33.33	Penanganan III
3	Pekerjaan	5		2		66.67	Penanganan II
4	Ting. Kesejahteraan	5			1	33.33	Penanganan III
5	Fasilitas Pendidikan	5			1	33.33	Penanganan III
6	Fasilitas Kesehatan	5		2		66.67	Penanganan II
7	Fasilitas Peribadatan	2	3			100	Penanganan I
8	Fasilitas Olah Raga	2		2		66.67	Penanganan II
9	Perumahan	5		2		66.67	Penanganan II
10	Sumber Air	4		2		66.67	Penanganan II
11	Saluran Air Hujan	5			1	33.33	Penanganan III
12	Persampahan	5			1	33.33	Penanganan III
13	Telekomunikasi	5			1	33.33	Penanganan III
14	Listrik	5	3			100	Penanganan I
15	Potensi Prod. Wilayah	6		2		66.67	Penanganan II
16	Industri	4			1	33.33	Penanganan III
17	Sektor Jasa	4			1	33.33	Penanganan III
18	Sektor Ekonomi	5,5			1	33.33	Penanganan III
19	Pariwisata	3		2		66.67	Penanganan II
20	Rencana Tata Ruang	3,5		2		66.67	Penanganan II
21	Lemb. Masyarakat	4	3			100	Penanganan I
22	Partisipasi Masyarakat	5		2		66.67	Penanganan II
Jumlah Total		100	12	18	9	43	
<ul style="list-style-type: none"> - Orientasi bentuk Penanganan I sebanyak 4 aspek - Orientasi bentuk Penanganan II sebanyak 9 aspek - Orientasi bentuk Penanganan III sebanyak 9 aspek 							

Sumber : Hasil Analisis

Keterangan :

Penanganan I : Peningkatan kualitas pada aspek yang ditinjau

Penanganan II : Pertimbangan pengembangan pada aspek yang ditinjau

Penanganan III : Prioritas pengembangan pada aspek yang ditinjau



Berdasarkan perhitungan kategori DPP Sabila diperoleh nilai bobot 43 nilai total bobot maksimum adalah 66 (3 nilai maks. Kriteria x 22 dari variabel). Dari penilaian tersebut, maka kriteria penilaian sama dengan 65,15% ($43/66 \times 100\%$), artinya hirarki kategori DPP Sabila dalam KTP2D adalah "sedang" untuk melaksanakan fungsinya sebagai DPP. Kriteria ini mengindikasikan bahwa beberapa variabel, terutama prasarana dasar masih mampu menunjang fungsi dan peranan untuk DPP Sabila dalam KTP2D, dimana jumlah orientasi penanganan untuk pemenuhan kebutuhan (penanganan III + II) sebanyak 17 variabel dari 22 variabel yang dinilai.

I. Introspek dan Prospek Desa Sabila Sebagai DPP.

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dijelaskan diatas, maka beberapa hal perlu diuraikan sesuai dengan hasil analisis sebagai berikut :

1. Kondisi dan Potensi Kawasan DPP Sabila

Wilayah Kecamatan Mallawa dalam konteks wilayah Kabupaten Maros merupakan salah satu wilayah kecamatan yang strategis dalam menunjang pembangunan Kabupaten Maros. Dari aspek geografis wilayah yang berada di Dataran Tinggi arahan RUTRW Kabupaten sebagai kawasan pengembangan Agropolitan.

Guna menunjang arahan pengembangan kawasan tersebut, Kecamatan Mallawa berdasarkan potensi yang dimilikinya ditetapkan sebagai kawasan pengembangan agropolitan, dan agroindustri. Dari kedua penetapan tersebut, hanya agropolitan yang paling menonjol dibandingkan dengan penetapan lainnya.

Sesuai dengan potensi yang dimilikinya, keterpaduan antar sektor mutlak untuk dilakukan agar arahan pengembangan pembangunan di Kecamatan Mallawa, khususnya pada kawasan DPP Sabila lebih terarah dan berkembang. Sehingga, pengembangan pada sektor lainnya juga ikut berpengaruh yang saling menunjang. Adapun potensi wilayah yang paling menonjol adalah pada sektor pertanian dan tanaman umumnya bersifat lokal, kecuali hultikultura dan jenis industri.

Dengan adanya potensi wilayah yang tersebar di Kecamatan Mallawa, khususnya pada kawasan DPP Sabila telah memberikan kontribusi terhadap wilayah itu sendiri, khususnya jangkauan pelayanan angkutan yang secara tidak langsung akan memicu pembangunan dan peningkatan jaringan jalan. Seiring dengan hal tersebut, pelayanan angkutan penumpang juga berperang dalam mobilisasi pergerakan arus barang dan orang, baik yang akan keluar atau yang masuk di wilayah Kecamatan Mallawa, khususnya dalam kawasan DPP Sabila.

2. Penentuan dan Penilaian Status KTP2D

Sesuai dengan standar pembentukan DPP KTP2D yang dikeluarkan oleh Departemen Kimpraswil seri 1, Desa Sabila sebagai desa terpilih sebagai pusat pengembangan desa yang jika dilihat dari kondisi dan potensi yang dimiliki oleh daerah hinterlandnya justru lebih unggul daerah hinterland. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam pelaksanaan pembangunan untuk mempercepat proses pengembangan kawasan DPP Sabila diperhadapkan berbagai permasalahan, khususnya pengalokasian atau pengadaan fasilitas – fasilitas pendukung dan penunjang kawasan dimasa mendatang. Kesiapan desa dalam DPP Sabila yang relatif baik adalah Desa Tellumpanuae dan Desa Padaelo.

Dengan penetapan tersebut, maka untuk menetapkan DPP KTP2D diperlukan pendataan awal untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan dari masing – masing desa/kelurahan pada suatu wilayah kecamatan. Sedangkan dari hasil penilaian, DPP Sabila dalam KTP2D berdasarkan kategori penilaian, DPP Sabila sudah memenuhi syarat sebagai Desa Pusat Pengembangan dengan nilai 88%, terutama pada aspek kependudukan, aksesibilitas, organisasi masyarakat, fasilitas perdagangan, jaringan listrik, industri kecil, sarana parangkutan, dan sarana air bersih. Tidak tercapainya penilaian hingga 100% disebabkan beberapa variabel dalam ketersediaannya belum sesuai kriteria pembentukan DPP KTP2D anatar lain :

- x. Jaringan jalan yang masih terbatas dan umumnya berupa jalan poros yang berfungsi jalan utama dengan kondisi perkerasan dan tanah. Pada kondisi seperti ini masih didapatkan hambatan dalam pengangkutan hasil produksi dan perkembangan permukiman menjadi linear mengikuti jalan utama sehingga distribusi penduduk menjadi tidak merata.
- y. Pelayanan informasi melalui kantor pos yang hanya terfokus pada setiap kantor desa dan ibukota kecamatan. Sedangkan telekomunikasi masih berskala pelayanan sangat terbatas. Kondisi ini dapat menghambat proses informasi yang lebih cepat.
- z. Fasilitas pendidikan yang masih terbatas, terutama TK dan SLTA. Kondisi ini dapat menjadi salah satu penyebab rendahnya tingkat pendidikan dan pengetahuan penduduk setempat
- aa. Pengelolaan persampahan yang masih bersifat tradisional sebagai akibat masih terbatasnya kemampuan pemerintah untuk merealisasikan pengadaan sarana persampahan sesuai dengan standar perencanaan.
- bb. Saluran air hujan yang masih terbatas dan hanya terdapat pada sisi jalan utama. Hal ini disebabkan, disamping jaringan jalan yang masih kurang juga dikarenakan terbatasnya kemampuan pemerintah dalam pembuatannya.
- ö. Struktur ekonomi potensial belum dilakukan secara intensif dan berdaya saing. Hal ini disebabkan, disamping kemampuan pemerintah dalam mengintensifkan potensi wilayah, juga karena kondisi alam yang kurang mendukung, kecuali pada sektor pertanian.
- aa. Pengelolaan kegiatan pertanian masih bersifat tradisional dan belum ada badan usaha sebagai basis pengembangan. Kondisi ini disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya adalah daya dukung lingkungan, infrastruktur penunjang dan pendukung yang terbatas, dan sebagainya.
- bb. Kegiatan rumah tangga dominan masih bersifat turun temurun, yaitu pertanian. Hal ini dikarenakan oleh jenis dan hasil produktivitas wilayah yang masih terbatas. Kegiatan industri dan kerajinan masih bersifat usaha sampingan.

- cc. Typologi desa masih swakarya, sehingga dapat mempengaruhi kemampuan kawasan/desa untuk berkembang terbatas. Kondisi ini disebabkan oleh daya dukung kawasan yang belum memadai, terutama dalam intensitas pengembangan potensi produktifitas wilayah.

3. Penilaian Kategori dan Kebutuhan Prasarana DPP KTP2D Sabila

Dalam penilaian kategori dan pemenuhan kebutuhan beberapa aspek, terutama ketersediaan prasarana dasar DPP KTP2D Sabila, sebanyak 20 variabel dan dua diantaranya terdapat sub variabel sehingga jumlah 22 variabel penilaian yang dianalisis dengan menggunakan metode pembobotan dan hasil penilaian diperoleh nilai kriteria 66,15% yang artinya masih berada pada hirarki tingkat sedang. Pencapaian hirarki seperti ini disebabkan ada beberapa aspek perlu dikembangkan sebagai penunjang dan pendukung pengembangan DPP KTP2D Sabila untuk diprogramkan pembangunannya. Hal ini dimaksudkan agar peran dan fungsi DPP Sabila dalam memacu tingkat pertumbuhan dan perkembangan wilayah Kecamatan Mallawa khususnya dan wilayah Kabupaten Maros umumnya dimasa mendatang dapat tercapai.

Hasil penilaian kriteria diperoleh 3 (tiga) bentuk penanganan pembangunan yang mencerminkan tingkat kebutuhan prasarana DPP KTP2D Sabila. Adapun bentuk penanganan aspek yang menjadi variabel penilaian dalam penelitian ini adalah :

- a. Sebanyak 4 variabel berindikasi perlu peningkatan kualitas, artinya bahwa variabel tersebut sudah sesuai dari segi kuantitas dan arena proses pembangunan terus berjalan, maka variabel – variabel yang sudah ada hanya membutuhkan peningkatan kualitasnya dan bukan merupakan faktor penting untuk segera diadakan karena sudah dianggap memenuhi dan baik. Adapun variabel yang dimaksud adalah :
 - o Lembaga masyarakat desa yang sudah berfungsi dan berperan dalam mewadahi masyarakat untuk memajukan dan mengembangkan desa.



- Jaringan listrik yang umumnya telah dinikmati oleh masyarakat setempat.
 - Fasilitas peribadatan yang sudah memenuhi kebutuhan penduduk dalam melaksanakan ibadah yang baik.
 - Pelayanan angkutan bermotor yang sudah menjangkau dan melayani kawasan DPP.
- b. Sebanyak 9 variabel berindikasi perlu pertimbangan pengembangannya, artinya dalam pengadaan dan pengembangannya dapat disesuaikan dengan tingkat kemampuan daerah dan kelompok rasio penunjangnya. Adapun variabel tersebut adalah :
- Jumlah penduduk yang telah bekerja di beberapa sektor yang tersedia jika dibandingkan dengan jumlah penduduk secara keseluruhan pada kawasan DPP berkisar 42 %. Untuk lebih meningkatkan jumlah penduduk yang bekerja, maka beberapa hal yang perlu dilakukan agar lapangan usaha dan bekerja meningkat dari sekarang.
 - Fasilitas Kesehatan dari jumlah dan jenisnya untuk kategori desa sudah terpenuhi kebutuhan masyarakat, namun dari tenaga medis khususnya dokter yang belum ada dan apotek / toko obat.
 - Fasilitas Olah Raga, dari segi kebutuhan masyarakat sudah terpenuhi karena beberapa desa sudah terdapat lapangan sepak bola dan bermain. Bagi desa yang belum ada lapangan olah raga perlu dipertimbangkan pengadaannya.
 - Perumahan, jika dilihat dari jumlah KK dibandingkan dengan jumlah rumah terdapat selisih, sehingga diasumsikan bahwa terdapat keluarga yang belum memiliki rumah. Hal ini perlu dipertimbangkan untuk memfasilitasi masyarakat untuk memiliki rumah sendiri.
 - Sumber Air, umumnya masyarakat menggunakan sumur biasa dengan kualitas air yang layak dikonsumsi. Sedangkan jaringan dari PDAM hanya satu desa yang terlayani, sehingga perlu dipertimbangkan untuk memberikan layanan bagi desa yang belum dijangkau oleh jaringan air dari PDAM.

- o Potensi Produktivitas Wilayah, dari pemenuhan kebutuhan masyarakat setempat sudah baik, dan terdapat potensi yang bernilai ekspor. Kondisi ini perlu mendapat perhatian dalam pengembangannya sehingga mendorong pelaksanaan pembangunan desa dan tingkat kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.
 - o Rencana Tata Ruang, dimana wilayah Kecamatan Mallowa sudah direncanakan pengembangan wilayahnya, sehingga arahan rencana perlu diimplimentasikan sesuai dengan prioritas pengembangan yang hendak dicapai.
 - o Partisipasi masyarakat masih dalam kategori sedang dalam melibatkan diri pada kegiatan pembangunan desa.
- c. Sebanyak 9 variabel berindeikasi perlu prioritas pengembangan. Variabel ini memiliki kriteria kurang sehingga dapat diprioritaskan pengembangannya seiring dengan pelaksanaan pembangunan pada sektor lainnya. Adapun variabel tersebut adalah :
- o Jalan. Kondisi jalan yang umumnya berkondisi baik sehingga dapat memperlambat pergerakan arus barang dan orang dari/ke kawasan DPP.
 - o Tingkat Kesejahteraan, kategori kesejahteraan masyarakat umumnya pra sejahtera dan sejahtera I, sehingga keadaan ini perlu mendapatkan solusi yang secepatnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.
 - o Fasilitas Pendidikan, berdasarkan standar perencanaan terlihat bahwa pada kawasan DPP masih kurang jumlah dan jenis fasilitas pendidikan, kecuali Sekolah Dasar yang sudah terpenuhi. Keadaan ini perlu diprioritaskan pengadaannya, terutama SLTA
 - o Saluran air hujan, ketersediaannya sangat terbatas dan hanya terdapat pada jalan poros desa (jalan lingkungan)
 - o Persampahan, pengelolaannya masih bersifat tradisional dan belum ditunjang oleh sarana persampahan, sehingga masyarakat dalam

membuang sampah terlebih dahulu ditumpuk kemudian ditanam atau dibakar.

- o Telekomunikasi, keberadaannya sangat menunjang arus informasi sementara belum terlayani, kecuali terdapat telepon umum non jaringan (setelit), sehingga keberadaannya terbatas penggunaannya dan biaya mahal..
- o Industri, kegiatan industri masih terbatas pada kegiatan industri rumah tangga, yaitu pembuatan gula merah. Bahan baku di lokasi cukup besar tetapi produksinya terbatas. Kondisi ini perlu prioritas penanganan untuk meningkatkan skala pemasaran yang dapat mempengaruhi tingkat produktifitasnya.
- o Sektor jasa, masih terbatas pada kegiatan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Sementara potensi dalam masyarakat dapat ditingkatkan jika diberikan keringanan kredit dan berbagai kegiatan penunjang lainnya seperti pelatihan dan pendidikan keterampilan.
- o Sektor ekonomi, umumnya masih bersifat sederhana yaitu berupa warung/kios dan toko hanya terdapat beberapa unit. Sedangkan di Desa Sabila belum ada truk kontainer sampah dan jika dilihat dari keseluruhan potensi dan keinginan masyarakat pada kawasan DPP sangat mengaharpkan adanya pasar ikan yang secara tidak langsung akan menumbuhkan kegiatan ekonomi lainnya.

Jika dilihat dari bentuk – bentuk penanganan pada variabel tersebut diatas, terdapat variabel yang memiliki keterkaitan erat, artinya jika variabel tertentu dikembangkan maka akan mempengaruhi variabel lainnya. Misalnya meningkatkan jenis usaha dan lapangan kerja penduduk dengan tersebut agar penduduk yang bekerja bertambah banyak, maka hal tersebut akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

J. INFORMASI PROGRAM DPP DALAM KTP2D

Informasi program DPP dalam KTP2D dimaksudkan untuk memberi gambaran program KTP2D kepada masyarakat untuk mengajak berpartisipasi dalam :

1. Identifikasi Potensi dan Masalah

Identifikasi potensi dan masalah dilaksanakan pada Rembug Desa I, dimana masyarakat diharapkan dapat ikut serta dalam proses yang dimaksud, diwujudkan dalam memberikan data akurat pada petugas. Adapun data yang dijaring berupa kuesioner tertutup dan wawancara harus mencakup informasi hal-hal sebagai berikut :

a. Potensi Sumberdaya Alam

Potensi sumberdaya alam yang ada di Desa Sabila, selain sektor pertanian (perkebunan) juga dijumpai adanya industri tambang Batu bara, penanganan dan pengolahan sumber daya alam (SDA) tersebut, hingga saat ini belum dimanfaatkan dengan baik, disebabkan karena sarana dan prasarana dam tersebut belum tertata dengan baik. Sehingga dikelola dengan baik dengan sendirinya akan meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat.

Permasalahan yang dihadapi masyarakat Desa Sabila, sehubungan dengan hal tersebut diatas, lebih disebabkan karena terbatasnya fasilitas penunjang terutama sarana dan prasarana penghubung serta terbatasnya sumberdaya manusia (SDM) , dalam kaitan pengelolaan sumberdaya tersebut.

b. Potensi Ekonomi

Potensi ekonomi dominan di Desa Sabila hingga saat ini adalah pertanian (perkebunan). Sarana penunjang berupa pasar dan lembaga keuangan tidak dijumpai. Hal ini berkaitan erat dengan kondisi Desa Sabila yang mempunyai akses lancar ke Kota Maros, yang dapat ditempuh dengan jarak 61 km.

Kondisi dan volume hubungan dengan desa yang lainnya, dapat dikatakan bahwa Desa Sabila mempunyai akses yang baik , serta hubungan dengan desa yang ada disekitarnya satu desa dengan yang lain dapat saling berhubungan, karena tersedia sarana penghubung yang cukup lancar.

c. Potensi Sarana dan Prasarana

Potensi sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor penting, dengan demikian potensi tersebut akan memberikan pengaruh terhadap fungsi dan kedudukan Desa Sabila terhadap wilayah yang ada disekitarnya.

Potensi sarana pendidikan yang ada sekarang, Sudah terdapat adanya Sekolah Dasar (SD), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Menengah Umum (SMU), Untuk masa yang akan datang, sarana pendidikan perlu ditingkatkan. Sedangkan fasilitas umum yang ada di Desa Sabila hingga saat ini berupa lapangan olah raga yang difungsikan sebagai lapangan sepak bola.

Potensi sarana dan prasarana jalan yang ada sudah cukup baik, hanya perlu peningkatan jalan, utamanya jalan yang menghubungkan dengan beberapa dusun dalam wilayah Desa Sabila.

2. Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan dimaksudkan agar masyarakat lebih mengetahui program-program yang akan dilaksanakan baik yang sifatnya fisik maupun non fisik. Salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam perencanaan sebagai berikut :

- a. **Survey Desa Sendiri (SDS)**, yang diawali dengan pembagian kuesioner secara random kepada masyarakat yang dianggap dapat mengawali warga desa untuk mengenali potensi dan permasalahan yang ada didesanya.
- b. **Wawancara Langsung**, dilakukan untuk menjaring data kualitatif dan kuantitatif tentang kebiasaan masyarakat didalam melakukan kegiatan ekonomi sehari-hari serta potensi kegiatan ekonomi yang dominan.

3. Pelaksanaan dan Pengembangan DPP dalam KTP2D

Pelaksanaan dan Pengembangan Kawasan Terpilih Pusat Pengembangan Desa (KTP2D), dimaksudkan untuk mendapatkan acuan pembangunan bagi kawasan terpilih di perdesaan. Desa Sabila sebagai

kawasan terpilih pusat pengembangan desa di kecamatan Mallawa Kabupaten Maros, mempunyai peranan penting terhadap daerah hinterlandnya. Oleh karena itu dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan pengembangannya diharapkan telah mendapatkan komitmen dari instansi terkait dan PEMDA setempat, yang mencakup; zonning kawasan, rencana jaringan jalan, jaringan utilitas dan fasilitas umum serta sosial.





BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Sesuai dengan hasil analisis yang telah dilakukan sebagaimana pada pembahasan bab IV, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Penilaian status Desa Sabila belum masuk dalam kriteria DPP, melainkan hanya sebagai desa potensial DPP dengan skor 63, tetapi jika penilaian DPP dan KTP2D, maka kriteria dapat dikembangkan sebagai DPP dengan nilai skor 88, jika dilihat dari segi geografis wilayah dan penetapan DPP KTP2D yang dikeluarkan oleh Departemen Kimpraswil tahun 2004, Desa Sabila paling efektif sebagai DPP. Dimana Desa Sabila berbatasan Desa Tellumpanua dan Mattampapole setelah ibukota kecamatan Mallawa yaitu Kelurahan Batu Putih. Kondisi ini sangat beralasan apabila Desa Sabila yang terpilih sebagai DPP, meskipun penilaian kategori belum sesuai.
2. Dengan demikian dari hasil perhitungan kategori berdasarkan bobot dan penilaian kriteria DPP KTP2D Sabila tergolong hirarki sedang. Kondisi ini mengindikasikan kebutuhan prasarana dan sarana untuk menunjang fungsi dan peranan DPP KTP2D Sabila saat ini masih perlu perbaikan atau ditingkatkan sehingga kategori DPP dapat dicapai 100%.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan yang telah diuraikan, maka perlu disarankan sebagai berikut :

1. Dalam meningkatkan atau penambahan dari suatu fasilitas yang sudah sesuai dengan rasio kebutuhan, perlu mempertimbangkan rasio yang rasional, sehingga dalam pembangunannya tidak menimbulkan berbagai

- kendala atau permasalahan. Seperti pembangunan sekolah harus sesuai dengan kelompok usia sekolah yang dimaksud.
2. Agar dalam proses perkembangan dan pertumbuhan kawasan DPP Sabila dalam wilayah kecamatan Mallawa, maka hal yang paling mendasar untuk dilakukan adalah pembangunan dan pengembangan infrastruktur kawasan, seperti jalan, jaringan air bersih, telepon, penambahan jaringan listrik, disamping beberapa fasilitas lingkungan lainnya. Hal ini sangat mendasar, dimana potensi wilayah yang memerlukan akses yang baik guna memperlancar arus pergerakan barang dan orang di DPP KTP2D Sabila.





DAFTAR PUSTAKA

Daftar Pustaka

- Adisasmita, R. 2001, Perencanaan Pembangunan Perdesaan Menggunakan Pendekatan Partisipatif dan Spasial, Rural Delopment, Pioneer sub projeck, Nippon Koei Co, L.td, Makassar.
- Budiarjo E, 1997, Lingkungan Binaan dan Tata Ruang Kota, Andi, Bandung.
- Departemen Kimpraswil, 2001, Pembentukan DPP dan KTP2D dan Agropolitan Sebagai Konsep Pembangunan Spasial – Kawasan Perdesaan, Makalah disampaikan pada Loka Karya Nasional tentang Kebijakan Pembangunan Prasarana Perdesaan, diselenggarakan oleh Departemen Kimpraswil bekerjasama SSIMP-III pada tanggal 11 -15 Nopember 2001, Jakarta.
- Departemen PU Direktorat Jenderal Cipta Karya, 1996, Standar Perencanaan Tata Ruang, Jakarta
- Departemen Permukiman dan Pengembangan Wilayah, 2000, Standar Pelayanan Minim Permukiman dan Pengembangan Wilayah, Jakarta
- Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah, 2002, Penjelasan Program KTP2D, Seri 1, Jakarta.
- Jayadinata JT, 1999, Tata Guna Tanah Dalam Perencanaan Pedesaan Perkotaan, ITB, Bandung.
- Lembanga Penelitian Unhas, 1992, Studi Tipologi Kabupaten, Penyiapan Materi Teknis Penataan Ruang, Makassar.
- Soesilo NI, 2000, Manajemen Strategik DI Sektor Publik, UI, Jakarta
- Sussongko TA, 2000, Keynote Speaker, Pelatihan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten, Denpasar Bali.
- Stein JM, 1996, Prasarana Umum, dalam buku Perencanaan Kota, Edisi II, Erlangga, Jakarta
- Subrata, 1983, Metodologi Penelitian, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman, Jakarta





LAMPIRAN FOTO



Salah satu fasilitas pendidikan berupa SLTP yang ada di wilayah penelitian

BOSOWA



Fasilitas Perkentoran berupa Kantor Desa yang ada di wilayah penelitian



Salah satu fasilitas pendidikan berupa SMU yang ada di wilayah penelitian

BOSOWA



Salah satu fasilitas pendidikan berupa SD yang ada di wilayah penelitian



Salah satu fasilitas pendidikan berupa TK yang ada di wilayah penelitian

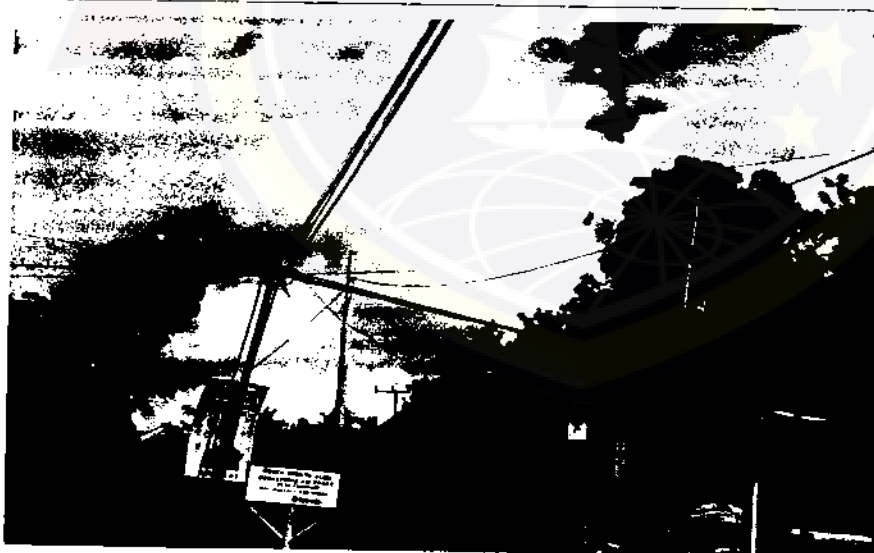
BOSOWA



Fasilitas Kesehatan berupa Puskesmas sebagai salah satu fasilitas penunjang kesehatan yang ada di wilayah penelitian



Fasilitas telekomunikasi berupa jaringan telepon yang ada di wilayah penelitian



Fasilitas jaringan listrik yang ada di wilayah penelitian



Salah satu fasilitas Peeribadatan berupa Mesjid yang ada di wilayah penelitian

BOSOWA



Fasilitas Olah Raga berupa lapangan Sepak Bola yang ada di wilayah penelitian



Salah satu sarana penunjang transportasi berupa jalan di wilayah penelitian dengan kondisi jalan aspal

BOSOWA



Jaringan drainase permanen yang ada di wilayah penelitian



**Hydrant (Bak Penampungan Air Bersih)
di wilayah penelitian**



**Fasilitas perdagangan berupa Warung
di wilayah penelitian**

